



PEMUTAKHIRAN
PK-23

bkkbn 

Buku Profil **KELUARGA INDONESIA** **TAHUN 2023**



Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Direktorat Pelaporan dan Statistik
2024



KATA SAMBUTAN

Pemutakhiran Pendataan Keluarga menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program Pembangunan lainnya di Indonesia. Basis Data Keluarga Indonesia hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga diharapkan dapat menyediakan data dan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan dan dapat menjawab kebutuhan data dan informasi keluarga untuk kepentingan penyusunan program dukungan maupun intervensi oleh pemerintah dan mengakomodasi kebutuhan sektor lain, khususnya dalam upaya mendukung pembangunan kualitas manusia Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, bahwa kebutuhan akan data dan informasi yang berkaitan dengan parameter kependudukan dalam Program Bangga Kencana di semua tingkatan wilayah merupakan hal yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas informasi.

Saya mengharapkan buku Profil Keluarga tahun 2023 ini bermanfaat bagi pengguna data terutama sebagai masukan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan Program Bangga Kencana maupun program pembangunan terkait lainnya serta dapat memenuhi kebutuhan dalam mengeksplorasi data dan untuk keperluan analisa lanjut. Semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam upaya membangun keluarga Indonesia yang berkualitas.

Jakarta, April 2024
Deputi Bidang Advokasi,
Penggerakan, dan Informasi



Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd



Buku Putih Kemajuan Indonesia Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan buku Profil Keluarga Indonesia Tahun 2023 ini. Buku Profil Keluarga Indonesia Tahun 2023 ini sebagai media penyajian serta penyebarluasan data dan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah selama pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023.

Buku Profil Keluarga Indonesia berisi gambaran keluarga secara lengkap berdasarkan indikator kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang telah dimutakhirkan. Data hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga sebagai sumber data dan informasi pelaksanaannya diharapkan benar-benar dapat menghasilkan data dan informasi yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan.

Akhirnya kepada semua pihak, terutama tim kerja yang telah menyusun dan memberikan masukan, saran dan koreksi hingga selesainya buku Profil Keluarga Tahun 2023 ini, kami mengucapkan terima kasih. Saran serta kritik sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas buku Profil Keluarga di tahun berikutnya yang dapat disampaikan melalui Direktorat Pelaporan dan Statistik, email ppdatastunting@gmail.com. Buku ini juga kami sediakan dalam bentuk softcopy yang dapat diunduh pada <https://cis.bkkbn.go.id/adpin/Ditlaptik>.

Jakarta, April 2024

Direktur Pelaporan dan Statistik



Lina Widyastuti, SKM, MAPS

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Lina Widyastuti, SKM, MAPS
(Direktur Pelaporan dan Statistik)

Editor:

Lina Widyastuti, SKM, MAPS

Penyusun:

Anistyas Hayanti, S.Si, M.Si
Ristya Ira Murti, SE, MAPS
Vina Alistiana, S.Sos
Fauziah Ajeng Aryanti, SKM

Analisis Data:

Istiqomatul Fajriyah Yuliati, S.Si, M.Si

Manajemen Data:

Nindi Widyakirono, Amd
Tim PPDS

Kontributor:

Didik Trihantoro, S.Si, MAPS; Zulkipli Lubis, SE; SE, MAPS; Ira Fitriyani Rachmat, S. Sos; Oliyanti A, SKM; Titik Puspa Dewi, SE; Riza Puspitasari, S. Kom; Iis Yuliani, S. Kom; Husnul Wahyu Mahmudah, S. Stat; Isa AL Anshori, A.Md, Ak.; Tri Maryati, S.Pd; Eko Prasetyo, S.Kom; Anggar Lingga Rhomadona, S.Kom

Design Layout:

Wahyu Hamdani

Naskah:

Direktorat Pelaporan dan Statistik

Direktorat Pelaporan dan Statistik
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
2023

AKRONIM

BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
KB	Keluarga Berencana
KIE	Komunikasi Informasi Edukasi
KK	Kepala Keluarga
MKJP	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
NIK	Nomor Induk Kependudukan
PBI	Penerima Bantuan Iuran
PD-KB	Perangkat Daerah Keluarga Berencana
PLKB	Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PK	Pendataan Keluarga
PKB	Penyuluh Keluarga Berencana
PLN	Perusahaan Listrik Nasional
PP	Peraturan Pemerintah
PT	Perguruan Tinggi
PUP	Pendewasaan Usia Perkawinan
PUS	Pasangan Usia Subur
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SIGA	Sistem Informasi Keluarga
SD	Sekolah Dasar
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
UKP	Usia Kawin Pertama

DAFTAR ISI

- iii Kata Sambutan
 - v Kata Pengantar
 - vi Tim Penyusun
 - vii Akronim
 - viii Daftar Isi
 - x Daftar Gambar
 - xi Daftar Grafik
-

1 Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Sasaran
- 1.4 Ruang Lingkup

7 Bab II Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023

- 2.1 Tentang Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023
- 2.2 Indikator Dan Variabel
- 2.3 Pengumpulan Dan Pengolahan Data
- 2.4 Evaluasi Kualitas Data Pemutakhiran PK-23
- 2.5 Cakupan Pemutakhiran Pk-23 Dan Basis Data Keluarga Indonesia

27 Bab III Keluarga Menurut Karakteristik Demografi

- 3.1 Jumlah Keluarga
- 3.2 Karakteristik Kepala Keluarga

37 Bab IV Keluarga Menurut Indikator Pelayanan KB

- 4.1 Karakteristik PUS
- 4.2 Status Kehamilan
- 4.3 Kesertaan Ber-KB

47 Bab V Keluarga Menurut Indikator Pembangunan Keluarga

5.1 Indikator Pembangunan Keluarga Sejahtera

5.1.1 Dimensi Ketentraman

5.1.2 Dimensi Kemandirian

5.1.3 Dimensi Kebahagiaan

5.2 Indikator Rumah Layak Huni

5.3 Keluarga Terpapar Program Bangga Kencana

62 BAB VI Penutup

6.1 Kesimpulan

6.2 Rekomendasi

67 Lampiran

Keluarga Menurut Karakteristik Demografi berdasarkan Provinsi
Keluarga Menurut Indikator Pelayanan KB berdasarkan Provinsi
Keluarga Menurut Indikator Pembangunan Keluarga berdasarkan Provinsi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Pendataan Keluarga.....	3
Gambar 2.1 Perkembangan Pendataan Keluarga.....	9
Gambar 2.2 Regulasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.....	13
Gambar 2.3 Regulasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	14
Gambar 2.4 Pengorganisasian Lapangan.....	15
Gambar 2.5 Struktur Tim Manajemen Data.....	16
Gambar 2.6 Panduan dan Pedoman.....	16
Gambar 2.7 Tenaga Pelaksana Pemutakhiran PK-23.....	19
Gambar 2.8 Proses Pengolahan Data Pemutakhiran PK-23.....	20
Gambar 2.9 Evaluasi Kualitas Data Umur Pemutakhiran PK-23.....	22
Gambar 2.10 Hasil Perhitungan United Nation Index, Whipple Index, dan Myer Index.....	24
Gambar 2.11 Cakupan Pemutakhiran PK-23.....	24
Gambar 2.12 Cakupan Basis Data Keluarga Indonesia.....	25
Gambar 3.1 Provinsi dengan Persentase KK di bawah Usia 19 Tahun Berdasarkan Provinsi, 2023.....	30
Gambar 3.2 Persentase Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin di Indonesia, 2023	30
Gambar 3.3 Persentase Kepala Keluarga Bekerja, 2023.....	33
Gambar 3.4 Persentase Jiwa dalam Keluarga Berdasarkan Kesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional, 2023.....	33
Gambar 4.1 Sebaran PUS menurut Wilayah.....	38
Gambar 4.2 Persentase PUS Menurut Kelompok Umur, 2023.....	39
Gambar 4.3 Distribusi PUS Berdasarkan Kelompok Umur < 20 tahun, 2023.....	39
Gambar 4.4 Persentase PUS Berdasarkan UKP Perempuan, 2023.....	40
Gambar 4.5 Distribusi PUS dengan UKP Perempuan < 19 tahun, 2023.....	40
Gambar 4.6 Distribusi Persentase PUS dengan Jumlah ALH, AMH, dan Anak Ideal Lebih Dari 2 Anak Tertinggi, 2023.....	41
Gambar 4.7 Persentase PUS Hamil 4 Terlalu, 2023.....	42
Gambar 4.8 PUS Berdasarkan Kesertaan ber-KB di Indonesia, 2023.....	43
Gambar 5.1 Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Atap Rumah.....	54
Gambar 5.2 Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Dinding Rumah	54
Gambar 5.3 Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Lantai Rumah Terluas.....	55
Gambar 5.4 Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Sumber Air Minum Utama.....	56
Gambar 5.5 Persentase Keluarga Berdasarkan Kepemilikan Rumah/ Bangunan Tempat Tinggal.....	57

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Jumlah Keluarga Tertinggi Menurut Provinsi di Indonesia, 2023.....	29
Grafik 3.2 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur.....	29
Grafik 3.3 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur di Indonesia, 2023.....	30
Grafik 3.4 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Per Provinsi di Indonesia, 2023.....	31
Grafik 3.5 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Indonesia, 2023.....	32
Grafik 3.6 Kepala Keluarga dengan Tingkat Pendidikan, 2023.....	32
Grafik 3.7 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Indonesia, 2023.....	33
Grafik 3.8 Persentase Jaminan Kesehatan terhadap Individu per Provinsi, 2023.....	34
Grafik 4.1 Persentase PUS Berdasarkan ALH, AMH, dan Anak Ideal, 2023.....	41
Grafik 4.2 Persentasi PUS Hamil Berdasarkan Keinginan Kehamilan.....	42
Grafik 4.3 PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Metode Kontrasepsi, 2023.....	44
Grafik 4.4 PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Provinsi, 2023.....	44
Grafik 4.5 PUS Peserta KB MKJP dan Non MKJP Berdasarkan Provinsi, 2023.....	45
Grafik 5.1 Persentase Konflik Dalam Keluarga, 2023.....	50
Grafik 5.2 Persentase Keluarga Terpapar Pesan/Informasi Bangga Kencana Melalui Media, 2023.....	57
Grafik 5.3 Persentase Keluarga terpapar pesan/informasi Bangga Kencana melalui Petugas.....	58

BAB

I

Pendahuluan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga melalui upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan kematian, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat.

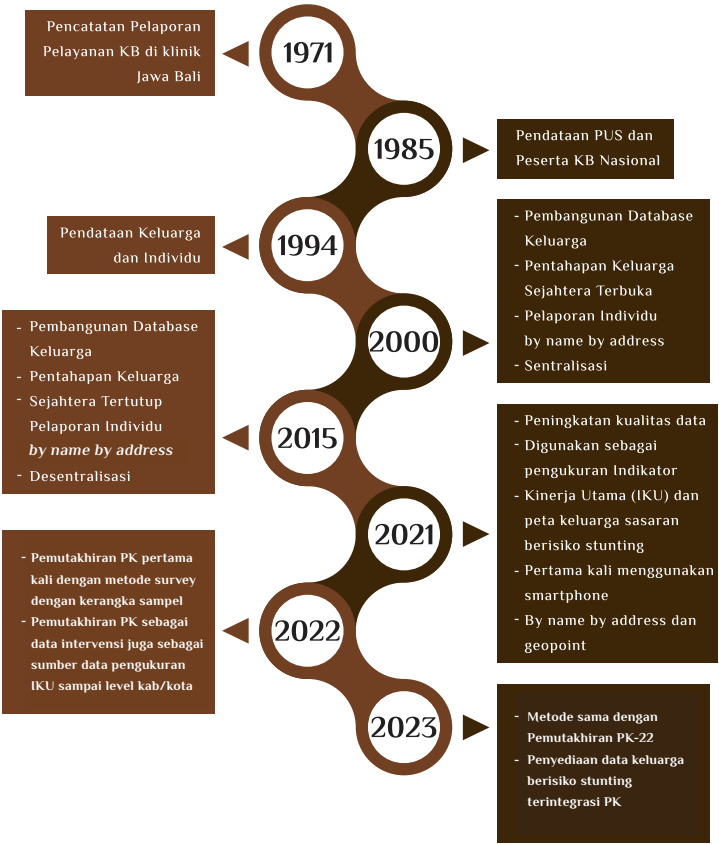


Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibentuk dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam melaksanakan tugas pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana, BKKBN mempunyai fungsi perumusan kebijakan nasional; penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria; pelaksanaan advokasi dan koordinasi; penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi; penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; serta pembinaan, bimbingan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga tersebut, sesuai dengan pasal 49 sampai dengan pasal 52 UU No 52 Tahun 2009, harus berdasarkan data dan informasi kependudukan dan keluarga sehingga pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga melalui penyelenggaraan dan pengembangan sistem informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada lampiran N menekankan bahwa sub urusan Keluarga Berencana salah satunya adalah pengelolaan dan pengendalian Sistem Informasi Keluarga. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga lebih lanjut diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 63 BAB IV Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga yang menekankan bahwa penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga bertujuan untuk menyediakan data dan informasi keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan lain yang diperoleh melalui pendataan keluarga yang dilakukan secara serentak setiap 5 (lima) tahun.

Pendataan Keluarga telah dilaksanakan lima kali sejak pertama dilakukan pada tahun 1971 :



Gambar 1.1 Perkembangan Pendataan Keluarga

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, Pendataan Keluarga yang dilaksanakan sekali dalam 5 tahun kemudian dilakukan pemutakhiran setiap tahunnya. Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia adalah kegiatan untuk memutakhirkan dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam BDKI melalui kunjungan rumah ke rumah dengan cara wawancara dan atau observasi kepala keluarga, yang dilakukan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan Instruksi Presiden (inpres) No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem point 27 tertuang bahwa Kepala BKKBN untuk (a) menyiapkan hasil pendataan keluarga untuk penetapan kebijakan

dalam intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk penurunan *stunting*; (b) menyiapkan dan memberikan pelayanan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, serta intervensi percepatan penurunan *stunting* kepada keluarga miskin ekstrem.

Salah satu keunggulan dari data Pendataan Keluarga maupun hasil pemutakhirannya adalah data tersebut merekam data keluarga serta individu di dalam keluarga sampai *by name by address* (BNBA) sehingga penggunaannya sebagai data pensasaran dan dimanfaatkan sebagai peta operasional Program Bangga Kencana maupun Program pembangunan lain berbasis keluarga. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data dan informasi keluarga secara luas, maka diperlukan penyajian serta penyebarluasan hasil pengumpulan dan pengolahan data dan informasi keluarga ke dalam berbagai saluran atau media publikasi data terhadap hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 salah satunya melalui buku Profil Keluarga Indonesia.

1.2 Tujuan



Tujuan Umum

Memberikan gambaran secara menyeluruh tentang karakteristik keluarga hasil Pemutakhiran PK-23 yang dimanfaatkan untuk perencanaan, intervensi, evaluasi hingga pengukuran kinerja sasaran strategis program Bangga Kencana maupun program pembangunan terkait lainnya yang berbasis keluarga.

Tujuan Khusus

1. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Pemutakhiran PK-23;
2. Memberikan gambaran mengenai cakupan hasil Pemutakhiran PK-23;
3. Memberikan gambaran mengenai karakteristik keluarga Indonesia menurut indikator kependudukan;
4. Memberikan gambaran mengenai karakteristik keluarga Indonesia menurut indikator Keluarga Berencana;
5. Memberikan gambaran mengenai karakteristik keluarga Indonesia menurut indikator Pembangunan Keluarga ;

1.3 Sasaran

Sasaran pengguna Buku Profil Keluarga Indonesia hasil Pemutakhiran PK-23 adalah pengelola Program Bangga Kencana di semua tingkatan wilayah, Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa/kelurahan, Perangkat Daerah kabupaten dan Kota serta *stakeholder* dan mitra kerja baik akademisi, pihak swasta, maupun organisasi profesi dan lainnya.

1.4 Ruang Lingkup

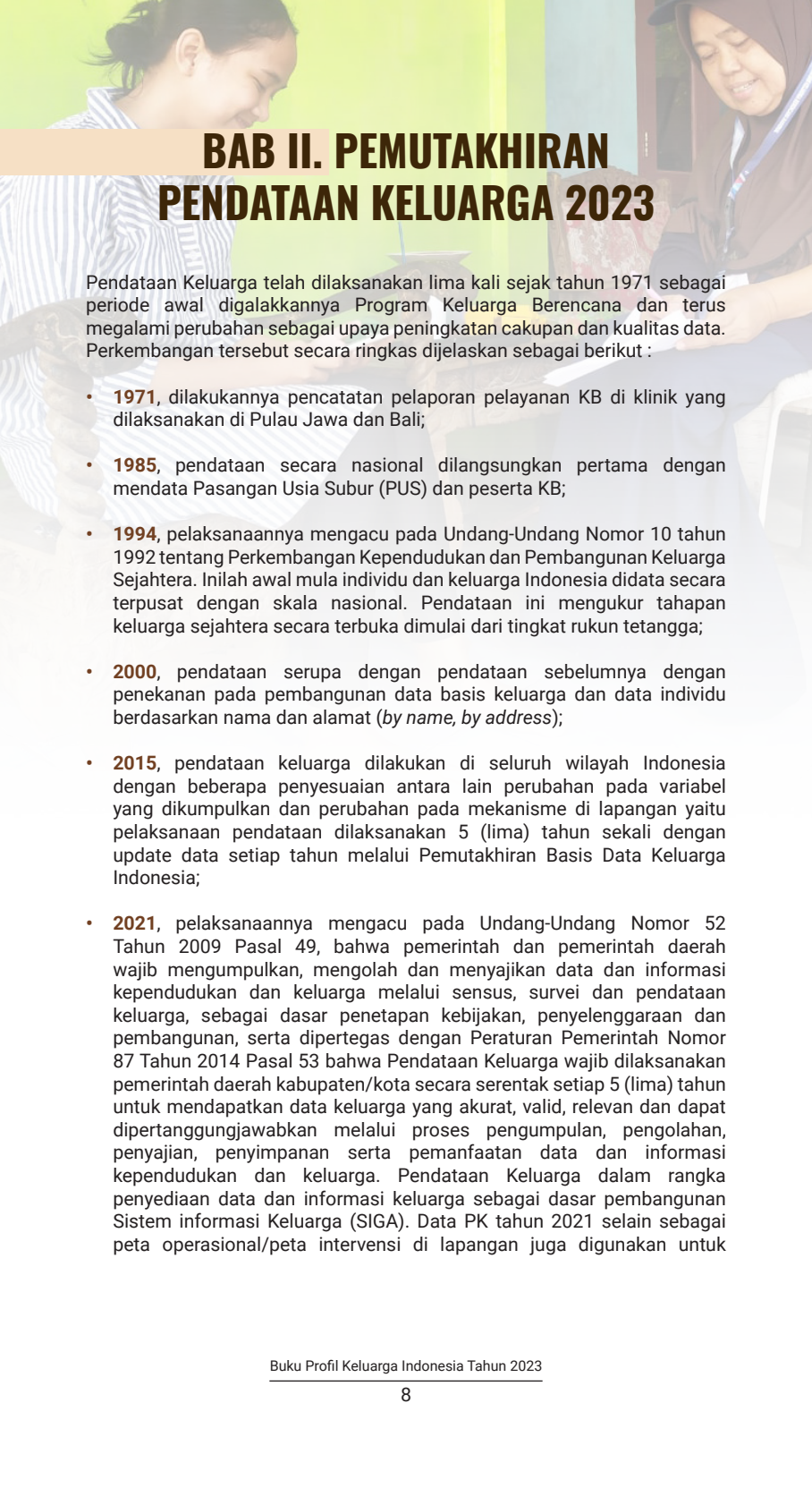
Profil Keluarga Indonesia Tahun 2023 meliputi karakteristik keluarga secara nasional sampai dengan tingkat provinsi yang memuat informasi tentang keluarga dan individu anggota keluarga di setiap wilayah yang didata menurut karakteristik kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.



BAB

II

Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023



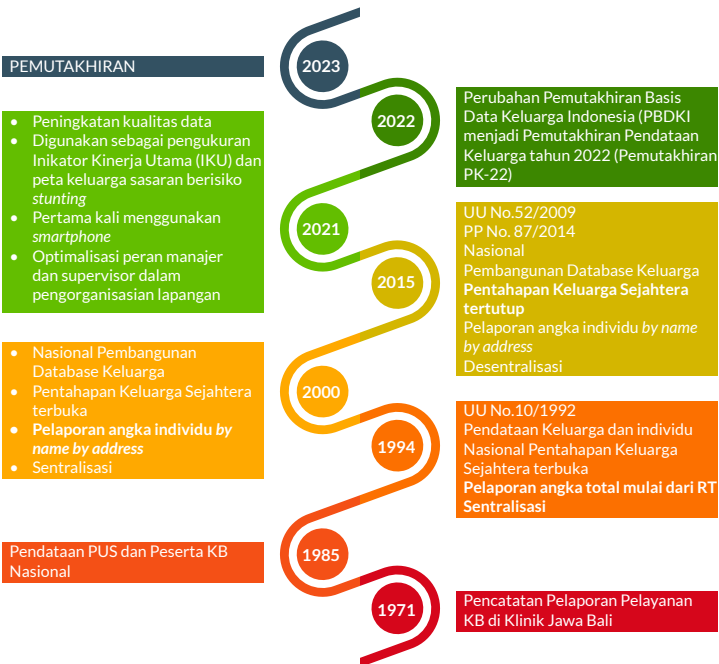
BAB II. PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA 2023

Pendataan Keluarga telah dilaksanakan lima kali sejak tahun 1971 sebagai periode awal digalakkannya Program Keluarga Berencana dan terus mengalami perubahan sebagai upaya peningkatan cakupan dan kualitas data. Perkembangan tersebut secara ringkas dijelaskan sebagai berikut :

- **1971**, dilakukannya pencatatan pelaporan pelayanan KB di klinik yang dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali;
- **1985**, pendataan secara nasional dilangsungkan pertama dengan mendata Pasangan Usia Subur (PUS) dan peserta KB;
- **1994**, pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Inilah awal mula individu dan keluarga Indonesia didata secara terpusat dengan skala nasional. Pendataan ini mengukur tahapan keluarga sejahtera secara terbuka dimulai dari tingkat rukun tetangga;
- **2000**, pendataan serupa dengan pendataan sebelumnya dengan penekanan pada pembangunan data basis keluarga dan data individu berdasarkan nama dan alamat (*by name, by address*);
- **2015**, pendataan keluarga dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan beberapa penyesuaian antara lain perubahan pada variabel yang dikumpulkan dan perubahan pada mekanisme di lapangan yaitu pelaksanaan pendataan dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dengan update data setiap tahun melalui Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia;
- **2021**, pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 49, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi kependudukan dan keluarga melalui sensus, survei dan pendataan keluarga, sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan, serta dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Pasal 53 bahwa Pendataan Keluarga wajib dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. Pendataan Keluarga dalam rangka penyediaan data dan informasi keluarga sebagai dasar pembangunan Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Data PK tahun 2021 selain sebagai peta operasional/peta intervensi di lapangan juga digunakan untuk

mengukur indikator kinerja utama (IKU) Program bangga Kencana dan peta sasaran keluarga berisiko *stunting*. Dari aspek pelaksanaannya, pertama kali pengumpulan data dengan metode *smartphone* dan optimalisasi peran kader, supervisor serta manajer pada pengorganisasi lapangan.

- **2022**, pemutakhiran pertama terhadap hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021, mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 50 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan serta wajib mendukung terkumpulnya data dan informasi yang diperlukan dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Pasal 53, bahwa hasil Pendataan Keluarga wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun.
- **2023**, pemutakhiran terhadap hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 dan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022. Data hasil Pemutakhiran PK-23 saat ini telah banyak diminati dan dimanfaatkan oleh kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, akademisi/ perguruan tinggi, swasta serta mitra kerja lainnya, di antaranya sebagai data pensasaran program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022) dan Percepatan Penurunan *Stunting* (peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021). Dalam rangka menjaga kualitas data serta urgensi keberlanjutan pemenuhan kebutuhan data pensasaran tersebut, maka pemutakhiran data PK21 dan Pemutakhiran PK-22 menjadi mutlak dilakukan.



Gambar 2.1 Perkembangan Pendataan Keluarga

2.1 Tentang Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023



Definisi

Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 (Pemutakhiran PK-23) adalah kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam basis data keluarga Indonesia hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 (Pemutakhiran PK-22) dengan cara mewawancarai dan atau mengobservasi keluarga melalui kunjungan rumah ke rumah.

Sasaran

Pemutakhiran PK-23 dilaksanakan serentak pada tanggal **1 sampai dengan 31 Juli 2023** pada masing-masing kabupaten/kota di seluruh provinsi dengan didahului pra pelaksanaan tanggal **20 sampai dengan 30 Juni 2023** dengan sasaran untuk mendata keluarga dan keluarga khusus yang menjadi target pendataan.



Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: suami istri, atau; suami istri dan anaknya, atau; ayah dan anak, atau; ibu dan anak (Definisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009).



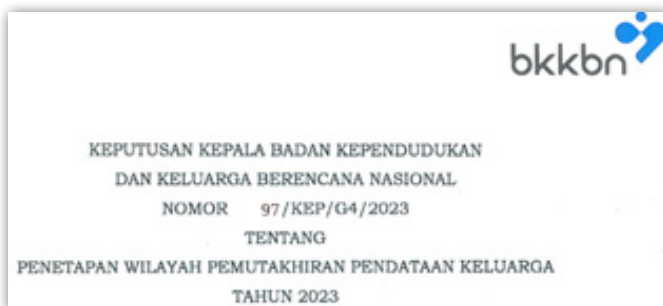
Keluarga Khusus adalah keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya, misalnya kakak dan adik tanpa orang tua, seorang kakek/nenek dan cucunya atau seorang diri. Anggota keluarga lain dapat didata pada tipe keluarga khusus dengan kode hubungan dengan kepala keluarga lainnya dengan syarat memiliki hubungan kekeluargaan, tidak memiliki orang tua kandung dan berstatus tidak kawin. Keluarga didata tidak berdasarkan kepemilikan administrasi kependudukan di wilayah tersebut, namun berdasarkan di mana keluarga berada saat pendataan dengan syarat :

- 1) Keluarga telah tinggal di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
- 2) Jika kurang dari 6 (enam) bulan maka dipastikan keluarga tersebut berencana menetap di wilayah tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
- 3) Satu formulir Pemutakhiran PK-23 hanya boleh terdapat 1 pasangan menikah, jika memiliki istri/suami lebih dari 1 maka dicatat pada formulir terpisah.

Lokus

- Pemutakhiran PK-23 dilaksanakan pada desa/kelurahan sampel yang terpilih berdasarkan kerangka sampel dan target keluarga yang telah ditentukan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan teknik *two stage stratified sampling*.
- Pemutakhiran PK-23 pada wilayah sampel ditujukan agar hasil pemutakhiran PK-23 dapat menggambarkan populasi sehingga Pemutakhiran PK-23 dapat menyediakan data untuk perhitungan indikator kinerja Program Bangsa Kencana.
- Desa/kelurahan Prioritas adalah desa/kelurahan yang terpilih sesuai arah kebijakan pelaksanaan Pemutakhiran PK-23 yaitu peningkatan cakupan dan perbaikan kualitas data basis keluarga, sehingga dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria sebagai berikut :
 - 1) Desa/kelurahan belum terdata pada PK21 dan Pemutakhiran PK-22
 - 2) Desa/kelurahan dengan cakupan keluarga terdata pada PK21 dan Pemutakhiran PK-22 rendah
 - 3) Desa/kelurahan yang bukan termasuk dalam lokus PK-22.

- Target KK sasaran pada desa/kelurahan prioritas menyesuaikan ketersediaan sumber daya untuk memenuhi target KK masing-masing provinsi. Dari sasaran keluarga berdasarkan arah kebijakan maka dilakukan penajaman sasaran target KK didata yaitu:
 - 1) Keluarga belum terdata baik keluarga baru maupun keluarga tidak terdata pada PK21 dan Pemutakhiran PK-22.
 - 2) Keluarga memiliki anak usia 0-4 tahun (baduta/balita)
 - 3) Memperbaharui/ memutakhirkan/ meng-update data keluarga berdasarkan observasi pada *listing*, memenuhi
 - Keluarga sasaran berisiko *stunting* (ibu hamil/memiliki baduta atau balita), memiliki rumah tidak layak huni dan lingkungan tidak sehat (sanitasi dan air bersih layak)
 - Keluarga layak menerima fasilitasi bantuan sosial



- Lokus pemutakhiran PK-23 ditetapkan melalui Keputusan Kepala BKKBN Nomor 97/KEP/G4/2023 tentang Penetapan wilayah Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023.

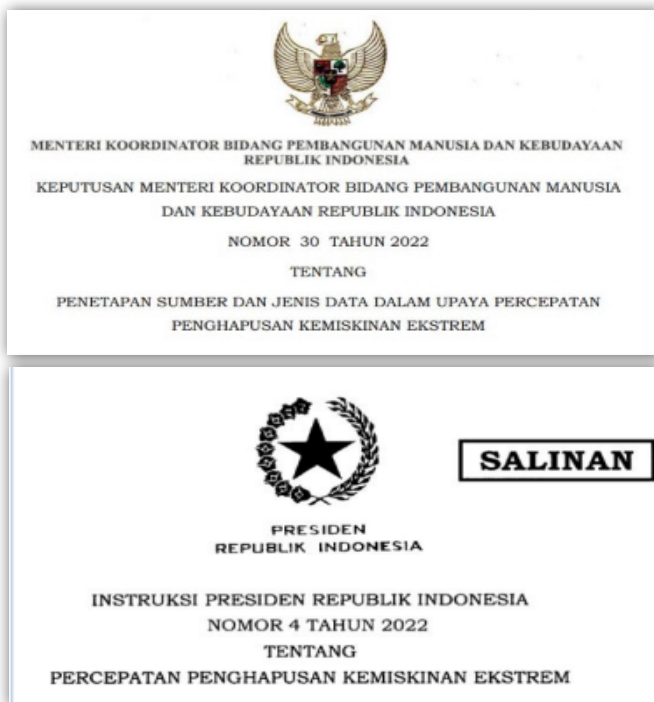
Manfaat

1. Peta Sasaran
 - a) Penentuan sasaran yang lebih tajam berdasarkan kondisi, potensi dan kebutuhan aktual dari masing-masing keluarga yang ada di setiap tingkatan wilayah
 - b) Pemutakhiran peta keluarga berdasarkan indikator strategis
2. Program, Dukungan, Sarana, dan Motivasi
 - a) Penentuan program dukungan yang sesuai untuk setiap keluarga dan wilayah
 - b) Peningkatan kualitas kesertaan ber-KB untuk penggunaan metode kontrasepsi yang lebih efektif, aman dan nyaman
 - c) Data pensasaran upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan *stunting*
 - d) Sarana motivasi untuk mendorong setiap keluarga mengikuti kelompok kegiatan (poktan) Bagi keluarga yang memiliki sasaran pembinaan
3. Program Pembangunan lainnya

Pemanfaatan hasil pemutakhiran PK-23 untuk kepentingan pembangunan keluarga melalui keterlibatan sektor lain seperti Program Penerima Bantuan Pangan, Program Bantuan Subsidi Perumahan dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dan lainnya.

Urgensi Pemutakhiran PK-23

- **Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem** sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 yang menetapkan data Pendataan Keluarga serta pemutakhirannya sebagai sumber data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

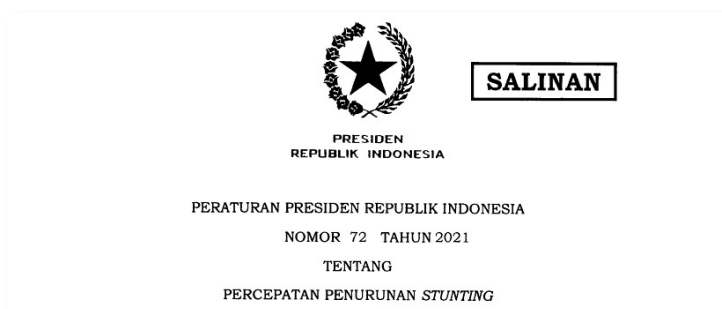


Gambar 2.2 Regulasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Intervensi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem secara tepat sasaran dilakukan kementerian/Lembaga melalui kebijakan strategi dalam pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Khusus Kepala BKKBN, sesuai instruksi Presiden 1) menyiapkan hasil Pendataan Keluarga untuk penetapan kebijakan dalam intervensi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem termasuk penurunan *stunting*; 2) menyiapkan dan memberikan pelayanan program Bangga Kencana serta intervensi percepatan penurunan *stunting* kepada keluarga miskin ekstrem.

- **Percepatan Penurunan *Stunting***, BKKBN diberikan mandat oleh Presiden sebagai ketua pelaksana dalam menyiapkan perumusan rencana aksi nasional, melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan antar kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa serta pemangku kepentingan, melakukan koordinasi peningkatan kapasitas, kerja sama dan kemitraan serta menyiapkan dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

percepatan penurunan *stunting*. Sebagaimana amanat Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* serta Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (RAN PASTI) 2021-2024, bahwa salah satu kegiatan prioritas dalam RAN PASTI adalah penyediaan data sasaran keluarga berisiko *stunting* yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga dan pemutakhirannya. Penyediaan data keluarga berisiko *stunting* dimaksudkan untuk menyediakan data operasional/ data intervensi melalui penapisan terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) 4 Terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak) serta penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih yang layak. Data keluarga berisiko *stunting* akan digunakan sebagai data pensasaran *by name by address* dalam melakukan pendampingan keluarga sasaran (keluarga memiliki baduta (0-23 bulan), balita (23-59 bulan), PUS dan PUS hamil).



Gambar 2.3 Regulasi Percepatan Penurunan *Stunting*

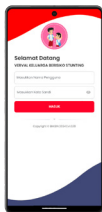
Tools Pengumpulan Data

Salah satu upaya peningkatan kualitas data, Pemutakhiran PK-23 dilakukan dengan menggunakan *smartphone* (80%), kecuali pada daerah dengan kondisi geografis khusus, keterbatasan koneksi, dan keterbatasan sumber daya kader pendata (spesifikasi *smartphone* tidak mendukung); maka pendataan di daerah tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir (20%).

Pada Pemutakhiran PK-23 terdapat provinsi yang melakukan pengumpulan data 100% menggunakan *smartphone* yaitu provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Riau, Jambi, Lampung, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Banten, Kep.Bangka Belitung, dan Gorontalo.



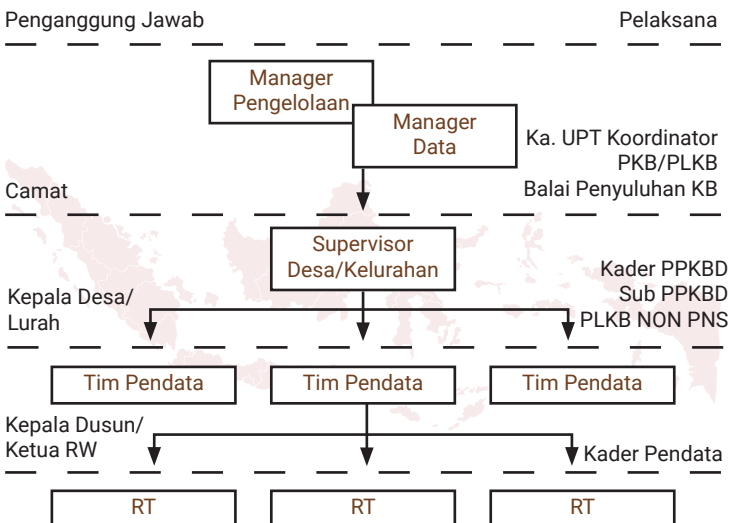
- 2 Kader Pendata melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kertas formulir F/I/Pemutakhiran-PK/23;
- Terdapat dua jenis formulir yang digunakan yaitu : formulir cetak output (formulir dengan data) dan formulir kosong/ tanpa data;
- Pengolahan data dilakukan di tingkat kecamatan, dalam hal ini dapat memanfaatkan Balai Penyuluhan KB.



- Kader melakukan pengumpulan data dan input ke dalam aplikasi PWA menggunakan *smartphone*;
- Data akan masuk ke *server* regional untuk dilihat ketepatan pengisian dan kebenaran datanya oleh manajer data kecamatan;
- Data dapat masuk ke *server* pusat dengan persetujuan manajer pengelolaan kecamatan;
- Metode *smartphone* digunakan untuk pengumpulan, penginputan dan perekaman data keluarga dan anggota keluarga pada desa/kelurahan terpilih *sample* BPS.

Pengorganisasian Lapangan

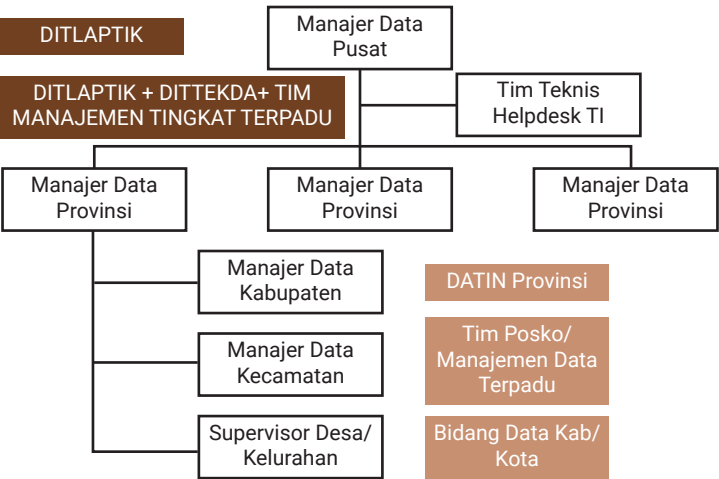
Pelaksanaan Pemutakhiran PK-23 tidak lepas dari komitmen pimpinan baik pusat dan daerah, peran pengelola data dan informasi tingkat pusat sampai dengan kecamatan, petugas lini lapangan yang terdiri dari manajer pengelolaan dan manajer data tingkat kecamatan, supervisor tingkat desa, dan kader pendata terlatih yang berasal dari lingkungan RT/RW dimana keluarga tinggal di tingkat RT/RW.



Gambar 2.4 Pengorganisasian Lapangan

Struktur Manajemen Data

Dalam rangka memastikan pelaksanaan manajemen data Pemutakhiran PK-23 (pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, dan pemberian umpan balik) berjalan dengan baik, maka diterapkan alur manajemen data secara berjenjang dimulai dari tingkat desa/kelurahan hingga di tingkat pusat. Pada pelaksanaan Pemutakhiran PK-23, struktur manajemen data sama dengan PK21 dan Pemutakhiran PK-22 yaitu pelibatan tugas dan fungsi tim posko/tim manajemen data terpadu/helpdesk dalam mengatasi kendala pelaksanaan Pemutakhiran PK-23 di lapangan.



Gambar 2.5 Struktur Tim Manajemen Data

Panduan Dan Pedoman

Sebagai acuan/referensi bagi para pengelola data dan informasi baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan manajemen Pemutakhiran PK-23 dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan (pengumpulan dan pengolahan data), mekanisme pembayaran hingga pemantauan dan evaluasi, maka disusun pedoman dan panduan sesuai dengan tugas, fungsi dan peran pelaksana pengorganisasian lapangan.



Gambar 2.6 Panduan dan Pedoman

2.2 Indikator Dan Variabel

Indikator Kependudukan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 87 Pasal 46 ayat (2), disebutkan bahwa data demografi paling sedikit meliputi data rumah tangga, data kepala keluarga menurut status perkawinan, data anggota keluarga menurut jenis kelamin dan data kelompok umur; sehingga dirumuskan indikator kependudukan pada Pemutakhiran PK-23 meliputi:

Nomor Anggota Keluarga	Nama Anggota Keluarga Dan Nik	Jenis Kelamin
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir	Status Perkawinan	Usia Kawin Pertama
Kepemilikan Akte Lahir	Hubungan Dengan Kepala Keluarga	Kode Ibu Kandung
Agama	Jenis Pekerjaan	Status Pekerjaan
Pendidikan	Kepesertaan JKN/Asuransi Kesehatan Lainnya	Mutasi Anggota Lainnya

Indikator Keluarga Berencana

Berdasarkan PP 87 Pasal 46 ayat (3), Data Keluarga Berencana paling sedikit meliputi jumlah pasangan usia subur, jumlah pasangan usia subur yang sedang menjadi peserta KB, dan jumlah pasangan usia subur yang tidak menjadi peserta KB; sehingga dirumuskan indikator KB pada Pemutakhiran PK-23 meliputi :

Frekuensi Melahirkan	Jumlah Anak Ideal	Status Kehamilan
Keinginan Punya Anak	Penggunaan Alat/Obat/ Cara KB	Status penggunaan alat/obat/ cara KB
Lama Penggunaan Alat/ Obat/Cara KB	Alasan Utama Tidak Pakai KB atau Putus Pakai KB	Jenis Alat/Obat/Cara KB Yang Dipakai Saat Ini Atau Terakhir Dia Pakai
Sumber Mendapatkan Pelayanan Alat/Obat/Cara KB Terakhir	Jenis Informasi Metode KB Yang Didapatkan Ditempat Pelayanan KB	

Indikator Pembangunan Keluarga

Berdasarkan PP 87 pasal 46 ayat (4), data keluarga sejahtera berdasarkan indikator keluarga sejahtera dengan variabel paling sedikit meliputi agama, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kepesertaan dalam program KB, tabungan, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan, informasi dan peranan dalam masyarakat; sehingga dirumuskan indikator Pembangunan Keluarga pada Pemutakhiran PK-23 meliputi :

Anggota Keluarga Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntutan Agama Atau Kepercayaan Yang Dianut	Keluarga Memiliki Buku/ Akte Nikah Yang Sah	Konflik Antar Keluarga Selama 6 Bulan Terakhir
Anggota Keluarga Memiliki Sumber Penghasilan Untuk Kebutuhan Pokok Perbulan Selama 6 Bulan Terakhir	Setiap Anggota Keluarga Makan Makanan Beragam Paling Sedikit 2 Kali Sehari Dalam 6 Bulan Terakhir	Keluarga Memiliki Aset
Anggota Keluarga Memiliki Penyakit Kronis Selama 1 Bulan Terakhir	Terdapat Anggota Disabilitas	Anggota Keluarga Mengakses Informasi Dari Internet Selama 6 Bulan Terakhir
Anggota Keluarga Memiliki Waktu Berinteraksi Setiap Hari Selama 6 Bulan Terakhir	Pengasuhan Anak Dilakukan Bersama Suami Istri Selama 6 Bulan Terakhir	Keluarga Pernah Berekreasi Bersama Di Luar Rumah Selama 6 Bulan Terakhir
Keluarga Ikut Serta Dalam Kegiatan Sosial/Gotong Royong Di Lingkungan RT Selamat 6 Bulan Terakhir	Jenis dan Kondisi Atap Rumah Terluas	Jenis dan Kondisi Dinding Rumah Terluas
Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Luas Rumah/Bangunan Keseluruhan	Orang Yang Tinggal dan Menetap Dirumah /Bangunan
Bahan Bakar Utama Memasak	Status Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tingga	Jenis dan Kondisi Dinding Rumah Terluas
Jenis Media Informasi	Keluarga Pernah Memperoleh/Mendengar, Melihat/ Membaca Pesan Informasi Program Bangga Kencana dan <i>Stunting</i>	Petugas Yang Memberikan Informasi Program Bangga Kencana Dan <i>Stunting</i>
Jenis dan kondisi lantai terluas	Sumber penerangan utama	Sumber air minum utama

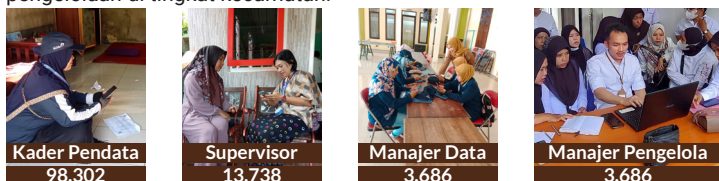
2.3 Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Pengumpulan Data

Pemutakhiran PK-23 dilakukan dengan mengumpulkan data primer keluarga terkait data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga

serta data individu anggota keluarga yang dilakukan oleh kader pendata/masyarakat secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. Pemutakhiran PK-23 dilaksanakan serentak pada tanggal **1 sampai dengan 31 Juli 2023** pada masing-masing kabupaten/kota di seluruh provinsi dengan didahului **pra pelaksanaan tanggal 20 sampai dengan 30 Juni 2023**. Pemutakhiran PK-23 dilakukan dengan metode survei pada lokus wilayah tertentu baik wilayah sampel maupun prioritas pendataan, kecuali Provinsi DKI Jakarta, karena DKI Jakarta menggunakan metode pengumpulan data melalui CARIK Jakarta.

Tenaga pelaksana Pemutakhiran PK-23 meliputi kader pendata di tingkat RT/RW, supervisor di tingkat desa/kelurahan, manajer data dan manajer pengelolaan di tingkat kecamatan.



Gambar 2.7 Tenaga Pelaksana Pemutakhiran PK-23

Pengumpulan data Pemutakhiran PK-23 dilakukan dengan 2 (dua) *tools* yaitu:

1) Pengumpulan Data menggunakan Formulir F/I/Pemutakhiran-PK/23 (*paperbased*)

Kader mendata menggunakan formulir F/I/Pemutakhiran-PK/23, kemudian Pengolahan data dilakukan di tingkat kecamatan dengan memanfaatkan Balai Penyuluhan. Pengumpulan data dengan menggunakan formulir (*paperbased*) hanya dilakukan di sebagian kecil wilayah terutama untuk wilayah yang tidak memiliki akses jaringan maupun tidak tersedianya sarana *smartphone* maupun SDM kader pendata yang kurang mampu mengoperasikan aplikasi *smartphone*.

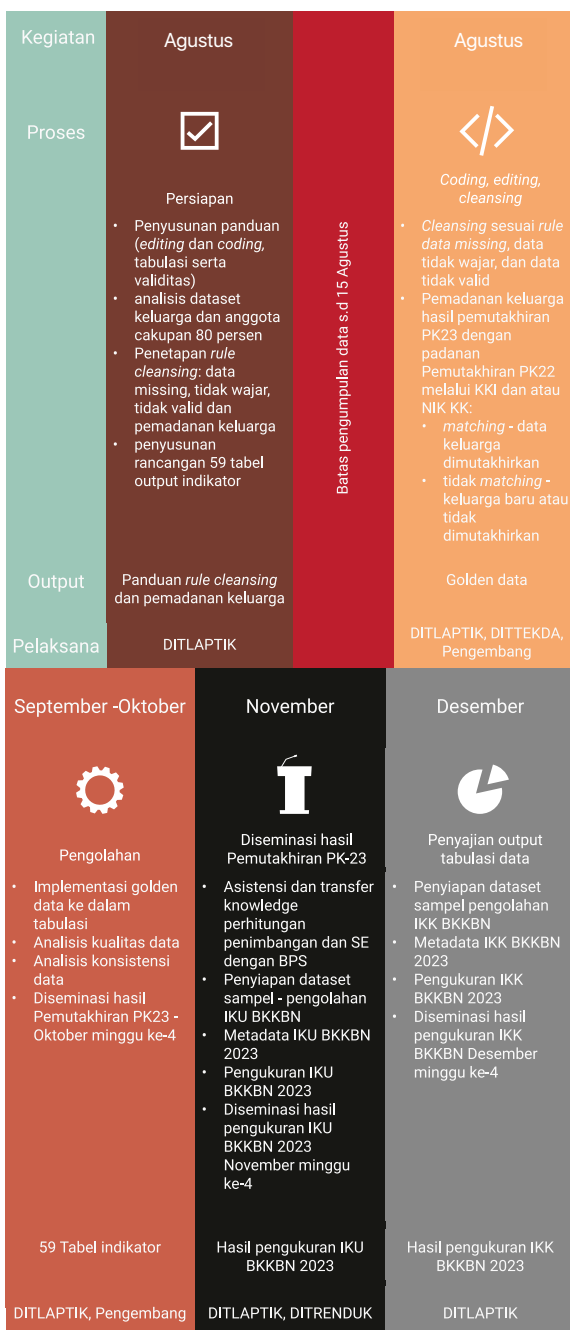
2) Pengumpulan Data dengan Menggunakan *Smartphone*

Kader mendata menggunakan aplikasi berbasis *smartphone* (PWA). Pengumpulan data dengan menggunakan *smartphone* dilakukan di sebagian besar wilayah. Provinsi yang berkomitmen melakukan Pemutakhiran PK-23 metode *smartphone* sepenuhnya (100%) adalah Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa Tengah, Banten, Bali, DI Yogyakarta, NTB, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

Pengolahan Data Pendataan Keluarga

Setelah periode pengumpulan data ditutup terhadap keseluruhan proses entri data maka selanjutnya dilakukan pengolahan data di tingkat pusat untuk menghasilkan data yang bersih, valid dan sesuai fakta di lapangan. Proses Pengolahan data yang terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan
- 2) *Coding, Editing-validasi*
- 3) Pengolahan
- 4) Diseminasi Hasil Pemutakhiran PK-23
- 5) Penyajian Data: Tabulasi Output



Gambar 2.8 Proses Pengolahan Data Pemutakhiran PK-23

Gambar 2.8 menjelaskan proses pengolahan data Pemutakhiran PK-23 yang dimulai tahap sebagai berikut :

- 1) **Persiapan**, dilaksanakan pada bulan Agustus 2023, dengan *output* adalah Panduan, Rule Cleansing dan Pemadanan Keluarga meliputi kegiatan:
 - Penyusunan panduan (*editing* dan *coding*, tabulasi, serta validitas)
 - Analisis dataset keluarga dan anggota cakupan 80 persen
 - Penetapan *rule cleansing*: struktur data, validasi data, data *missing*, tidak wajar, tidak valid, dan pemadanan keluarga
 - Penyusunan rancangan 59 tabel *output* indikatorPelaksana kegiatan adalah Direktorat Pelaporan dan Statistik
- Penetapan *rule* pemadanan keluarga
Pelaksana adalah Direktorat Pelaporan dan Statistik
- 2) **Cleansing-Coding dan Editing**, dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 dengan *output* adalah *golden data*, meliputi kegiatan:
 - *Cleansing* sesuai *rule data missing*, data tidak wajar, dan data tidak valid
 - Pemadanan keluarga hasil Pemutakhiran PK2-3 dengan padanan Pemutakhiran PK-22 melalui KKI dan atau NIK KKPelaksana kegiatan adalah Direktorat Pelaporan dan Statistik, Direktorat Teknologi Informasi dan Data serta Pengembang Aplikasi.
- 3) **Pengolahan**, dilaksanakan pada bulan September - Oktober 2023, *output* adalah 59 tabel indikator, meliputi kegiatan:
 - Implementasi *golden data* ke dalam tabulasi
 - Analisis kualitas data
 - Analisis konsistensi data
 - Diseminasi hasil Pemutakhiran PK-23 pada Oktober minggu ke-4Pelaksana adalah Direktorat Pelaporan dan Statistik bersama Pengembang Aplikasi.
- 4) **Diseminasi Hasil Pemutakhiran PK-23**, dilaksanakan pada bulan November 2023, *output* adalah hasil pengukuran IKU BKKBN 2023, meliputi kegiatan:
 - Asistensi dan *transfer knowledge* perhitungan penimbang dan SE dengan BPS
 - Penyiapan dataset sampel – pengolahan IKU BKKBN
 - Metadata IKU BKKBN 2023
 - Pengukuran IKU BKKBN 2023
 - Diseminasi hasil pengukuran IKU BKKBN 2023 pada bulan November minggu ke-4Pelaksana adalah Direktorat Pelaporan dan Statistik bersama Direktorat
- 5) **Penyajian data**: Tabulasi Output, dilaksanakan bulan Desember 2023 dengan *output* hasil pengukuran IKK BKKBN 2023, meliputi kegiatan:
 - Penyiapan dataset sampel – pengolahan IKK BKKBN
 - Metadata IKK BKKBN 2023
 - Pengukuran IKK BKKBN 2023
 - Diseminasi hasil pengukuran IKK BKKBN 2023 pada bulan Desember minggu ke-4Pelaksana kegiatan adalah Direktorat Pelaporan dan Statistik

2.4 Evaluasi Kualitas Data Pemutakhiran PK-23



Pemutakhiran PK-23 dalam proses pengumpulannya memungkinkan terjadi kesalahan pencatatan dan pelaporan data. Kesalahan umum yang biasanya terjadi adalah kesalahan data umur anggota keluarga. Kurang tepatnya pelaporan umur atau tidak melaporkan umur dengan benar disebabkan anggota keluarga tersebut tidak mengetahui tanggal kelahirannya atau

umurnya, sehingga pelaporan umurnya hanya berdasarkan perkiraan sendiri atau perkiraan Kader Pendata.

Pada Pemutakhiran PK-23, untuk memperoleh keterangan umur yang lebih baik dilakukan dengan pengisian tanggal, bulan dan tahun lahir anggota keluarga. Selain itu, untuk anggota keluarga yang tidak tahu tanggal kelahirannya, tetap diupayakan memperoleh keterangan tentang tanggal, bulan, dan tahun lahir dengan menghubungkan peristiwa penting setempat atau nasional, atau bisa juga waktu kelahiran anak pertamanya. Namun demikian, walaupun telah dilakukan berbagai cara untuk memperoleh keterangan tentang tanggal, bulan, dan tahun lahir, data anggota keluarga menurut umur dalam Pemutakhiran PK-23 masih memungkinkan tidak terlepas dari kesalahan dalam pelaporan. Untuk melihat kualitas data umur dan jenis kelamin, dilakukan evaluasi kualitas data umur hasil Pemutakhiran PK-23 dengan menggunakan *United nation Index*, *Whipple Index*, dan *Myer Index*.

	UNITED NATION INDEX	WHIPPLE INDEX	MYER INDEX
Tujuan	Untuk melihat tingkat keakurasian umur dan jenis kelamin	Untuk mengukur kecenderungan keluarga melaporkan umur yang berakhir 0 atau 5	Untuk mengukur kecenderungan pelaporan umur berakhir 1 sampai 9, sehingga dapat dievaluasi digit mana yang paling diminati (dijadikan preferensi) dan juga digit yang paling dihindari
Ketentuan	Jika nilai <i>united nation index</i> <20 berarti data umur dan jenis kelamin tersebut akurat	Jika nilai <i>whipple index</i> = 100 berarti tidak ada kecenderungan untuk menyebutkan umur pada angka tertentu	Jika <i>myer index</i> <100 berarti pencatatan dan pelaporan umur dapat dikatakan baik
Hasil	13,59 (AKURAT)	100,00 (SANGAT AKURAT)	1,33 (BAIK)

Gambar 2.9. Evaluasi Kualitas Data Umur Pemutakhiran PK-23

1) *United Nation Index*

United Nation Index digunakan untuk melihat tingkat keakurasian umur dan jenis kelamin. Index ini menggabungkan perkiraan akurasi dari umur menurut kelompok umur untuk laki-laki dan perempuan secara terpisah dengan perkiraan akurasi dari rasio jenis kelamin untuk kelompok umur yang berbeda. Dalam menentukan tingkat keakurasian data umur menggunakan *United Nation Index*, ada tiga kriteria, yaitu jika *United Nation Index* < 20 , maka data umur dan jenis kelamin tersebut akurat; jika *United Nation Index* sekitar 20 - 40, maka data umur dan jenis kelamin tersebut tidak akurat; dan jika *United Nation Index* > 40 , maka data umur dan jenis kelamin tersebut sangat tidak akurat (BPS, 2010).

Pada Gambar 2.9 menunjukkan bahwa perhitungan *United Nation Index* pada hasil Pemutakhiran PK-23 sebesar 13,59. Hal ini mengindikasikan bahwa data umur dan jenis kelamin hasil Pemutakhiran PK-23 dikategorikan **AKURAT**.

2) *Whipple Index*

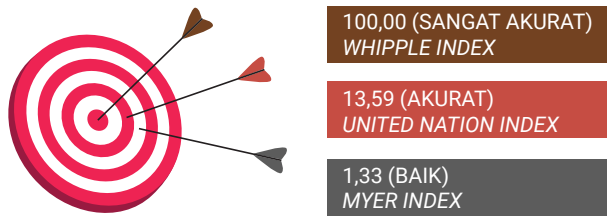
Whipple Index digunakan untuk mengukur kecenderungan keluarga melaporkan umur yang berakhiran 0 atau 5. Index ini dihitung sebagai rasio dari anggota keluarga umur 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan 60 dari satu per lima dari jumlah anggota keluarga umur 23 sampai dengan 62 tahun. Umur pada masa kanak-kanak dan umur tua tidak dilibatkan dalam perhitungan index ini, karena kelompok umur tersebut lebih banyak kesalahan yang berhubungan dengan kesalahan pelaporan umur daripada kecenderungan untuk menyebutkan angka tertentu. Dalam menentukan tingkat keakurasian data umur menggunakan *Whipple Index*, ada tiga kriteria, yaitu jika *Whipple Index* < 105 , maka data umur tersebut sangat akurat; jika *Whipple Index* sekitar 105 - 109,9, maka data umur tersebut relatif akurat; jika *Whipple Index* sekitar 110 - 124,9, maka data umur tersebut kurang akurat; jika *Whipple Index* sekitar 125 - 175,9, maka data umur tersebut buruk; dan jika *Whipple Index* ≥ 175 , maka data umur tersebut sangat buruk (BPS, 2010).

Pada Gambar 2.9 menunjukkan bahwa perhitungan *Whipple Index* pada hasil Pemutakhiran PK-23 sebesar 100,00. Hal ini mengindikasikan bahwa data umur hasil Pemutakhiran PK-23 dikategorikan SANGAT AKURAT, artinya tidak ada kecenderungan untuk menyebutkan umur pada angka tertentu.

3) *Myer Index*

Myer Index bertujuan untuk mengukur kecenderungan pelaporan umur berakhiran 0 dan menghindari penyebutan umur yang berakhiran angka 1 sampai dengan 9, sehingga dapat dievaluasi digit mana yang paling diminati (dijadikan preferensi) dan juga digit yang paling dihindari. Nilai *Myer Index* akan berkisar 0 hingga 90. Jika *Myer Index* sama dengan 0 menunjukkan tidak adanya kecenderungan menyebutkan umur berakhiran 0. Sedangkan, jika *Myer Index* lebih kecil dari 10 berarti pelaporan dan pencatatan umur dapat dikatakan baik. Namun, jika *Myer Index* sama dengan 90, maka seluruh umur dilaporkan pada akhiran angka yang sama (BPS, 2010).

Pada Gambar 2.9 menunjukan bahwa perhitungan *Myer Index* pada hasil Pemutakhiran PK-23 sebesar 1,33. Hal ini mengindikasikan bahwa pencatatan dan pelaporan data umur hasil Pemutakhiran PK-23 dikategorikan **BAIK**, artinya tidak ada kecenderungan untuk menyebutkan umur pada angka tertentu.



Gambar 2.10 Hasil Perhitungan United Nation Index, Whipple Index, dan Myer Index

Kesimpulan
Evaluasi kualitas data umur hasil Pemutakhiran PK-23 pada ketiga *index* memberikan hasil yang akurat, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil Pemutakhiran PK-23 terjamin kualitasnya. Hal ini menunjukan bahwa pemanfaatan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 untuk pengambilan kebijakan akan cenderung tepat sasaran dan tepat guna.

2.5 Cakupan Pemutakhiran Pk-23 Dan Basis Data Keluarga Indonesia

A) Cakupan Pemutakhiran PK-23

Cakupan Pemutakhiran PK-23 adalah data keluarga hasil pengumpulan tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2023 dan pengolahan pada periode pemutakhiran sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.

PROVINSI	KAB/KOTA	KECAMATAN	DESA
100%	100%	99,87%	99,37%
Target : 33 Didata : 33	Target : 514 Didata : 514	Target : 3.760 Didata : 3.755	Target : 14.296 Didata : 14.206

**Hasil pemutakhiran PK-23 Tidak Termasuk DKI Jakarta*

Gambar 2.11 Cakupan Pemutakhiran PK-23

Gambar 2.11 menjelaskan cakupan Pemutakhiran PK-23 sebagai berikut :

- Provinsi**, bahwa cakupan laporan di tingkat provinsi mencapai 100%, artinya seluruh provinsi (minus Provinsi DKI Jakarta) telah melakukan Pemutakhiran PK-23.
- Kabupaten/Kota**, bahwa cakupan laporan di tingkat kabupaten/kota sebesar 100%, artinya seluruh kabupaten/kota (minus kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta) telah melakukan Pemutakhiran PK-23.

- 3) **Kecamatan**, bahwa cakupan laporan di tingkat kecamatan sebesar 99,87%, artinya terdapat 3.755 kecamatan telah melakukan pemutakhiran PK-23 dari 3.760 kecamatan yang menjadi target pemutakhiran.
- 4) **Desa/kelurahan**, bahwa cakupan laporan di tingkat desa/kelurahan sebesar 99,37%, artinya terdapat 14.206 desa/kelurahan telah melakukan Pemutakhiran PK-23 dari 14.296 desa/kelurahan yang menjadi target pemutakhiran.

B) Cakupan Basis Data Keluarga Indonesia

Cakupan Basis Data Keluarga Indonesia adalah data keluarga hasil pengumpulan dan pengolahan data hasil Pemutakhiran PK-23 dan ditambahkan dengan data hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 dan Pemutakhiran PK-23 telah masuk ke dalam Data Basis Keluarga Indonesia.

PROVINSI	KAB/KOTA	KECAMATAN	DESA
100%	100%	98,60%	97,48%
Target : 33 Didata : 33	Target : 514 Didata : 514	Target : 7.280 Didata : 7.178	Target : 83.987 Didata : 81.873

**Basis Data Keluarga Indonesia Tidak Termasuk DKI Jakarta*

Gambar 2.12 Cakupan Basis Data Keluarga Indonesia

Gambar 2.12 menjelaskan cakupan Basis Data Keluarga Indonesia sebagai berikut :

- 1) **Provinsi**, bahwa cakupan laporan di tingkat provinsi mencapai 100%, artinya seluruh provinsi (minus Provinsi DKI Jakarta) telah masuk ke dalam Data Basis Keluarga Indonesia.
- 2) **Kabupaten/Kota**, bahwa cakupan laporan di tingkat kabupaten/kota sebesar 100%, artinya seluruh kabupaten/kota (minus kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta) telah telah masuk ke dalam Data Basis Keluarga Indonesia.
- 3) **Kecamatan**, bahwa cakupan laporan di tingkat kecamatan sebesar 98,60%, artinya terdapat 7.178 kecamatan telah masuk ke dalam Data Basis Keluarga Indonesia dari 7.280 kecamatan yang ada.
- 4) **Desa/kelurahan**, bahwa cakupan laporan di tingkat desa/kelurahan sebesar 97,48%, artinya terdapat 81.873 desa/kelurahan telah masuk ke dalam Data Basis Keluarga Indonesia dari 83.987 desa/kelurahan yang ada.



BAB III

Keluarga Menurut Karakteristik Demografi

BAB III. KELUARGA MENURUT KARAKTERISTIK DEMOGRAFI

3.1 Jumlah Keluarga

Demografi merupakan aspek yang sangat penting dalam penentuan suatu kebijakan baik kebijakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KB, maupun kebijakan program pembangunan lain. Gambaran mengenai jumlah, struktur/komposisi dan distribusi kepala keluarga baik menurut jenis kelamin, umur, status kawin, pendidikan, pekerjaan; akan memudahkan pengembangan suatu kebijakan, penyediaan sarana dan prasarana serta pemenuhan kebutuhan kepala keluarga dan anggota keluarganya. Data demografi yang disajikan mencakup karakteristik keluarga yang berkaitan dengan jumlah keluarga, kepala keluarga berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan; dan jumlah jiwa dalam keluarga.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU No.52 Tahun 2009). Data keluarga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam perencanaan pembangunan keluarga. Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2023 mencatat bahwa jumlah keluarga terdata sebanyak 71.784.419 keluarga yang tersebar secara tidak merata di seluruh provinsi di Indonesia. Jika dibandingkan dengan estimasi jumlah keluarga pada tahun 2023, maka cakupan basis data keluarga Indonesia hasil pendataan keluarga dan pemutakhirannya mencakup 80% dari jumlah keluarga yang ada. Dengan demikian, karakteristik keluarga yang dijelaskan dalam buku ini menggambarkan 80% keluarga di Indonesia.

Sebagaimana persebaran penduduk, persebaran keluarga Indonesia masih terfokus di Pulau Jawa.

Fenomena persebaran keluarga menurut wilayah geografis yang tidak merata ini masih menjadi ciri demografis di Indonesia.

Persebaran penduduk menurut wilayah seringkali digunakan untuk mengetahui tingkat kepadatan dan daya dukung terhadap suatu wilayah. Sebagaimana persebaran penduduk, fenomena persebaran keluarga menurut wilayah geografis yang tidak merata masih menjadi ciri demografis Indonesia. Provinsi dengan jumlah keluarga di bawah 350 ribu KK adalah Provinsi Gorontalo (339.372), Sulawesi Barat (322.204), Maluku Utara (256.496), Papua Pegunungan (221.825), Papua (168.747), Papua Barat (162.463), Papua Tengah (160.336), Kalimantan Utara (127.494), dan Papua Selatan (88.164).

JAWA BARAT	13.738.854
JAWA TIMUR	12.143.745
JAWA TENGAH	10.948.576
SUMATERA UTARA	3.484.610
BANTEN	2.961.637

Grafik 3.1 Jumlah Keluarga Tertinggi Menurut Provinsi di Indonesia, 2023

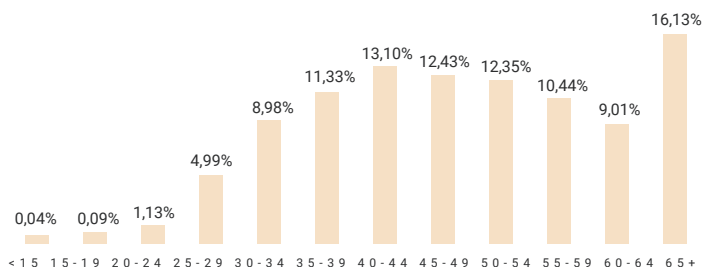
5 Provinsi dengan jumlah kepala keluarga tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat (13.738.854 KK), Jawa Timur (12.143.745 KK), Jawa Tengah (10.948.576 KK), Sumatera Utara (3.484.610 KK), dan Banten (2.961.637 KK).

3.2 Karakteristik Kepala Keluarga

Kepala keluarga adalah laki-laki atau perempuan yang berstatus kawin, atau janda, atau duda, atau tidak kawin, yang mengepalai suatu keluarga yang anggotanya terdiri dari istri/suaminya, anak-anaknya dan atau lainnya.

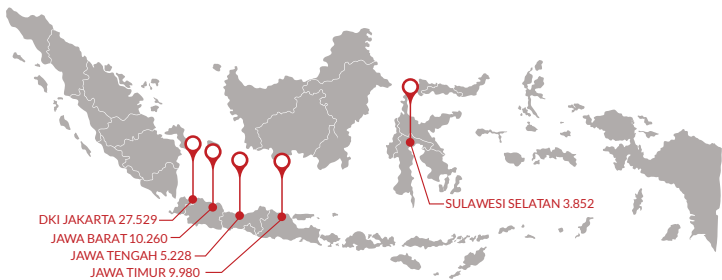
A) Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan kelompok umur, persentase kepala keluarga di Indonesia yang berada pada kelompok umur produktif (15-64 tahun) adalah sebesar 83,83%. Persentase kepala keluarga tertinggi berada pada kelompok usia 65+ tahun yaitu sebesar 16,13%, sedangkan persentase terendah berada pada kelompok usia kurang dari 15 tahun yaitu sebesar 0,04%.



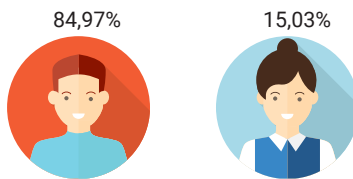
Grafik 3.2 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur, 2023

Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023 ini menunjukkan masih terdapat kepala keluarga baik laki-laki maupun perempuan yang berumur di bawah 19 tahun. Hal ini mengindikasikan masih terjadinya pernikahan dini hampir di seluruh wilayah Provinsi di Indonesia. Berdasarkan grafik 3.2 jika dirinci berdasarkan provinsi, persentase kepala keluarga baik laki-laki maupun perempuan yang berusia di bawah umur tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta (1,20%), Papua Tengah (0,88%), Papua (0,63%), Papua Pegunungan (0,45%), dan Papua Barat (0,45%).



Gambar 3.1 Provinsi dengan Persentase KK di bawah Usia 19 Tahun Berdasarkan Provinsi, 2023

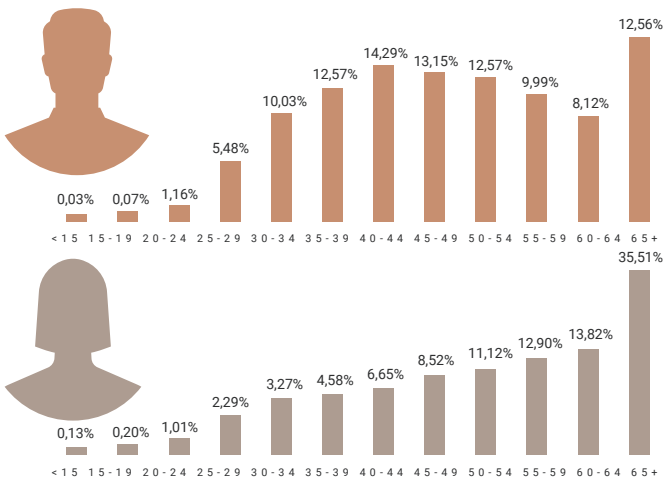
B) Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3.2 Persentase Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin di Indonesia, 2023

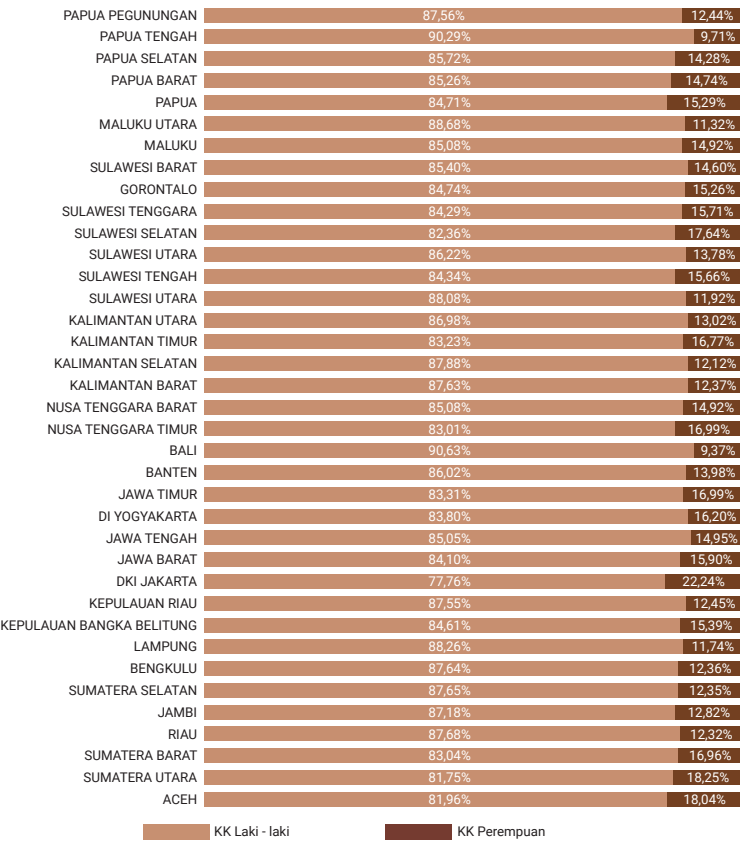
Gambar 3.2 menunjukkan bahwa secara nasional, persentase kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi (84,47%) dibandingkan kepala keluarga berjenis kelamin perempuan (15,53%).

Jika dilihat berdasarkan kelompok umurnya, kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki paling tinggi pada kelompok usia 40-44 tahun yaitu sebesar 14,29%, dan paling rendah pada kelompok usia <15 tahun yaitu sebesar 0,03%. Gambaran ini berbeda dengan kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan, dimana persentase paling tinggi berada pada kelompok usia lebih dari 65 tahun yaitu sebesar 35,51%.



Grafik 3.3 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur di Indonesia, 2023

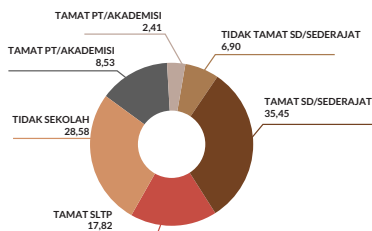
Jika dilihat menurut provinsi seperti yang digambarkan pada grafik 3.4, persentase kepala keluarga di Indonesia berdasarkan jenis kelamin memiliki gambaran yang cukup menarik di mana persentase kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki tertinggi berada di Provinsi Bali yaitu sebesar 90,63% dan persentase terendah berada di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 81,75%. Sebaliknya, persentase kepala keluarga di Indonesia berdasarkan jenis kelamin perempuan tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 22,24% dan persentase terendah berada di Provinsi Bali yaitu sebesar 9,37%.



Grafik 3.4 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Per Provinsi di Indonesia, 2023

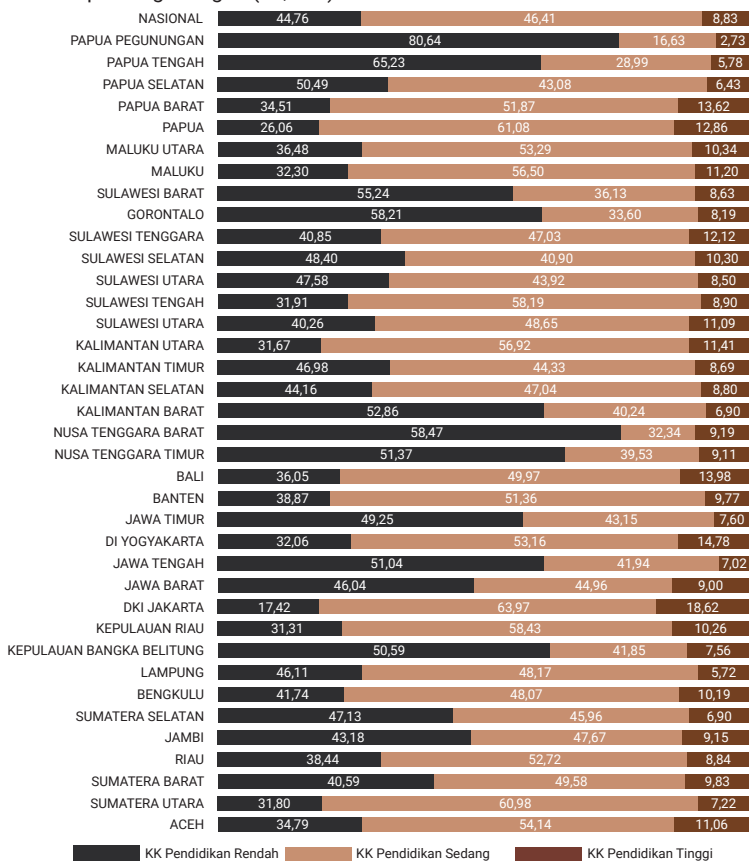
C) Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pendidikan

Keberadaan kepala keluarga dengan pendidikan yang memadai memegang peranan penting dalam pembangunan keluarga. Secara nasional, tingkat pendidikan kepala keluarga di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya persentase kepala keluarga yang hanya menamatkan pendidikan di jenjang Sekolah Dasar yaitu sebesar 35,45%, bahkan terdapat 28,58% kepala keluarga tidak sekolah.



Grafik 3.5 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Indonesia, 2023

Pendidikan dikatakan rendah apabila kepala keluarga hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SD, kepala keluarga dengan tingkat pendidikan sedang jika hanya sampai SMP dan SMA, sedangkan tingkat Pendidikan tinggi jika kepala keluarga menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. Secara nasional, persentase kepala keluarga dengan tingkat pendidikan rendah sebesar 44,76%, pendidikan sedang sebesar 46,41% dan pendidikan tinggi sebesar 8,83%. Provinsi dengan persentase kepala keluarga dengan tingkat pendidikan rendah tertinggi adalah Provinsi Papua Pegunungan (80,64%).



Grafik 3.6 Kepala Keluarga dengan Tingkat Pendidikan, 2023

Buku Profil Keluarga Indonesia Tahun 2023

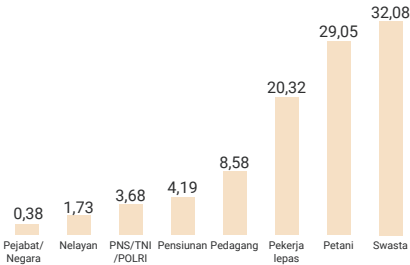
D) Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan dapat menunjukan status sosial ekonomi dan kemandirian karena dengan bekerja maka diperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebesar 90,05 % kepala keluarga yang berusia di atas 10 tahun tercatat memiliki pekerjaan dan hanya 9,95 % kepala keluarga yang tidak bekerja.

Jenis pekerjaan yang paling banyak dijalani kepala keluarga di Indonesia yaitu swasta (32,08%), kemudian petani (29,05%) di urutan kedua.



Gambar 3.3 Persentase Kepala Keluarga Bekerja, 2023



Grafik 3.7 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Indonesia, 2023

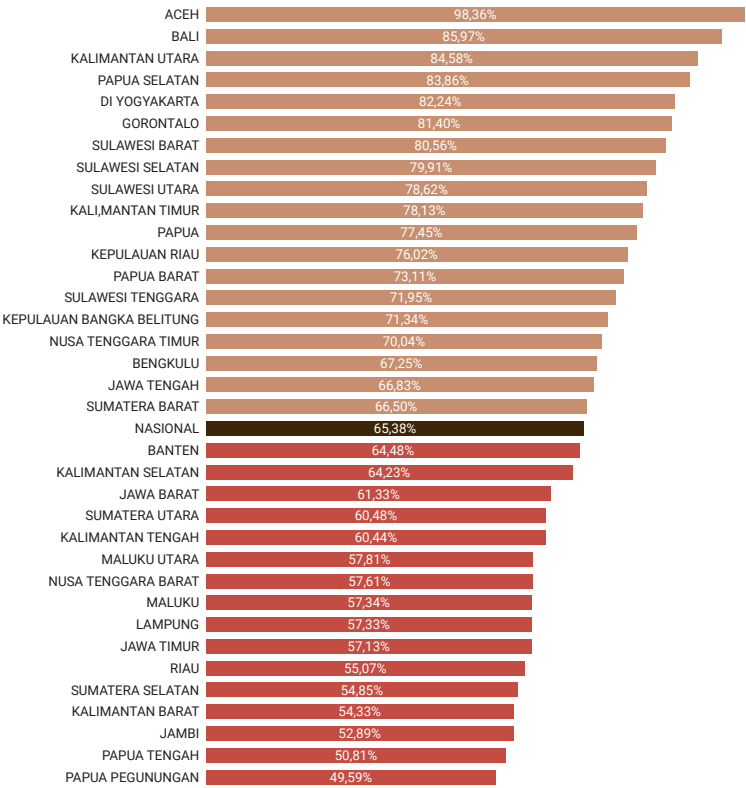
E) Kesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah sistem pelayanan kesehatan berjenjang dengan sistem asuransi yang diberlakukan mulai 1 Januari 2014, dan bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Peserta JKN adalah Peserta Penerima Bantuan luran (PBI) dan Non Penerima Bantuan luran (non PBI) yang dijamin memperoleh pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun pelayanan kesehatan tingkat lanjutan baik rawat jalan maupun rawat inap. Peserta Non JKN merupakan peserta yang memiliki jaminan kesehatan di luar sistem JKN.



Gambar 3.4 Persentase Jiwa dalam Keluarga Berdasarkan Kesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional, 2023

Berdasarkan Gambar 3.4 kesertaan dalam Jaminan Kesehatan, terdapat 67,77% keluarga memiliki jaminan kesehatan sedangkan 32,23% tidak memiliki. Peserta yang memiliki jaminan kesehatan tersebut, sebanyak 96,47% merupakan peserta JKN dan 3,53% merupakan peserta NON JKN. Penduduk yang masih belum mempunyai JKN merupakan sasaran utama pemberian komunikasi, informasi dan edukasi terkait pentingnya ikut serta dan mendukung JKN serta catatan bagi BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara dalam memperbaiki kualitas pelayanan.



Grafik 3.8 Persentase Jaminan Kesehatan terhadap Individu per Provinsi, 2023

Secara nasional pada tahun 2023, persentase tertinggi berdasarkan status kepemilikan JKN per provinsi adalah Provinsi Aceh sebesar 98,36% sedangkan provinsi dengan tingkat keikutsertaan JKN terendah yaitu Provinsi Papua Pegunungan sebesar 49,59%.



BAB IV

Keluarga Menurut Indikator Pelayanan KB

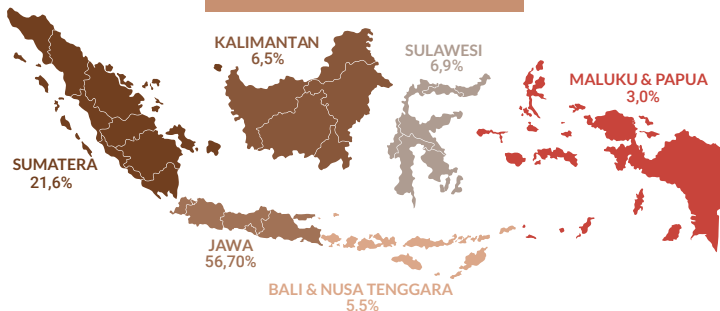
BAB IV. KELUARGA MENURUT INDIKATOR PELAYANAN KB

4.1 Karakteristik Pasangan Usia Subur (PUS)

Hasil pendataan keluarga dan pemutakhirannya menyajikan informasi mengenai indikator Keluarga Berencana. Indikator Keluarga Berencana tersebut menyajikan data Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan karakteristik, status kehamilan, dan kesertaan dalam KB. PUS adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, di mana istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun.

Sebagaimana persebaran penduduk di Indonesia, sebaran PUS menurut wilayah terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sebesar 56,70%.

"Jumlah Pasangan Usia Subur di Indonesia berdasarkan hasil Pendataan Keluarga dan Pemutakhirannya Tahun 2023 sebesar 47.017.047 PUS atau terdapat 65,50 % PUS dari jumlah keluarga terdata di Indonesia"

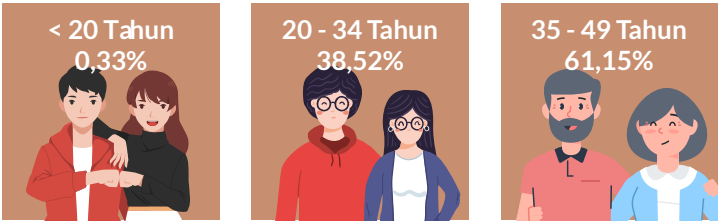


Gambar 4.1 Sebaran PUS menurut Wilayah

PUS Berdasarkan Kategori Umur

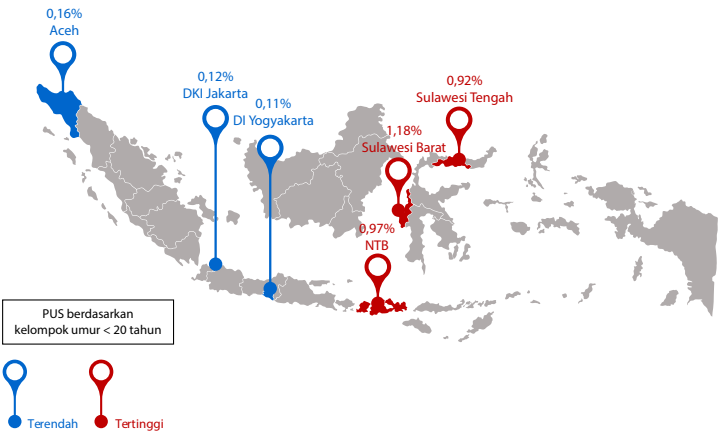
Salah satu strategi dalam Program KB yang bertujuan untuk mengendalikan angka kelahiran adalah program pendewasaan usia perkawinan. Indikator berhasil atau tidaknya program ini dapat dilihat dari tinggi rendahnya persentase PUS yang istrinya berusia di bawah 20 tahun terhadap PUS yang ada.

Jumlah PUS di Indonesia Hasil Pendataan Keluarga dan Pemutakhirannya Tahun 2023 adalah sebesar 38.657.735, dengan distribusi PUS menurut kelompok umur ada pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Persentase PUS Menurut Kelompok Umur, 2023

Sebagian besar PUS di Indonesia berada pada kelompok umur 35 – 49 tahun yaitu sebesar 61,15%, sedangkan jumlah PUS paling sedikit berada pada kelompok umur kurang dari 20 tahun yaitu sebesar 0,33% dari total PUS.

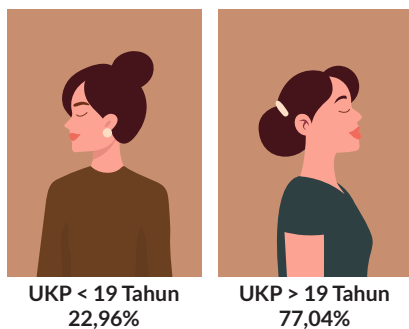


Gambar 4.3 Distribusi PUS Berdasarkan Kelompok Umur < 20 tahun, 2023

Berdasarkan gambar 4.3 persentase tertinggi PUS di bawah usia 20 tahun yaitu Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,18%, diikuti dengan NTB sebesar 0,97 %, dan Sulawesi Tengah sebesar 0,92%. Sedangkan, persentase terendah PUS di bawah usia 20 tahun yaitu Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,11%, diikuti dengan DKI Jakarta sebesar 0,12%, dan Aceh sebesar 0,16 %.

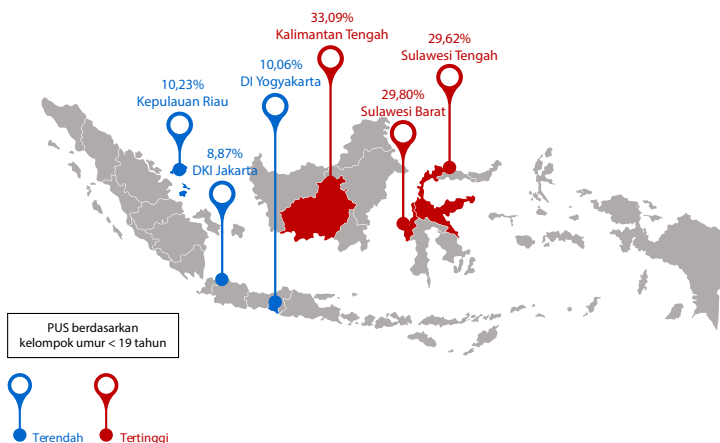
PUS Berdasarkan Usia Kawin Pertama (UKP) Perempuan.

Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. Oleh karena itu, usia perkawinan untuk perempuan sebaiknya dilakukan pada usia 19 tahun ke atas. Hal ini disebabkan pada usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga karena secara rata-rata sudah matang dan bisa berfikir dewasa.



Gambar 4.4 Persentase PUS Berdasarkan UKP Perempuan, 2023

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa masih ada 22,96% PUS yang UKP perempuannya kurang dari 19 tahun. PUS dengan UKP perempuan kurang dari 19 tahun memungkinkan terdapat persoalan psikologis yang harus menjadi perhatian, yakni mengenai psikis dan mental dari pasangan yang menikah, terutama bagi perempuan, karena menikah berkaitan dengan organ reproduksi yang matang untuk siap menjadi orang tua.



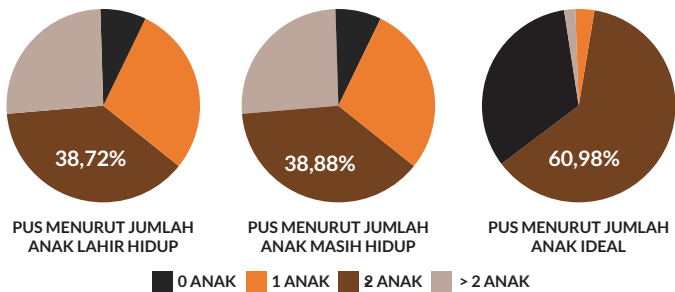
Gambar 4.5 Distribusi PUS dengan UKP Perempuan < 19 tahun, 2023

Berdasarkan Gambar 4.5 persentase tertinggi PUS dengan UKP perempuan kurang dari 19 tahun yaitu Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 33,09%, diikuti dengan Sulawesi Barat sebesar 29,80%, dan Sulawesi Tengah sebesar 29,62%. Sedangkan, persentase terendah PUS dengan UKP perempuan kurang dari 19 tahun yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 8,87%, diikuti dengan DIY sebesar 10,06%, dan Kepri sebesar 10,23%.

PUS Berdasarkan Jumlah Anak Lahir Hidup, Jumlah Anak masih Hidup, dan Jumlah Anak Ideal

Jumlah anak lahir hidup (ALH) adalah jumlah anak yang dilahirkan hidup baik yang saat ini tinggal bersama ataupun tidak tinggal bersama responden,

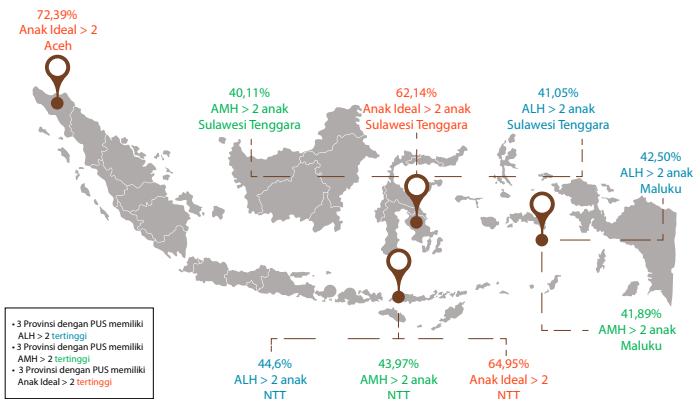
maupun anak yang telah meninggal. Selanjutnya, jumlah anak masih hidup (AMH) adalah jumlah anak yang masih hidup dari total kelahiran hidup, baik yang saat ini tinggal bersama ataupun tidak tinggal bersama responden. Sedangkan, jumlah anak ideal adalah jumlah anak yang diinginkan oleh responden ketika pertama kali menikah.



Grafik 4.1 Persentase PUS Berdasarkan ALH, AMH, dan Anak Ideal, 2023

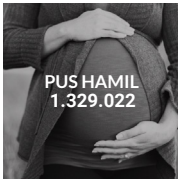
Secara nasional, pada Grafik 4.1 menunjukkan bahwa persentase PUS berdasarkan jumlah ALH, AMH, dan anak ideal tertinggi pada 2 anak, yaitu PUS menurut jumlah ALH sebesar 2 anak adalah 38,72%, PUS menurut jumlah AMH sebesar 2 anak adalah 38,88%, dan PUS menurut jumlah anak ideal sebesar 2 anak adalah 60,98%. Hal ini menandakan cukup tingginya pemahaman PUS akan pentingnya pengendalian jumlah kelahiran. Pengendalian jumlah kelahiran merupakan salah satu tujuan program KB selain untuk menekan angka laju pertumbuhan penduduk namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa persentase PUS dengan jumlah ALH lebih dari 2 anak paling tinggi di Provinsi NTT (44,66%), Maluku (42,50%), dan Sulawesi Tenggara (41,05%). Selanjutnya, persentase PUS dengan jumlah AMH lebih dari 2 anak terjadi tertinggi di Provinsi NTT (43,97%), Maluku (41,89%), dan Sulawesi Tenggara (40,11%). Sedangkan, persentase PUS dengan keinginan jumlah anak ideal lebih dari 2 anak tertinggi di Provinsi Aceh (72,39%), NTT (64,95%), dan Sulawesi Tenggara (62,14%).



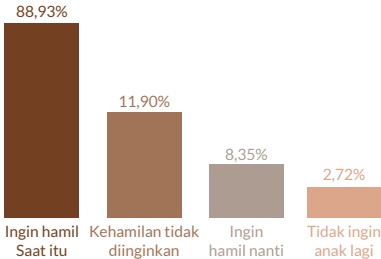
Gambar 4.6 Distribusi Persentase PUS dengan Jumlah ALH, AMH, dan Anak Ideal Lebih Dari 2 Anak Tertinggi, 2023

4.2 Status Kehamilan



PUS hamil adalah wanita kawin berusia 15-49 tahun yang sedang hamil. Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 yang sudah di *weighted* menunjukkan bahwa jumlah PUS hamil terdata pada masa pengumpulan data di bulan 1 Juli – 7 Agustus 2023 sampai adalah sebesar 1.329.022 atau 2,83% PUS hamil dibandingkan jumlah PUS di Indonesia.

Selanjutnya, pada Grafik 4.2 menunjukan dari jumlah PUS hamil yang ada, terdapat 11,90% PUS hamil yang kehamilannya tidak diinginkan, 8,35% PUS hamil karena alasan ingin hamil nanti dan 2,72% karena alasan tidak ingin anak lagi.



Grafik 4.2 Persentasi PUS Hamil Berdasarkan Keinginan Kehamilan

PUS hamil dengan 4 Terlalu merupakan faktor yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan, persalinan berisiko tinggi, dan kematian ibu. PUS hamil dengan 4 Terlalu terdiri dari terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat. Gambar 4.7 menunjukan PUS hamil terlalu muda adalah PUS hamil dengan umur istri <20 tahun sebesar 1,42%, artinya dari 100 PUS hamil terdapat 1-2 PUS hamil terlalu muda. PUS hamil terlalu tua adalah PUS hamil dengan umur istri 35-40 tahun sebesar 21,77%, artinya dari 100 PUS hamil terdapat 21-22 PUS hamil terlalu tua. PUS hamil terlalu banyak adalah PUS hamil jumlah anak lahir hidup sebanyak 3 anak atau lebih, termasuk yang sudah menikah atau meninggal, sebesar 30,79%, artinya dari 100 PUS hamil terdapat 30-31 PUS hamil terlalu banyak. Sedangkan, PUS hamil terlalu dekat adalah PUS hamil punya anak kandung umur 0-59 bulan dan jarak kelahiran dengan anak kandung sebelumnya < 2 tahun, sebesar 0,64%, artinya dari 100 PUS hamil terdapat 1 PUS hamil terlalu dekat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 menunjukan PUS hamil dengan 4 Terlalu yang tertinggi adalah faktor terlalu banyak.



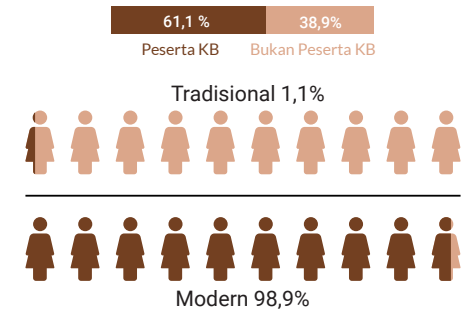
Gambar 4.7 Persentase PUS Hamil 4 Terlalu, 2023

4.3 Kesertaan Ber-KB

Keluarga Berencana selanjutnya disingkat dengan KB, adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. KB merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu melalui: 1) mengatur waktu, jarak dan jumlah kehamilan; 2) mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang perempuan hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin selama kehamilan, persalinan dan nifas; dan 3) mencegah atau memperkecil terjadinya kematian pada seorang perempuan yang mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas.

Jumlah PUS Berdasarkan Kesertaan Ber-KB

Peserta KB adalah PUS yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Gambar 4.8 menunjukkan bahwa dari jumlah PUS di Indonesia terdapat 61,1% PUS peserta KB, sedangkan sisanya 38,9% merupakan PUS bukan peserta KB.

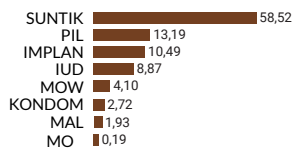


Gambar 4.8 PUS Berdasarkan kesertaan ber-KB di Indonesia, 2023
Data Pemutakhiran PK-23 *weighted*

PUS peserta KB terdiri dari peserta KB modern (menggunakan alat/obat/cara KB berupa Steril Wanita (MOW), Steril Pria (MOP), IUD, Implant/Susuk, Suntik, Pil, Kondom, dan Metode Amenore Laktasi (MAL)) dan tradisional (menggunakan alat/obat/cara KB berupa pantang berkala, sanggama terputus, dan alat/obat/cara KB tradisional lainnya). Gambar 4.8 menunjukkan bahwa dari PUS peserta KB yang ada, didominasi oleh PUS peserta KB modern sebesar 98,9%, sedangkan PUS peserta KB tradisional hanya sebesar 1,1%.

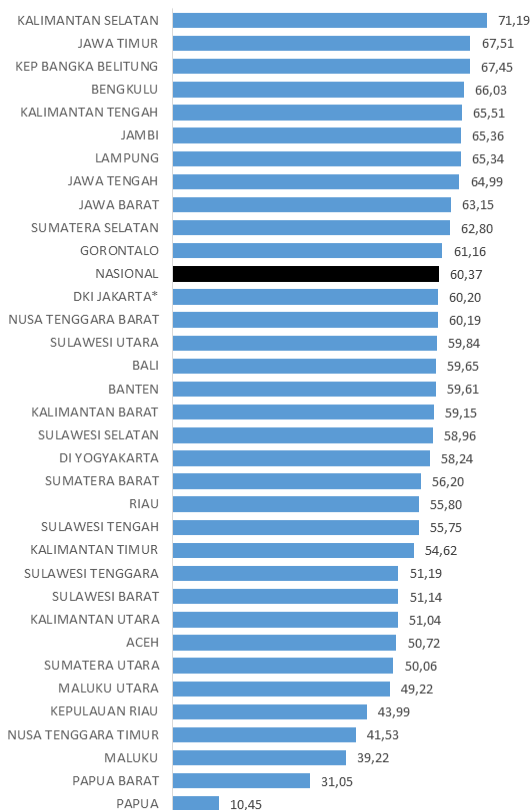
PUS Peserta Kb Modern Berdasarkan Metode Kontrasepsi

Distribusi PUS peserta KB modern menurut metode kontrasepsi dapat dilihat pada Grafik 4.3 Metode kontrasepsi modern yang paling banyak digunakan oleh PUS adalah Suntik sebesar 58,52% dan diikuti Pil sebesar 13,19%.

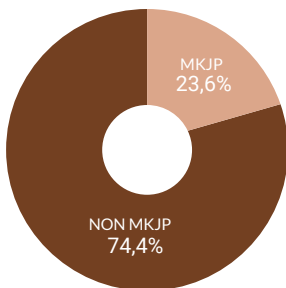


Grafik 4.3 PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Metode Kontrasepsi, 2023
Data Pemutakhiran PK-23 *weighted*

Grafik 4.4 menunjukkan distribusi persentase PUS peserta KB modern berdasarkan provinsi. Dari 38 provinsi terdapat 11 provinsi yang persentase PUS peserta KB modern-nya lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Provinsi dengan persentase PUS peserta KB modern tertinggi adalah Kalimantan Selatan sebesar 71,19%, diikuti Jawa Timur sebesar 67,51% dan Kep Bangka Belitung sebesar 67,45%. Sedangkan, Provinsi dengan persentase PUS peserta KB modern terendah adalah Maluku sebesar 39,22%, diikuti Papua Barat sebesar 31,05%, dan Papua sebesar 10,45%.



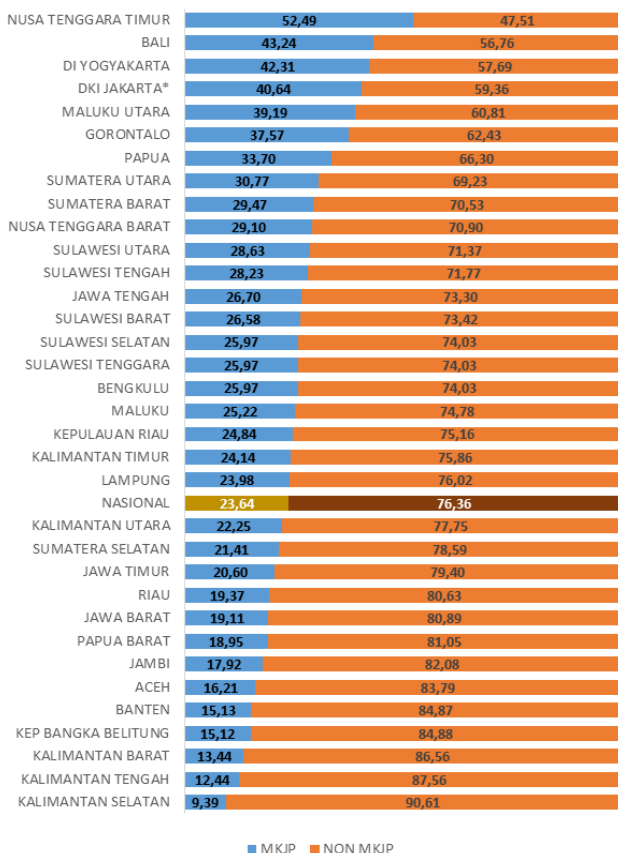
Grafik 4.4 PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Provinsi, 2023
Data Pemutakhiran PK-23 *weighted*



Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama, lebih dari dua tahun, efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari tiga tahun atau mengakhiri kehamilan pada PUS yang sudah tidak ingin menambah anak lagi. Alat/obat/cara KB yang termasuk dalam MKJP yaitu IUD, Implan, MOP, dan MOW. Penggunaan MKJP masih rendah. Hal ini dapat terjadi salah

satunya karena pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang kelebihan MKJP sehingga dari total PUS KB Modern, baru 23,6% PUS yang menggunakan MKJP.

Selanjutnya, Grafik 4.6 menunjukkan bahwa terdapat delapan Provinsi dengan Tingkat penggunaan MKJP lebih dari 30% yaitu Provinsi NTT, Bali, D.I Yogyakarta, Papua, Maluku utara, Gorontalo, DKI Jakarta dan Sumatera Utara.

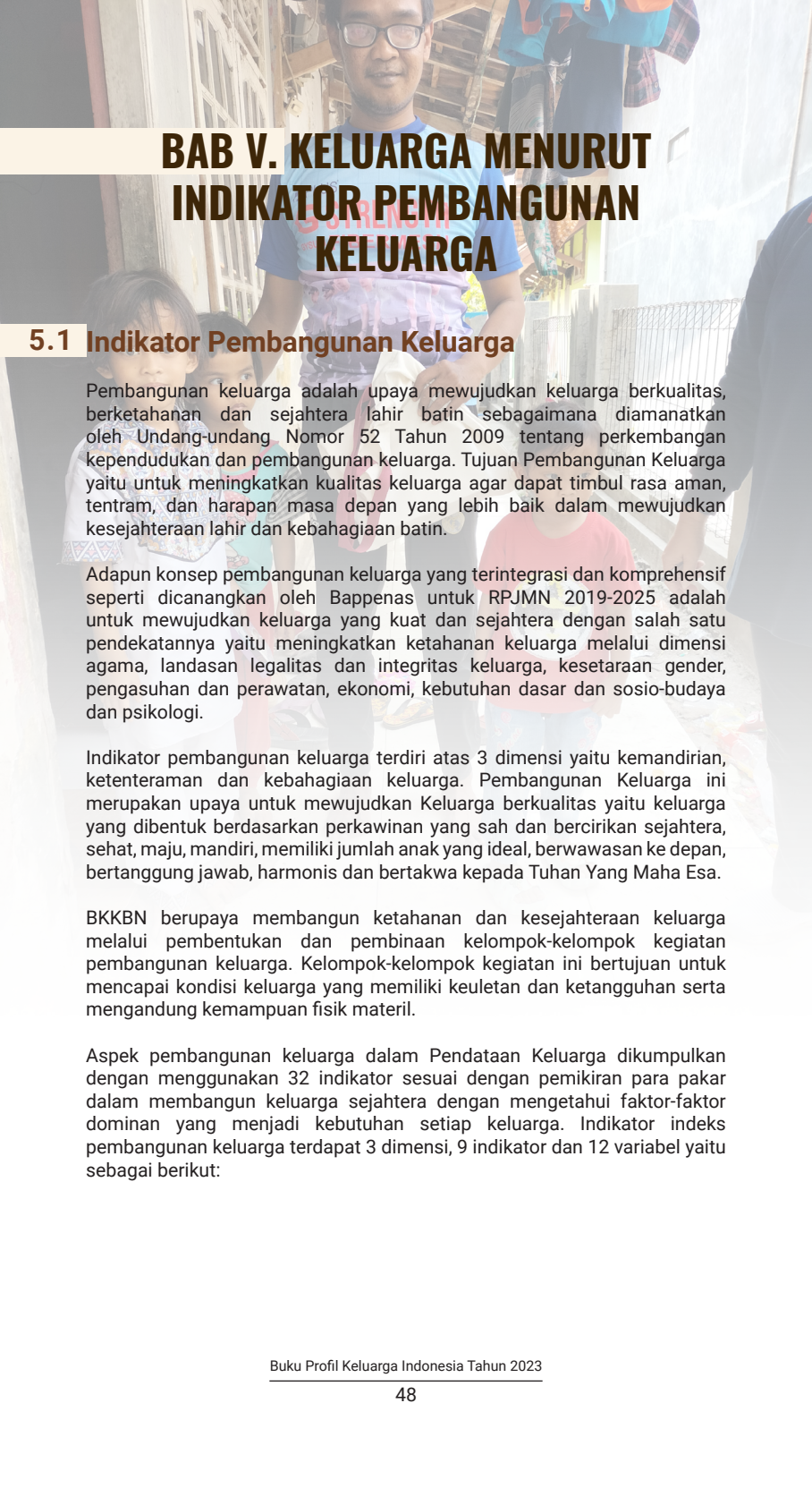


Grafik 4.5 PUS Peserta KB MKJP dan Non MKJP Berdasarkan Provinsi, 2023
Data Pemutakhiran Pk-23 weighted



BAB **V**

Keluarga Menurut Indikator Pembangunan Keluarga

A background image showing a man with glasses and a blue shirt standing in a laundry area with clothes hanging on a line. Two young children are in the foreground, one looking at the camera and the other slightly behind.

BAB V. KELUARGA MENURUT INDIKATOR PEMBANGUNAN KELUARGA

5.1 Indikator Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Tujuan Pembangunan Keluarga yaitu untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Adapun konsep pembangunan keluarga yang terintegrasi dan komprehensif seperti dicanangkan oleh Bappenas untuk RPJMN 2019-2025 adalah untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan sejahtera dengan salah satu pendekatannya yaitu meningkatkan ketahanan keluarga melalui dimensi agama, landasan legalitas dan integritas keluarga, kesetaraan gender, pengasuhan dan perawatan, ekonomi, kebutuhan dasar dan sosio-budaya dan psikologi.

Indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3 dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga. Pembangunan Keluarga ini merupakan upaya untuk mewujudkan Keluarga berkualitas yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BKKBN berupaya membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok kegiatan pembangunan keluarga. Kelompok-kelompok kegiatan ini bertujuan untuk mencapai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil.

Aspek pembangunan keluarga dalam Pendataan Keluarga dikumpulkan dengan menggunakan 32 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Indikator indeks pembangunan keluarga terdapat 3 dimensi, 9 indikator dan 12 variabel yaitu sebagai berikut:

5.1.1 Dimensi Ketentraman

- a. Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut



Indikator ini menunjukkan setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut, yaitu tidak menyimpang dari ajaran agama atau kepercayaan yang dianut. **Contoh** : Sholat 5 waktu (Islam), Ibadah Minggu (Kristen), Misa (Katholik), dll.

70.244.157 atau **97,85%** keluarga terdata di Indonesia menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut dan yang tidak menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut sebesar 2,15%

- b. Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang



Indikator ini menunjukkan keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Penduduk beragama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sedangkan, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam maka dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

52.799.644 atau **94.52%** keluarga yang berstatus kawin di Indonesia memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan tidak memiliki buku/akta nikah sebesar 5,48%.

- c. Setiap anak usia (0 – 17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.



Indikator ini menunjukkan kepemilikan akta lahir anak usia (0-17 tahun) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Akta Lahir merupakan suatu dokumen identitas otentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan.

36.132.349 atau **90,14%** keluarga yang memiliki anak usia (0-17 tahun) di Indonesia setiap anak usia (0 – 17 tahun) dalam keluarga tersebut memiliki akta lahir, sedangkan yang tidak memiliki akta lahir sebesar 9,86%.

- d. Setiap anggota keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta).



Indikator ini menunjukkan kepemilikan kartu jaminan kesehatan bagi setiap anggota keluarga baik itu dari instansi pemerintah seperti BPJS ataupun swasta (asuransi swasta).

43.542.647 atau **60,66%** keluarga terdata di Indonesia memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta) dan yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta) sebesar 39,34%.

- e. Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat konflik keluarga diantaranya
- 1) **tanpa tegur sapa**, adalah kondisi di mana dalam 3 (tiga) hari berturut-turut terdapat anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya tidak melakukan tegur sapa atau komunikasi.
 - 2) **pisah ranjang** antara suami dan istri, adalah kondisi di mana paling sedikit dalam 7 (tujuh) hari (bisa berturut-turut atau beberapa kali) pasangan suami istri tidak tidur dalam satu ranjang yang disebabkan oleh pertengkaran/perselisihan.
 - 3) **pergi dari rumah/mingat**, adalah kondisi di mana 2 (dua) hari berturut-turut terdapat anggota keluarga yang pergi dari rumah tanpa memberikan informasi pada anggota keluarga lain.
 - 4) **kekerasan dalam rumah tangga**, adalah setiap perbuatan terhadap salah satu anggota keluarga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik.



Grafik 5.1 Persentase Konflik Dalam Keluarga, 2023

f. Keluarga mengalami cerai hidup



Indikator ini menunjukkan keluarga mengalami perceraian bukan karena alasan salah satu dari pasangan meninggal. Keputusan cerai hidup antara suami dan istri menandakan bahwa suami dan istri gagal dalam berkomitmen, bekerjasama, berkomunikasi dan tidak ada jalan penyelesaian masalah.

3.637.932 atau 5,07% keluarga terdata di Indonesia, mengalami konflik cerai hidup dan tidak memiliki konflik cerai hidup sebesar 94,93%.

5.1.2 Dimensi Kemandirian

- a. Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga yang memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan.



Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, kemampuan anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan. Sumber penghasilan bukan hanya dari segi bekerja tetapi juga dapat berasal dari sewa rumah, sewa kebun, uang pensiunan dan sebagainya.

Dalam 6 (enam) bulan terakhir 68.617.894 atau 95,59% keluarga terdata di Indonesia memiliki sumber penghasilan perbulan sedangkan yang tidak memiliki sebesar 4,41%.

- b. Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari.



Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, kemampuan keluarga untuk memenuhi setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” menurut kebiasaan keluarga atau masyarakat setempat, seperti makanan pokok (nasi, sagu, singkong, ubi, jagung atau sumber karbohidrat lainnya), lauk pauk sumber protein (ikan, telur, daging, unggas, susu, kacang-kacangan, olahan kedelai/tahu dan tempe) disertai sayur atau buah-buahan paling sedikit 2 (dua) kali sehari selama 6 (enam) bulan terakhir.

Dalam 6 (enam) bulan terakhir **69.692.814** atau **97,09%** keluarga terdata di Indonesia makan “makanan beragam”, sedangkan yang tidak makan “makanan beragam” sebesar 2,91%.

- c. Keluarga tinggal dalam rumah layak huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi paling sedikit enam dari tujuh kriteria berikut:

- 1) Keselamatan bangunan, yaitu keadaan rumah tinggal keluarga memiliki atap, lantai, dinding dalam kondisi yang layak ditempati dari segi perlindungan. Meliputi atap rumah, dinding dan lantai yang layak.
- 2) Kecukupan minimum luas bangunan, yaitu keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas maupun tingkat bawah dibagi dengan jumlah penghuni rumah sehingga masing-masing mendapat ruang minimal 7,2 m².

Kesehatan lingkungan rumah, dilihat dari ketersediaan listrik, jamban dan sumber air minum.



Sebanyak **42.094.974** atau **58,64%** keluarga terdata di Indonesia tinggal dalam rumah layak huni sedangkan yang tidak sebesar 41,36%.

- d. Keluarga memiliki aset



Indikator ini menunjukkan aset yang dimiliki dan bernilai ekonomi, dapat berupa uang maupun wujud benda lain yang bersifat nyata. Aset tersebut berupa: Tabungan (uang kontan/rekening aktif), AC, Televisi layar datar, Lemari es/kulkas, Komputer, Sepeda motor, Mobil, Kapal/perahu motor/perahu, Emas/perhiasan (minimal 10 gram), Hewan ternak, Lahan dan Rumah di tempat lain.

61.020.346 atau **85,01%** keluarga terdata di Indonesia memiliki aset sedangkan yang tidak sebesar 14,99%.

- e. Setiap anggota keluarga yang saat ini berusia sekolah (7 – 18 tahun) tidak ada yang putus sekolah di SD/Sederajat sampai dengan SLTA/ sederajat



Indikator ini menunjukkan anggota keluarga berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun tidak ada yang putus sekolah/tidak pernah sekolah atau masih sekolah untuk menamatkan wajib belajar 12 tahun sampai dengan tingkat SLTA atau sederajat.

28.173.126 atau **76,54%** keluarga yang memiliki anggota keluarga berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun tidak ada yang putus sekolah/tidak pernah sekolah atau masih sekolah untuk menamatkan wajib belajar 12 tahun sampai dengan tingkat SLTA atau sederajat di Indonesia anggota keluarga tersebut tidak ada yang putus sekolah sedangkan yang putus sekolah sebesar 23,46%.

- f. Selama 1 (satu) bulan terakhir, terdapat anggota keluarga yang sakit (empat hari berturut-turut) sehingga meninggalkan aktivitas, atau ada anggota keluarga yang disabilitas**



Indikator ini menunjukkan dalam 1 (satu) bulan terakhir, kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas-batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit atau tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama jangka waktu 4 hari/lebih secara berturut-turut. Dalam 1 (satu) bulan terakhir, **5.588.007** atau **7,78%** keluarga terdata di Indonesia terdapat anggota keluarga sakit (empat hari berturut-turut), sedangkan yang tidak ada sebesar 92,22%.

- g. Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet)**



Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, tersedia kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/milik bersama.

Dalam 6 (enam) bulan terakhir, **58.251.047** atau **81,15%** keluarga terdata di Indonesia terdapat anggota keluarga sakit (empat hari berturut-turut), sedangkan yang tidak ada sebesar 18,85%.

5.1.3 Dimensi Kebahagiaan

- a. Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari**



Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga melakukan komunikasi dan bonding dalam keluarga. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (telepon, medsos). Bonding adalah keterikatan baik fisik dan emosional.

Dalam 6 (enam) bulan terakhir, **61.807.275** atau **95,67%** keluarga yang memiliki anggota keluarga di Indonesia memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari, sedangkan yang tidak memiliki waktu berinteraksi setiap hari sebesar 4,33%.

b. Selama 6 (enam) bulan terakhir pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri



Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga melakukan pengasuhan anak yaitu proses membesarkan, merawat dan mendidik serta melindungi anak yang melibatkan kedua orang tua secara seimbang.

Dalam 6 (enam) bulan terakhir, **43.728.556** atau **94,79%** keluarga yang memiliki anak di Indonesia melakukan pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri, sedangkan yang tidak melakukan pengasuhan anak bersama sebesar 5,21%.

c. Selama 6 (enam) bulan terakhir keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah



Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, keluarga berekreasi bersama-sama oleh seluruh atau sebagian anggota keluarga di luar rumah (tidak identik dengan tempat wisata) yang bertujuan untuk mengukuhkan rasa kasih sayang dan rasa kebersamaan di antara anggota keluarga.

Dalam 6 (enam) bulan terakhir, **44.723.679** atau **69,22%** keluarga yang memiliki anggota keluarga di Indonesia berekreasi bersama di luar rumah, sedangkan yang tidak berekreasi bersama di luar rumah sebesar 30,78%.

d. Selama 6 (enam) bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT



Indikator ini menunjukkan bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir, keikutsertaan keluarga dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, arisan, pengajian, dll di lingkungan RT atau setara RT sampai dengan desa/kelurahan.

Dalam 6 (enam) bulan terakhir, **60.805.548** atau **84,71%** keluarga terdata di Indonesia ikut dalam kegiatan sosial/gotong royong, sedangkan yang tidak ikut dalam kegiatan sosial/gotong royong sebesar 15,29%.

5.2 Indikator Rumah Layak Huni

Rumah dapat dikategorikan sebagai Rumah layak huni jika memenuhi persyaratan kecukupan luas tempat tinggal (keseluruhan luas lantai rumah dibagi dengan jumlah penghuni rumah minimal 7,2 m²), akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak dan ketahanan bangunan. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kondisi atap rumah terluas untuk jenis atap berupa beton, genteng, seng, dan kayu/sirap dengan syarat jenis tersebut dalam kondisi bagus (terawat baik dan rapi).
2. Kondisi dinding rumah terluas adalah tembok, plesteran anyaman bamboo/kawat, kayu/papan/gypsum, dan batang kayu, dengan syarat jenis dinding tersebut dalam kondisi bagus (terawat baik dan rapi).
3. Kondisi lantai rumah terluas adalah marmer/granit, keramik, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/batu merah, dengan syarat jenis lantai tersebut dalam kondisi bagus (terawat baik dan rapi).

4. Ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh seluruh anggota keluarga adalah memiliki jamban sendiri dengan leher angsa dan tangki septik/IPAL dan menggunakan MCK komunal dengan leher angsa dan tangki septik/IPAL.
5. Keselamatan bangunan, adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai, dinding dalam kondisi yang layak ditempati baik dari segi perlindungan.

1. Keluarga Berdasarkan Jenis Atap Rumah Terluas

Indikator ini menunjukkan jenis atap rumah terluas yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari: beton; genteng; asbes/seng; kayu/sirap; bambu; jerami/ijuk/rumbia/daun-daunan; lainnya.

BETON	1.63
GENTENG	60.01
ASBES/SENG	37.19
KAYU/SIRAP	0.39
BAMBU	0.12
JERAMI/ IJUK/ RUMBIA/ DAUN-DAUNAN	0.41
LAINNYA	0.24

Gambar 5.1 Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Atap Rumah



Secara nasional, 60,01% keluarga terdata di Indonesia tinggal di rumah dengan atap rumah berupa genteng. Namun, masih terdapat 0,12% keluarga di Indonesia dengan jenis atap rumah dari bambu.

2. Keluarga Berdasarkan Jenis Dinding Rumah Terluas

Indikator ini menunjukkan jenis dinding rumah terluas yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari: tembok; kayu/papan; bambu; lainnya

TEMBOK	81.09
KAYU/PAPAN	14.84
BAMBU	1.44
LAINNYA	2.62

Gambar 5.2 Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Dinding Rumah



Secara nasional, jenis dinding rumah yang paling banyak digunakan keluarga adalah dinding tembok sebesar 81,09% dari keluarga terdata di Indonesia, dan masih ada keluarga yang menggunakan dinding bambu sebesar 1,44%.

3. Keluarga Berdasarkan Jenis Lantai Rumah Terluas

Indikator ini menunjukkan jenis lantai rumah terluas yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari: keramik/granit/marmer/ubin/tegel; semen; kayu/papan; bambu; tanah; dan lainnya.

KERAMIK/ GRANIT/ MARMER/ UBIN/ TEGEL/ TERASO	65.29
SEMEN	22.41
KAYU/ PAPAN	7.91
BAMBU	0.42
TANAH	3.47
LAINNYA	0.49

Gambar 5.3 Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Lantai Rumah Terluas

 Secara nasional, jenis lantai rumah yang paling banyak digunakan keluarga adalah lantai keramik/granit/marmer/ubin/tegel sebesar 65,29% dari keluarga

4. Keluarga Berdasarkan Sumber Penerangan Utama

Indikator ini menunjukkan keluarga yang memiliki sumber penerangan dari PLN atau nonPLN yaitu: listrik pribadi $\leq$ 900 watt; listrik pribadi $>$ 900 watt; genset/solar cell; listrik bersama; non listrik.

 Secara nasional, 70,67% keluarga terdata di Indonesia sudah menggunakan listrik pribadi $\leq$ 900 watt sebagai sumber penerangan utama. Sementara keluarga yang menggunakan listrik pribadi $>$ 900 watt sebesar 17,11%, genset/solar cell sebesar 0,91%, listrik bersama sebesar 10,41% dan nonlistrik sebesar 0,90%.

5. Keluarga Berdasarkan Bahan Bakar Utama Untuk Memasak

Indikator ini menunjukkan bahan bakar utama yang digunakan oleh anggota keluarga untuk memasak sehari-hari, apakah menggunakan: listrik/gas; minyak tanah; arang/kayu; lainnya.

 Secara nasional, bahan bakar memasak yang paling banyak digunakan keluarga berupa listrik/gas sebesar 88,71% dari keluarga terdata Indonesia, sedangkan yang menggunakan minyak tanah sebesar 2,28%, arang/kayu sebesar 8,11% dan selain dari kriteria di atas sebesar 0,90%.

6. Keluarga Berdasarkan Sumber Air Minum Utama

Indikator ini menunjukkan sumber air minum utama yang digunakan oleh anggota keluarga. Sumber air minum utama layak berasal dari: Air kemasan/isi ulang; ledeng/PAM; sumur bor; sumur terlindung, sedangkan sumber air minum utama tidak layak berasal dari sumur tidak terlindung; air permukaan (sungai, danau, dll); air hujan; lainnya

LAYAK 89,03%	TIDAK LAYAK 10,97%
AIR KEMASAN/ISI ULANG 30,34%	SUMUR TIDAK TERLINDUNG 2,06%
LEDENG/PAM 18,91%	AIR PERMUKAAN (SUNGAI, DANAU, DLL) 1,99%
SUMUR BOR 13,33%	AIR HUJAN 2,04%
SUMUR TERLINDUNG 26,46%	LAINNYA 4,48%

Gambar 5.4 Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Sumber Air Minum Utama

63.908.309 atau **89,03%** keluarga terdata di Indonesia memiliki sumber air minum utama layak. Secara nasional, sumber air minum utama yang paling banyak digunakan keluarga berupa air kemasan/isi ulang sebesar 30,34%.

7. Keluarga Berdasarkan Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar



Indikator ini menunjukkan status kepemilikan fasilitas tempat buang air besar yang digunakan seluruh anggota keluarga. Secara nasional, kepemilikan fasilitas tempat buang air besar yang paling banyak digunakan keluarga yaitu dengan septic tank. **61.321.968** atau **85,43%** keluarga terdata di Indonesia memiliki fasilitas tempat buang air besar dengan septic tank, 11,79% lainnya sedangkan tanpa septic tank sebesar 2,78%.

8. Keluarga Berdasarkan Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal

Indikator ini menunjukkan status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah milik sendiri; kontrak/sewa; bebas sewa; menumpang; dinas; lainnya.

MILIK SENDIRI	80.08
KONTRAK/ SEWA	5.07
BEBAS SEWA / MENUPIANG	13.59
DINAS	0.65
LAINNYA	0.62

Gambar 5.5 Persentase Keluarga Berdasarkan Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal



Secara nasional, status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal yang paling banyak dari keluarga terdata di Indonesia merupakan milik sendiri sebesar 80,08%, kontrak/sewa sebesar 5,08%, bebas sewa/menumpang sebesar 13,59%, dinas sebesar 0,65% dan status kepemilikan rumah/bangunan selain dari kriteria di atas sebesar 0,62%.

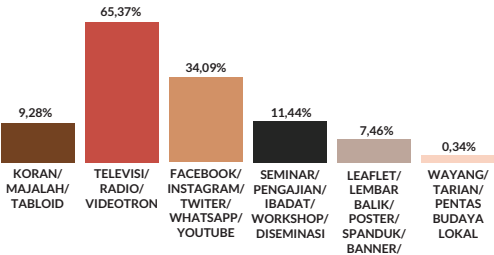
5.3 Keluarga Terpapar Program Bangga Kencana

1. Keluarga memperoleh/mendengar/melihat pesan/informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dari media



Indikator ini menunjukkan keluarga yang memperoleh/mendengar/melihat pesan/informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui media seperti koran /majalah/tabloid; televisi/radio/ videotron; facebook /instagram/ twitter/whatsapp/ youtube/blog/website; seminar/ pengajian/ibadat/ workshop/diseminasi /pertemuan kelompok kegiatan /konseling/ pameran; leaflet/ lembar balik/poster/spanduk /banner/ umbul-umbul/billboard/baliho/mural/ souvenir; wayang/ tarian/pentas budaya lokal.

56.335.896 atau 78,48% keluarga terdata di Indonesia memperoleh/mendengar/melihat pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui media, sedangkan yang tidak memperoleh/mendengar/ melihat pesan/informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui media sebesar 21,52%.



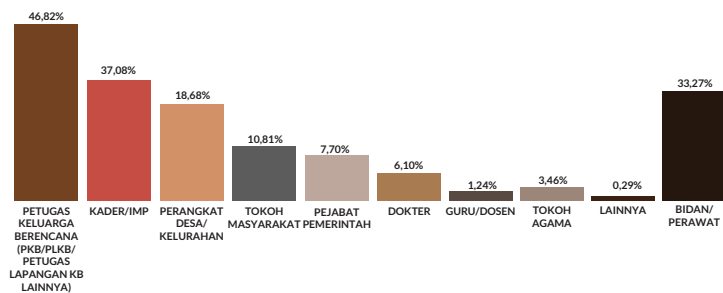
Grafik 5.2 Persentase Keluarga Terpapar Pesan/Informasi Bangga Kencana Melalui Media, 2023

2. Keluarga pernah memperoleh/mendengar/melihat/membaca pesan/informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dari petugas



Indikator ini menunjukkan keluarga yang pernah memperoleh/mendengar/melihat/ membaca pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dari petugas.

57.256.759 atau 79,76% keluarga terdata di Indonesia pernah memperoleh/mendengar /melihat/membaca pesan/informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dari petugas, sedangkan yang tidak memperoleh/mendengar/melihat pesan/informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui media sebesar 20,24%.



Grafik 5.3 Persentase Keluarga terpapar pesan/informasi Bangga Kencana melalui Petugas



BAB
VI
Penutup

BAB VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pemutakhiran Pendataan Keluarga memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh tentang karakteristik keluarga yang ditujukan untuk perencanaan, intervensi, peta sasaran/operasional, evaluasi hingga pengukuran kinerja sasaran strategis program Bangga Kencana di semua tingkatan wilayah serta sebagai gambaran tentang hasil Pemutakhiran PK-23 bagi mitra kerja lainnya.

Pemutakhiran PK-23 merekam data keluarga serta individu dalam keluarga sampai dengan *by name by address* yang tidak dimiliki oleh Kementerian/Lembaga lainnya sehingga secara akuntabilitas data dapat dipertanggungjawabkan dalam hal pemanfaatannya secara luas baik oleh internal maupun eksternal baik untuk kepentingan Program Bangga Kencana maupun program pembangunan lainnya.

Dalam Profil Keluarga Indonesia Tahun 2023 ini menyajikan data karakteristik keluarga berdasarkan indikator demografi, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dengan hasil capaian sebagai berikut :

1. **Demografi**, mencakup karakteristik keluarga yang berkaitan dengan jumlah keluarga, kepala keluarga berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah jiwa dalam keluarga. Berdasarkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023, **jumlah keluarga terdata** adalah 71.784.419 keluarga dengan persebaran tidak merata dan sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Terdapat lima provinsi dengan jumlah keluarga tertinggi yaitu Jawa Barat (13.738.854), Jawa Timur (12.143.745), Jawa Tengah (10.948.567), Sumatera Utara (3.484.610), dan Banten (2.961.637). **Berdasarkan kelompok Umur**, kepala keluarga pada usia produktif (15-64 tahun) sebesar 83,83%, 65+ tahun sebesar 16,13%, dan usia <15 tahun sebesar 0,04%. **Berdasarkan jenis kelamin**, kepala keluarga laki-laki tertinggi pada usia 40-44 tahun (14,29%) dan terendah pada usia <15 tahun (0,03%), sedangkan kepala keluarga berjenis kelamin perempuan tertinggi pada usia 65 tahun ke atas yaitu 35,51%. **Berdasarkan status pendidikan**, persentase kepala keluarga yang hanya tamat SD sebesar 35,45%, bahkan 2,41% kepala keluarga yang tidak sekolah. Pendidikan dikatakan rendah jika hanya menamatkan sampai tingkat sekolah dasar, pendidikan sedang sampai SMP dan SMA, dan pendidikan tinggi sampai perguruan tinggi, hasil Pemutakhira Pendataan keluarga 2023 mencatat kepala keluarga berpendidikan rendah (44,76%), pendidikan sedang (46,41%), dan pendidikan tinggi (8,83%). **Berdasarkan jenis pekerjaan**, kepala keluarga yang memiliki pekerjaan sebesar 90,05% dan tidak bekerja sebesar 9,95%. Dari kepala keluarga yang bekerja, paling tinggi sebagai pegawai swasta (32,08%) dan petani (29,05%). **Berdasarkan kesertaan JKN**, persentase jiwa dalam keluarga yang

memiliki jaminan kesehatan sebanyak 67,77%, dan tidak memiliki jaminan kesehatan sebanyak 32,23%, dan dari peserta yang memiliki jaminan kesehatan tersebut, 96,47% adalah peserta JKN, sedangkan non JKN sebesar 3,53%.

2. **Keluarga Berencana**, meliputi data Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan karakteristik, status kehamilan, dan kesertaan dalam KB. PUS adalah pasangan suami istri dalam perkawinan sah, yang umur istrinya 15-49 tahun. Jumlah PUS di Indonesia sebesar 47.017.047 atau 65,50% PUS dari jumlah keluarga didata dengan sebaran terkonsentrasi di Pulau Jawa sebesar 56,70%. **Berdasarkan PUS kategori umur istri** di bawah 20 tahun sebesar 0,33%, 20-34 tahun sebesar 38,52% dan 35-49 tahun sebesar 61,15%. **PUS berdasarkan Usia Kawin Pertama (UKP) perempuan** sebanyak 22,96% adalah PUS dengan UKP <19 tahun. PUS berdasarkan jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) 2 anak sebesar 38,72%, jumlah Anak Masih Hidup (AMH) 2 anak sebesar 38,88% dan jumlah anak ideal 2 anak sebesar 60,98%. **Status kehamilan**, dari hasil pemutakhiran pendataan keluarga 2023, mencatat PUS hamil (wanita kawin 15-49 tahun) sebanyak 1.329.022 atau 2,83% PUS hamil dari jumlah PUS di Indonesia. Dari jumlah hamil tersebut, 8,35% alasan ingin hamil nanti/kemudian, dan 2,72% alasan tidak ingin anak lagi sedangkan alasan ingin hamil saat itu sebesar 88,93%. Berdasarkan 4T, terlalu muda (PUS hamil <20 tahun) sebesar 1,42%, terlalu tua (PUS hamil >35 tahun) sebesar 21,77%, terlalu banyak (PUS hamil memiliki jumlah anak lahir hidup lebih 2 anak) sebesar 30,79%, dan terlalu dekat (PUS hamil yang jarak kehamilan dengan kelahiran sebelumnya kurang dari 2 tahun) sebesar 0,64%. **Berdasarkan PUS Kesertaan Ber-KB**, terdapat 61,1% PUS adalah peserta KB, dan 38,9% PUS bukan peserta KB. Dari PUS peserta KB tersebut, 98,9% menggunakan **KB modern**, sedangkan 1,1% **KB tradisional**. Untuk PUS KB modern berdasarkan metode kontrasepsi paling tinggi adalah suntik 58,52% dan pil 13,19%. Untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP (IUD, implan, MOW dan MOP) hanya terdapat 23,6% PUS yang memilih MKJP, sisanya lebih memilih non MKJP.
3. **Pembangunan Keluarga**, meliputi **indikator pembangunan keluarga** berdasarkan dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga, **indikator rumah layak huni** yang terdiri dari atap rumah terluas, dinding rumah terluas, alas rumah terluas, sumber penerangan, sumber air minum utama, bahan bakar untuk memasak, memiliki fasilitas tempat buang air besar, luas dan kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal, **indikator keterpaparan Program Bangga Kencana melalui media pendataan keluarga dan pemutakhiran**, dan **indikator keterpaparan Program Bangga Kencana melalui petugas pendataan keluarga dan pemutakhiran**. Pada dimensi ketentraman, terdiri dari 97,85% anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) dalam 6 bulan terakhir menjalankan ibadah rutin sesuai agama dan kepercayaannya, 94,52% keluarga memiliki akta/buku nikah, 90,14% memiliki akta lahir anak

(0-17 tahun), 60,66% anggota keluarga memiliki jaminan kesehatan (pemerintah/swasta), adanya konflik keluarga dalam 6 bulan terakhir yaitu tanpa tegur sapa (1,44%), pisah ranjang (0,78%), minggat (0,71%) dan KDRT (0,43%) dan cerai hidup sebesar 5,07%. Pada **dimensi kemandirian**, dalam 6 bulan terakhir terdapat 1 anggota keluarga yang memiliki penghasilan per bulan sebesar 95,59%; keluarga makan makanan beragam sebesar 97,09%; keluarga tinggal dalam rumah layak huni sebesar 58,64%; keluarga memiliki aset yang bernilai ekonomi, baik berupa uang maupun wujud benda lain yang bersifat nyata sebesar 85,01%; terdapat anggota keluarga usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak ada putus sekolah SD hingga SLTA sederajat sebesar 76,54%; selama 1 bulan terakhir terdapat anggota keluarga yang mengalami sakit selama 4 hari berturut-turut hingga mengganggu aktivitas sebesar 7,78%; dan dalam 6 bulan terakhir terdapat 1 anggota keluarga mengakses informasi dari media online/internet sebesar 81,15%. Pada dimensi kebahagiaan, dalam 6 bulan terakhir terdapat anggota keluarga memiliki waktu untuk interaksi setiap hari sebesar 95,67%; dalam 6 bulan terakhir pengasuhan anak dilakukan bersama suami istri sebesar 94,79%; 6 bulan terakhir pernah berekreasi bersama keluar rumah sebesar 69,22%; 6 bulan terakhir keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial/ gotong royong di lingkungan RT sebesar 84,71%. **Berdasarkan indikator Rumah Layak Huni**, jenis atap rumah terluas sebesar 60,01% adalah genteng; dinding rumah terluas sebesar 81,09% adalah tembok; jenis lantai terluas sebesar 65,29% adalah keramik/granit/marmer/ubin/tegel; sumber penerangan utama sebesar 70,67% keluarga menggunakan listrik pribadi <900 watt; bahan bakar utama untuk memasak sebesar 88,71% adalah menggunakan kompor listrik/gas; sumber air minum utama layak yang berasal dari air kemasan/ isi ulang, ledeng/PAM, sumur bor, sumur terlindungi sebesar 89,03% dengan pemakaian terbesar menggunakan adalah air kemasan/isi ulang dan sumur terlindungi sebesar 30,34% dan 26,46%; keluarga memiliki fasilitas tempat buang air besar sebesar 85,43% memiliki septic tank dan 2,78% tidak memiliki septic tank; serta berdasarkan kepemilikan rumah/ bangunan tempat tinggal yaitu milik sendiri (80,08%), kontrak (5,07%), bebas sewa/menumpang (13,59%), rumah dinas (0,65%) dan lainnya (0,62%). **Berdasarkan keterpaparan Program Bangga Kencana**, sebanyak 78,48% keluarga memperoleh/mendengar/ melihat pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui media, dengan persentase tertinggi sebesar 65,37% melalui televisi/radio/vidiotron. **Sedangkan untuk keterpaparan Program Bangga Kencana dari petugas**, sebanyak 79,76% keluarga memperoleh/ mendengar/ melihat/ membaca pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dari petugas, dengan persentase tertinggi sebesar 46,82% melalui petugas keluarga berencana (PKB/PLKB/Petugas Lapangan KB lainnya)

6.2 Rekomendasi

Keluarga Indonesia sebagai sasaran program Bangga Kencana harus berbasis data yang tepat, akurat, valid, relevan serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan :

1. Peningkatan kualitas data berkelanjutan sehingga data keluarga dan individu anggota keluarga yang dihasilkan dapat lebih valid dan akurat;
2. Peningkatan kapasitas (pemahaman, pengetahuan dan keterampilan) Sumber Daya Manusia pengelola data di daerah melalui pelatihan dan orientasi khususnya dalam penyiapan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI) di tahun selanjutnya;
3. Peningkatan komitmen penentu kebijakan melalui dukungan anggaran di daerah khususnya dukungan pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga di tahun selanjutnya;
4. Penguatan sarana teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga baik perangkat lunak dan perangkat keras, aplikasi maupun koneksi internet;
5. Peningkatan penyajian dan pemanfaatan data Pemutakhiran PK23 melalui seminar, kajian data, desiminasi serta sarasehan di berbagai tingkatan wilayah.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT KELOMPOK UMUR PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI	KELOMPOK UMUR											
			<15	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 +
1	ACEH	1.289.133	156	667	9.699	55.711	128.713	175.462	184.724	171.233	160.496	124.453	101.057	176.762
2	SUMATERA UTARA	3.484.610	754	2.346	30.298	150.169	308.722	418.734	479.681	428.804	421.187	364.414	324.948	534.553
3	SUMATERA BARAT	1.313.116	196	829	11.562	57.264	106.826	152.837	176.142	169.129	154.998	134.347	119.134	229.352
4	JAWA BARAT	1.502.224	218	870	14.624	76.076	152.400	229.525	206.255	206.255	189.903	147.902	117.045	164.488
5	JAMBI	983.119	75	763	13.068	53.659	96.427	124.241	143.734	129.366	117.889	95.166	80.075	128.256
6	SUMATERA SELATAN	2.211.093	319	1.765	27.092	113.300	217.706	290.192	311.822	281.905	256.630	213.933	155.819	310.612
7	BENGKULU	543.159	41	553	77.728	29.240	55.342	68.708	76.884	69.776	63.326	53.340	46.487	72.232
8	LAMPUNG	2.267.218	314	982	18.143	101.766	199.921	267.737	305.943	292.540	277.019	228.108	204.045	370.700
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	418.237	50	712	8.083	24.800	41.004	54.557	62.084	52.005	45.999	36.902	32.745	59.356
10	KEPULAUAN RIAU	4.686.616	53	343	4.740	24.622	49.192	66.525	79.849	72.877	61.005	40.611	28.339	40.463
11	DKI JAKARTA	2.286.822	17.944	9.585	31.263	105.649	188.004	266.070	308.698	303.999	301.125	253.434	204.069	316.982
12	JAWA BARAT	13.728.854	1.895	8.365	15.758	76.513	1.316.962	1.554.962	1.811.673	1.712.223	1.662.566	1.394.609	1.199.574	2.135.232
13	JAWA TENGAH	10.948.576	902	4.326	80.620	479.792	917.418	1.149.183	1.355.619	1.288.315	1.303.928	1.207.529	1.094.578	2.066.366
14	DIYAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1.123.654	97	1.329	11.152	44.578	77.815	97.752	124.483	124.370	134.566	128.820	118.555	260.117
15	JAWA TIMUR	12.143.745	1.797	8.183	11.316	52.371	913.815	1.191.381	1.426.528	1.423.052	1.542.371	1.375.663	1.240.533	2.383.543
16	BANTEN	2.961.637	406	1.621	27.123	159.219	320.466	393.761	431.446	395.058	380.108	297.700	233.947	321.482
17	BAU	1.099.369	174	591	9.982	50.093	90.128	107.862	133.616	143.684	157.587	133.440	95.263	186.949
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.592.247	325	3.058	34.664	101.243	167.613	205.484	215.962	200.032	184.917	141.690	119.718	217.541
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.127.412	387	1.052	15.962	59.725	101.875	134.696	145.853	135.047	131.658	115.681	98.184	187.292
20	KALIMANTAN BARAT	1.171.765	254	1.100	17.309	63.669	117.515	150.982	169.182	152.456	139.774	110.564	93.267	153.893
21	KALIMANTAN TENGAH	602.503	134	919	11.418	37.124	65.537	77.374	89.919	81.479	74.748	56.062	44.117	66.072
22	KALIMANTAN SELATAN	1.108.163	139	1.216	16.626	60.565	105.912	130.554	149.886	148.405	142.651	116.624	94.941	140.934
23	KALIMANTAN TIMUR	857.269	184	738	11.729	47.962	85.746	109.458	126.371	117.543	109.663	88.633	67.967	91.275
24	KALIMANTAN UTARA	134.401	22	113	1.980	7.371	13.221	17.055	20.835	19.100	17.657	13.024	9.739	14.274
25	SULAWESI UTARA	668.895	156	792	10.467	33.328	53.278	61.323	75.766	83.826	85.851	75.953	60.970	125.250
26	SULAWESI TENGAH	771.795	172	1.424	18.404	49.309	74.880	89.162	104.856	97.518	95.217	75.952	60.880	104.553
27	SULAWESI SELATAN	2.246.956	548	3.304	38.116	118.122	192.564	245.719	279.422	277.694	291.006	229.952	195.392	374.567
28	SULAWESI TENGGARA	642.767	223	864	11.843	38.647	65.038	83.521	87.627	79.398	73.539	60.286	48.729	86.810
29	GORONTALO	339.372	62	612	8.524	26.389	37.240	36.343	43.020	43.538	41.564	32.710	26.649	42.621
30	SULAWESI BARAT	322.204	78	688	8.178	22.918	33.429	40.161	42.972	40.492	40.666	28.827	22.553	41.248
31	MALUKU	357.477	165	464	5.656	19.415	33.130	45.422	49.502	44.685	41.067	34.156	29.873	53.942
32	MALUKU UTARA	256.496	93	710	6.439	17.163	26.914	34.979	37.308	33.379	29.783	22.278	18.393	29.057
33	PAPUA	166.747	222	841	4.099	11.163	18.086	22.661	23.507	20.754	18.800	16.133	13.483	18.998
34	PAPUA BARAT	162.463	221	505	3.543	10.933	17.587	22.846	23.526	20.491	18.559	14.685	11.800	17.767
35	PAPUA SELATAN	88.164	84	185	1.832	5.279	9.395	12.358	13.596	11.046	10.013	7.876	6.577	9.923
36	PAPUA TENGAH	160.336	541	873	4.579	12.909	21.384	21.738	25.869	20.164	19.784	12.807	9.625	10.063
37	PAPUA PEGUNINGAN	221.825	295	712	6.797	16.304	23.599	26.785	35.881	30.986	30.838	20.094	15.879	13.962
Jumlah Total		71.784.419	29.686	64.000	814.093	3.578.796	6.443.119	8.130.634	9.403.308	8.322.032	8.662.546	7.493.068	6.465.649	11.577.488

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 2 JUMLAH KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI MENURUT KELOMPOK UMUR
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI	KELOMPOK UMUR											
			< 15	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65+
1	ACEH	1.056.617	79	399	7.946	51.379	121.389	163.249	167.819	148.619	132.404	93.819	70.081	99.458
2	SUMATERA UTARA	2.848.609	394	1.420	25.404	138.268	290.111	389.859	438.566	378.019	352.346	280.687	230.414	333.139
3	SUMATERA BARAT	1.090.430	114	539	10.165	53.669	101.522	144.006	162.684	150.806	131.593	106.084	88.260	140.988
4	RIAU	1.317.185	117	543	12.708	71.486	145.492	192.929	215.414	186.647	166.647	121.805	90.186	111.538
5	JAWAB	857.109	43	550	11.781	50.907	92.519	118.567	135.231	118.307	103.253	77.731	61.823	86.397
6	SUMATERA SELATAN	1.938.052	166	1.284	24.197	106.920	208.205	275.744	292.990	257.997	227.012	177.866	147.241	218.430
7	BENGKULU	476.030	19	426	6.920	27.501	52.910	65.465	72.307	63.502	55.955	44.576	37.010	49.439
8	LAMPUNG	2.001.146	167	632	16.590	97.437	193.127	257.636	290.990	271.163	248.730	193.143	164.631	266.900
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	353.877	30	530	7.032	22.917	38.652	51.020	57.221	45.082	39.427	29.510	24.206	36.784
10	KEPULAUAN RIAU	410.775	31	222	3.876	46.534	62.398	53.313	33.725	65.548	53.313	33.725	21.999	27.195
11	DKI JAKARTA	1.718.133	9.139	4.821	20.620	89.692	168.391	219.951	268.428	254.452	239.359	186.339	135.988	181.343
12	JAWA BARAT	11.554.461	985	5.321	135.530	708.502	1.237.541	1.449.091	1.655.075	1.516.073	1.444.845	1.121.190	899.575	1.380.733
13	JAWA TENGAH	9.312.082	511	2.792	70.998	451.877	874.151	1.087.749	1.261.313	1.164.999	1.135.239	997.022	859.478	1.406.053
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	941.656	45	255	8.737	42.006	74.596	92.938	116.425	113.215	117.871	107.206	93.699	174.267
15	JAWA TIMUR	10.117.479	941	5.261	98.732	490.294	864.809	1.117.710	1.314.237	1.271.047	1.327.089	1.113.363	949.188	1.564.808
16	BANTEN	2.547.531	209	1.008	22.808	147.663	302.830	369.342	396.537	325.037	237.912	176.474	126.732	142.169
17	BALI	996.402	97	449	9.403	48.888	88.298	104.921	128.273	135.433	145.826	110.362	82.283	142.169
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.321.786	166	2.415	31.577	95.220	158.150	190.295	194.111	173.059	152.660	107.180	84.559	132.394
19	NUSA TENGGARA TIMUR	959.197	195	685	13.911	54.753	95.253	125.898	134.381	170.685	113.624	94.187	76.046	129.579
20	KALIMANTAN BARAT	1.026.771	141	778	15.182	60.733	110.618	141.890	157.433	130.010	123.424	92.717	73.864	110.981
21	KALIMANTAN TENGAH	529.491	80	669	10.081	34.353	59.921	73.136	84.273	74.407	65.615	46.604	34.591	45.761
22	KALIMANTAN SELATAN	922.294	78	798	14.113	55.236	98.228	120.286	136.293	130.186	119.417	90.561	69.253	87.845
23	KALIMANTAN UTARA	745.613	101	479	9.916	43.893	80.515	102.290	116.648	105.390	94.919	72.597	52.988	65.877
24	SULAWESI UTARA	118.386	11	90	1.655	6.736	12.325	15.888	19.248	17.356	15.590	10.996	7.875	10.616
25	SULAWESI UTARA	564.158	79	552	9.181	32.496	49.465	56.913	69.691	75.542	75.117	63.443	47.944	83.735
26	SULAWESI TENGAH	665.438	97	1.109	16.559	45.905	70.701	83.574	97.407	88.128	82.886	61.760	46.528	70.604
27	SULAWESI SELATAN	1.850.496	298	2.408	33.563	108.889	180.265	227.531	255.301	244.842	245.714	178.071	140.834	232.780
28	SULAWESI TENGGARA	541.767	145	647	10.433	35.512	60.589	77.644	80.377	70.341	67.926	47.382	35.729	55.042
29	GORONTALO	287.598	29	455	7.729	24.608	35.007	34.010	39.337	38.573	35.563	25.992	19.716	26.579
30	SULAWESI BARAT	275.160	35	543	7.427	21.498	31.572	37.649	39.692	34.668	22.733	16.599	12.599	36.240
31	MALUKU	304.151	80	282	4.908	17.936	31.051	42.422	45.747	40.038	35.303	27.483	22.659	36.240
32	MALUKU UTARA	227.461	44	609	5.862	16.000	25.454	33.142	34.913	30.563	26.004	18.695	14.673	21.102
33	PAPUA	142.952	128	497	2.998	9.244	15.899	20.404	21.069	18.450	16.348	13.336	10.786	13.793
34	PAPUA BARAT	138.508	131	316	2.864	9.519	15.722	20.493	21.125	18.050	16.011	12.040	9.334	12.903
35	PAPUA SELATAN	75.576	39	106	1.422	4.563	8.356	11.168	12.260	9.784	8.738	6.517	5.241	7.382
36	PAPUA TENGAH	144.769	481	765	3.954	11.507	19.436	19.711	23.647	18.504	18.006	11.480	8.507	8.771
37	PAPUA PEGUNINGAN	194.235	177	456	4.756	12.609	19.242	31.138	32.076	27.970	27.981	18.392	14.686	12.758
JUMLAH TOTAL		60.632.877	15.619	41.611	701.438	3.323.294	6.078.646	7.620.427	8.661.747	7.971.633	7.622.054	6.054.502	4.924.554	7.617.452

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 3 JUMLAH KEPALA KELUARGA PEREMPUAN MENURUT KELOMPOK UMUR
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH KEPALA KELUARGA PEREMPUAN	KELOMPOK UMUR											
			< 15	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65+
1	ACEH	232.516	81	268	1.753	4.336	7.324	12.217	16.909	22.618	28.029	30.638	30.976	77.504
2	SUMATERA UTARA	626.005	360	926	4.894	11.901	18.611	28.881	41.115	50.795	68.847	83.732	90.594	231.418
3	SUMATERA BARAT	222.686	82	290	1.397	3.595	5.304	8.831	13.458	18.323	23.405	26.365	31.374	88.564
4	RIAU	185.039	101	317	1.916	4.590	9.851	14.111	17.933	23.256	26.097	26.859	52.590	73.459
5	JAMBI	126.010	32	213	1.287	2.752	3.908	5.674	8.503	11.059	14.636	17.435	41.859	61.952
6	SUMATERA SELATAN	273.041	153	481	2.893	6.380	9.501	14.448	18.832	23.908	29.618	36.067	38.578	92.182
7	BEKOTU	67.429	22	127	808	1.739	2.942	3.243	4.577	5.774	7.371	9.477	22.795	27.995
8	LAMPUNG	266.072	147	350	1.553	4.329	6.794	10.101	14.953	21.377	28.289	34.965	39.414	103.800
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	64.560	20	182	1.051	1.883	2.392	3.437	4.863	5.467	6.572	7.392	8.539	22.572
10	KEPULAUAN RIAU	58.341	22	121	864	1.940	2.658	3.487	4.628	7.795	7.692	6.884	6.340	11.268
11	DKI JAKARTA	508.689	8.805	4.764	10.643	15.957	19.613	26.119	40.270	49.547	61.766	67.093	68.471	135.659
12	JAWA BARAT	2.184.393	910	3.044	22.068	57.111	79.421	156.598	196.150	245.305	276.419	289.999	754.498	1.389.933
13	JAWA TENGAH	1.636.494	391	1.534	9.722	27.915	43.267	61.434	94.306	123.316	168.689	210.507	235.100	660.313
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	181.978	52	574	2.415	2.572	3.219	4.914	8.058	11.155	16.695	21.614	24.860	85.850
15	JAWA TIMUR	2.026.206	856	2.922	14.430	33.423	49.006	73.671	112.291	152.009	215.282	262.300	291.345	818.735
16	BANTEN	414.106	197	613	4.315	11.556	17.636	24.419	34.909	44.079	55.071	59.088	57.473	104.750
17	BAU	102.567	77	142	579	1.205	1.830	2.941	5.348	8.251	11.761	13.078	12.980	44.780
18	NUSA TENGGARA BARAT	270.451	159	643	3.087	6.023	9.463	15.189	21.851	26.973	32.257	34.510	35.159	85.147
19	NUSA TENGGARA TIMUR	168.215	192	367	2.051	4.972	6.622	8.798	11.472	14.362	18.034	21.494	22.138	57.713
20	KALIMANTAN BARAT	144.594	113	322	2.127	4.936	6.897	9.092	11.749	13.446	16.356	17.647	19.403	42.912
21	KALIMANTAN TENGAH	73.012	54	250	1.337	2.771	3.616	4.238	5.646	7.072	8.733	9.458	9.526	20.311
22	KALIMANTAN SELATAN	185.689	61	418	2.513	5.329	7.654	9.968	13.593	18.219	23.244	26.063	25.688	53.089
23	KALIMANTAN TIMUR	111.656	83	259	1.813	4.069	5.231	7.168	9.723	12.153	14.744	16.036	14.979	25.398
24	KALIMANTAN UTARA	16.015	11	23	325	635	896	1.177	1.587	1.744	2.067	2.028	1.864	3.658
25	SULAWESI UTARA	104.737	77	240	1.286	2.832	3.748	4.410	6.075	8.284	10.734	12.510	13.026	41.515
26	SULAWESI TENGAH	106.357	75	315	1.846	3.404	4.129	5.608	7.449	9.390	12.331	13.860	14.152	33.908
27	SULAWESI SELATAN	396.460	250	896	4.553	9.323	12.699	17.648	24.121	32.852	46.892	51.881	54.558	141.787
28	SULAWESI TENGGARA	101.000	78	217	1.410	3.135	4.449	5.877	7.250	9.057	11.913	12.846	13.003	31.768
29	GORONTALO	51.774	33	157	795	1.681	2.233	2.533	3.683	4.965	6.001	6.718	6.933	16.402
30	SULAWESI BARAT	47.044	43	145	751	1.420	1.857	2.512	3.280	4.288	5.792	6.094	5.954	14.908
31	MALUKU	53.326	84	182	748	1.479	2.079	3.000	3.755	4.647	5.764	6.673	7.214	17.701
32	MALUKU UTARA	29.035	49	101	577	1.163	1.460	1.837	2.395	2.816	3.379	3.583	3.720	7.955
33	PAPUA	25.795	94	344	1.101	1.919	2.187	2.257	2.438	2.304	2.452	2.797	2.697	5.205
34	PAPUA BARAT	23.955	90	189	679	1.414	1.865	2.353	2.401	2.441	2.548	2.645	2.466	4.864
35	PAPUA SELATAN	12.588	45	79	410	716	1.039	1.190	1.336	1.262	1.275	1.359	1.336	2.541
36	PAPUA TENGAH	15.567	60	108	625	1.402	1.948	2.207	2.222	1.660	1.778	1.372	1.118	1.922
37	PAPUA PEGUNUNGAN	27.590	108	256	2.034	3.695	4.157	3.647	3.811	2.976	2.857	1.702	1.193	1.204
Jumlah Total		11.151.542	14.067	22.389	112.653	255.502	364.273	510.567	741.561	950.399	1.240.492	1.438.560	1.541.093	3.960.028

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 4 JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH KEPALA KELUARGA	TIDAK SEKOLAH	TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT	TAMAT SD/SEDERAJAT	TAMAT SMP/SEDERAJAT	TAMAT SMA/SEDERAJAT	TAMAT PT/AKADEMI						
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH						
1	ACEH	1.289.133	11.707	0,91	65.738	5,1	371.040	28,78	252.538	19,59	445.453	34,55	142.597	11,06
2	SUMATERA UTARA	3.484.610	54.935	1,58	166.113	4,77	887.213	25,46	738.508	21,19	1.386.346	39,78	251.495	7,22
3	SUMATERA BARAT	1.313.116	16.470	1,25	139.888	10,65	376.623	28,68	250.939	19,11	400.058	30,47	129.138	9,83
4	JAWA	1.502.224	26.121	1,74	85.634	5,7	465.737	31	287.428	19,13	504.492	33,58	132.812	8,94
5	JAWAB	983.119	11.520	1,17	72.447	7,37	340.553	34,64	189.926	19,32	278.733	28,35	89.940	9,15
6	SUMATERA SELATAN	2.211.093	27.399	1,24	166.803	7,54	847.993	38,35	403.313	18,24	612.989	27,72	152.596	6,95
7	BENGKULU	543.159	10.593	1,95	40.680	7,49	175.445	32,3	103.461	19,05	157.641	29,02	55.339	10,19
8	LAMPUNG	2.267.218	22.303	0,98	132.749	5,86	890.313	39,27	519.114	22,9	572.997	25,27	128.742	5,72
9	KEPUJUAN BANGKA BELITUNG	418.237	5.567	1,33	32.933	7,87	173.067	41,38	64.949	15,53	110.097	26,32	31.624	7,56
10	KEPULAUAN RIAU	468.616	22.667	4,84	32.744	6,99	91.307	19,48	59.613	12,72	214.211	45,71	48.074	10,26
11	DKI JAKARTA	2.286.822	20.954	0,92	44.156	1,93	333.167	14,57	349.016	15,26	1.113.800	48,71	425.729	18,62
12	JAWA BARAT	13.738.854	174.064	1,27	543.131	3,95	5.607.610	40,82	2.333.867	16,99	3.843.555	27,98	1.236.627	9
13	JAWA TENGAH	10.948.576	212.324	1,94	770.687	7,04	4.605.352	42,06	2.138.051	19,53	2.453.986	22,41	768.176	7,02
14	DAERAH ISTIMEWA JAWA TIMUR	1.123.634	39.865	3,55	56.464	5,03	263.903	23,49	193.183	17,19	404.186	35,97	166.033	14,78
15	YOGYAKARTA	12.143.745	392.807	3,23	1.092.444	9	4.995.452	37,02	2.172.537	17,89	3.067.658	25,26	922.847	7,6
16	BANTEN	2.961.637	30.964	1,05	120.361	4,06	999.975	33,76	530.096	17,9	990.930	33,46	289.311	9,77
17	BALI	1.099.369	31.672	2,88	62.604	5,69	302.009	27,47	141.342	12,86	408.045	37,12	153.697	13,98
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.592.247	138.137	8,68	198.853	12,49	480.874	30,2	246.905	15,51	382.464	24,02	145.014	9,11
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.127.412	40.775	3,62	168.174	14,92	450.271	39,94	131.748	11,69	232.862	20,65	103.582	9,19
20	KALIMANTAN BARAT	1.171.765	48.163	4,11	135.670	11,58	435.573	37,17	198.090	16,91	273.418	23,33	80.851	6,95
21	KALIMANTAN TENGAH	602.503	7.319	1,21	44.761	7,43	213.976	35,51	120.116	19,94	163.330	27,11	53.001	8,8
22	KALIMANTAN SELATAN	1.108.163	17.131	1,55	91.292	8,24	412.184	37,2	201.835	18,21	289.397	26,12	96.324	8,69
23	KALIMANTAN TIMUR	857.269	12.635	1,47	52.726	6,15	206.163	24,05	146.543	17,09	341.426	39,83	97.776	11,41
24	KALIMANTAN UTARA	134.401	3.813	2,84	13.002	9,67	37.298	27,75	22.795	16,96	42.594	31,69	14.899	11,09
25	SULAWESI UTARA	668.895	3.446	0,52	43.313	6,48	173.387	25,92	142.796	21,35	246.404	36,84	59.549	8,94
26	SULAWESI TENGAH	771.795	14.103	1,83	54.141	7,01	299.003	38,74	133.633	17,31	205.308	26,6	65.607	8,5
27	SULAWESI SELATAN	2.246.956	92.562	4,12	231.381	10,3	772.542	34,38	323.288	14,39	595.702	26,51	231.481	10,3
28	SULAWESI TENGGARA	642.767	19.906	3,1	51.899	8,07	190.795	29,68	105.929	16,48	196.356	30,55	77.885	12,12
29	GORONTALO	339.372	2.518	0,74	56.199	16,56	138.844	40,91	38.954	11,48	75.060	22,12	27.797	8,19
30	SULAWESI BARAT	322.204	14.011	4,35	40.887	12,69	123.101	38,21	46.760	14,51	69.649	21,62	27.796	8,63
31	MALUKU	357.477	4.408	1,23	19.359	5,42	91.709	25,65	59.440	16,63	142.522	39,87	40.039	11,2
32	MALUKU UTARA	256.496	3.027	1,18	20.327	7,92	69.955	27,27	45.316	17,67	91.361	35,62	26.510	10,36
33	PAPUA	168.747	6.889	4,08	11.427	6,77	25.675	15,22	27.422	16,25	75.649	44,83	21.694	12,84
34	PAPUA BARAT	162.463	10.267	6,32	16.604	10,22	29.188	17,97	27.020	16,63	57.249	35,24	22.135	13,62
35	PAPUA SELATAN	88.164	8.399	9,53	12.001	13,61	24.115	27,35	13.591	15,42	24.390	27,66	5.668	6,43
36	PAPUA TENGAH	160.336	55.241	34,45	25.040	15,62	24.308	15,16	18.950	11,82	27.525	17,17	9.272	5,78
37	PAPUA PEGUNGAN	221.825	114.192	51,48	40.192	18,12	24.505	11,05	15.765	7,11	21.123	9,52	6.048	2,73
JUMLAH TOTAL		71.784.419	1.728.865	4,82	4.952.881	8,52	25.460.225	30,21	12.794.777	16,70	20.518.966	30,23	6.338.705	9,52

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

PEMULAKHIRAN

KODE	PROVINS	Jumlah Pegawai		Pegawai		Mantan		Peningkat		Pegawai Negara / Retirasi		Berada		Swasta		Pensiunan		Pegawai		Retirasi		Total Berada		
		Relatif	Relatif	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
1	ACEH	123.830	1.0588	32.26	85.23	2.46	158.10	6.22	12.52	3.92	0.28	10.84	2.25	1.10	3.73	15.78	3.25	15.31	12.88	9.25	12.88	9.25		
2	SUMATERA UTARA	3.484.658	1.0588	32.26	85.23	2.46	158.10	6.22	12.52	3.92	0.28	56.12	2.25	22.38	13.9	50.64	4.33	216.74	13.87	92.36	13.87	92.36		
3	SUMATERA BARAT	1.152.193	1.0588	32.26	85.23	1.75	119.82	10.22	6.86	5.09	0.28	46.12	3.37	531.02	38.26	49.210	4.33	115.54	12.48	1.187.366	92.36	1.187.366		
4	JAWA	984.106	468.295	33.61	24.23	1.75	63.47	6.59	3.69	3.69	0.31	60.158	4.36	221.098	23.99	79.605	3.25	94.37	10.24	93.73	61.63	93.73		
5	JAWA BARAT	984.106	468.295	33.61	24.23	1.75	63.47	6.59	3.69	3.69	0.31	60.158	4.36	221.098	23.99	79.605	3.25	94.37	10.24	93.73	61.63	93.73		
6	SUMATERA SELATAN	1.077.750	2.211.001	51.66	14.56	0.69	124.526	5.97	7.515	0.36	0.31	67.688	5.97	41.052	19.97	13.707	2.96	303.388	14.37	2.088.690	94.38	12.353		
7	DIYogyakarta	5.561.355	2.76.388	52.42	5.78	31.552	5.62	6.115	11.592	2.18	0.23	29.397	5.62	111.592	22.18	15.408	2.26	43.388	8.42	53.117	95.35	21.978		
8	DIYogyakarta	2.562.165	1.113.912	52.42	25.386	1.19	117.176	5.46	6.436	2.64	0.64	16.095	2.48	464.204	21.73	58.073	6.28	117.955	31.46	970.220	88.32	131.095		
9	DIYogyakarta	418.230	88.112	22.72	21.338	6.56	77.398	6.56	7.216	2.64	0.64	20.602	4.45	228.802	53.94	14.133	3.13	69.844	16.44	442.937	90.68	44.610		
10	DIYogyakarta	468.808	18.468	4.35	42.997	10.17	27.398	6.56	12.05	2.64	0.64	40.425	4.45	228.802	53.94	14.133	3.13	69.844	16.44	442.937	90.68	44.610		
11	DIYogyakarta	3.268.639	1.389.523	41.86	40.702	0.78	1.075.655	12.05	10.75	2.64	0.64	40.425	4.45	228.802	53.94	14.133	3.13	69.844	16.44	442.937	90.68	44.610		
12	DIYogyakarta	13.722.428	13.722.428	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
13	DIYogyakarta	10.958.410	2.615.074	23.8	120.474	1.18	1.075.655	10.61	41.518	268.48	0.41	268.48	2.25	3.100.110	30.58	489.811	4.308	2.506.864	24.78	2.506.864	92.7	2.506.864		
14	DIYogyakarta	11.153.621	215.692	1.98	1.198	0.12	84.553	8.25	5.999	0.58	0.58	50.731	4.97	329.037	32.76	77.597	7.12	280.388	25.53	1.020.096	90.75	103.552		
15	DIYogyakarta	12.143.497	3.488.812	28.74	125.726	0.78	1.018.458	9.26	35.297	3.42	0.23	306.768	2.28	3.884.040	34.42	486.406	3.64	1.962.496	17.04	1.184.582	91.36	97.884		
16	DIYogyakarta	2.989.537	277.140	9.26	19.852	0.78	214.642	8.26	8.827	3.42	0.23	306.768	2.28	3.884.040	34.42	486.406	3.64	1.962.496	17.04	1.184.582	91.36	97.884		
17	DIYogyakarta	1.854.824	1.854.824	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.152.725	565.575	30.76	29.232	2.88	97.133	6.21	7.073	5.29	0.48	55.105	3.32	133.046	12.78	50.886	4.13	311.140	25.73	1.041.966	96.68	140.004		
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.121.725	1.121.725	68.66	30.855	2.88	22.833	6.21	5.528	5.29	0.48	57.221	4.38	45.833	4.18	315.903	29.11	37.393	3.41	116.776	10.62	1.095.496	93.48	76.261
20	DIYogyakarta	20.474	500.214	46.49	21.479	4.68	45.022	7.26	41.476	7.26	0.38	40.433	4.76	305.422	35.5	37.290	3.64	154.144	14.36	97.387	94.83	31.087		
21	DIYogyakarta	602.474	20.076	35.19	2.88	2.88	26.361	3.40	97.125	7.96	0.393	48.233	4.76	305.422	35.5	37.290	3.64	154.144	14.36	97.387	94.83	31.087		
22	DIYogyakarta	1.081.144	258.653	23.88	23.88	15.6	61.932	7.96	97.125	7.96	0.393	48.233	4.76	305.422	35.5	37.290	3.64	154.144	14.36	97.387	94.83	31.087		
23	DIYogyakarta	853.230	133.412	15.6	13.412	10.00	61.932	7.96	97.125	7.96	0.393	48.233	4.76	305.422	35.5	37.290	3.64	154.144	14.36	97.387	94.83	31.087		
24	DIYogyakarta	134.395	29.772	24.3	12.724	10.00	61.932	7.96	97.125	7.96	0.393	48.233	4.76	305.422	35.5	37.290	3.64	154.144	14.36	97.387	94.83	31.087		
25	DIYogyakarta	668.869	228.412	39.2	34.51	5.89	22.998	3.88	22.998	3.88	2.628	10.609	8.66	42.170	23.48	4.308	3.50	15.858	12.94	122.571	81.16	11.874		
26	DIYogyakarta	771.798	39.152	52.31	39.882	4.26	29.042	3.15	70.12	0.99	0.99	40.233	5.17	102.408	18.34	19.680	2.77	73.049	10.3	709.488	91.59	62.864		
27	DIYogyakarta	2.247.723	50.526	22.46	50.526	4.26	10.743	3.15	10.743	3.15	0.99	40.233	5.17	102.408	18.34	19.680	2.77	73.049	10.3	709.488	91.59	62.864		
28	DIYogyakarta	326.173	326.173	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
29	DIYogyakarta	113.940	113.940	38.15	17.917	6.40	18.402	6.11	4.838	1.33	1.33	16.416	5.44	48.618	16.41	9.850	3.3	68.657	22.99	298.673	88.01	91.48		
30	DIYogyakarta	321.194	150.403	54.86	17.917	6.40	18.402	6.11	4.838	1.33	1.33	16.416	5.44	48.618	16.41	9.850	3.3	68.657	22.99	298.673	88.01	91.48		
31	DIYogyakarta	353.437	158.212	48.18	25.103	7.26	12.540	3.39	7.99	3.99	0.36	19.660	8.17	51.861	21.54	14.458	4.49	38.113	11.55	31.722	90.01	36.315		
32	DIYogyakarta	256.473	113.552	46.83	13.197	5.48	9.270	6.30	8.68	6.30	0.36	19.660	8.17	51.861	21.54	14.458	4.49	38.113	11.55	31.722	90.01	36.315		
33	DIYogyakarta	158.713	46.672	31.44	11.337	7.51	9.270	6.30	8.68	6.30	0.36	19.660	8.17	51.861	21.54	14.458	4.49	38.113	11.55	31.722	90.01	36.315		
34	DIYogyakarta	125.405	168.703	34.01	11.337	7.51	9.270	6.30	8.68	6.30	0.36	19.660	8.17	51.861	21.54	14.458	4.49	38.113	11.55	31.722	90.01	36.315		
35	DIYogyakarta	88.141	42.890	54.31	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470		
36	DIYogyakarta	160.293	91.837	69.28	2.03	2.03	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470		
37	DIYogyakarta	22.105	18.975	69.28	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470		
38	DIYogyakarta	118.830	63.4	53.4	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470		
39	DIYogyakarta	118.830	63.4	53.4	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470		
40	DIYogyakarta	243.800	64.1	26.100	2.07	2.07	1.119	0.48	2.230	3.50	20.013	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43		
41	DIYogyakarta	243.800	64.1	26.100	2.07	2.07	1.119	0.48	2.230	3.50	20.013	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43		
42	DIYogyakarta	243.800	64.1	26.100	2.07	2.07	1.119	0.48	2.230	3.50	20.013	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43		
43	DIYogyakarta	243.800	64.1	26.100	2.07	2.07	1.119	0.48	2.230	3.50	20.013	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43		
44	DIYogyakarta	243.800	64.1	26.100	2.07	2.07	1.119	0.48	2.230	3.50	20.013	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43		
45	DIYogyakarta	243.800	64.1	26.100	2.07	2.07	1.119	0.48	2.230	3.50	20.013	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43		
46	DIYogyakarta	243.800	64.1	26.100	2.07	2.07	1.119	0.48	2.230	3.50	20.013	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43		
47	DIYogyakarta	243.800	64.1	26.100	2.07	2.07	1.119	0.48	2.230	3.50	20.013	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43		
48	DIYogyakarta	243.800	64.1	26.100	2.07	2.07	1.119	0.48	2.230	3.50	20.013	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43		
49	DIYogyakarta	243.800	64.1	26.100	2.07	2.07	1.119	0.48	2.230	3.50	20.013	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43		
50	DIYogyakarta	243.800	64.1	26.100	2.07	2.07	1.119	0.48	2.230	3.50	20.013	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43		
51	DIYogyakarta	243.800	64.1	26.100	2.07	2.07	1.119	0.48	2.230	3.50	20.013	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43	27.43		
52	DIYogyakarta	243.800	64.1	26.100	2.07	2.07																		

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 6 JUMLAH INDIVIDU DALAM KELUARGA MENURUT KESERTAAN DALAM JAMINAN KESEHATAN PENDAFTARAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH INDIVIDU DALAM KELUARGA	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN						JUMLAH MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			JUMLAH TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
			IKN		BPJS - PRI/UMKESMAS/ JAMKESDA		BPJS - NON PRI		NON IKN		%	JUMLAH	%	JUMLAH
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%				
1	ACEH	4.647.910	3.837.436	84,7	684.485	14,91	17.594	0,38	4.539.495	98,74	58.415	1,26		
2	SUMATERA UTARA	12.457.399	4.667.932	58,89	2.865.429	36,16	392.766	4,95	7.927.127	63,63	4.530.272	36,37		
3	SUMATERA BARAT	4.734.664	2.050.221	62,99	1.098.449	33,73	105.913	3,25	3.254.583	68,74	1.480.081	31,26		
4	JAWA	5.457.308	1.776.959	54,67	1.228.597	37,8	244.852	4,53	3.229.408	59,56	2.206.900	40,44		
5	JAMBI	3.316.128	917.105	49,87	836.925	45,51	85.132	4,63	1.839.162	55,48	1.476.966	44,54		
6	SUMATERA SELATAN	7.537.729	2.873.773	66,33	1.260.358	29,09	198.390	4,58	4.327.521	57,48	3.205.208	42,52		
7	BENGKULU	1.819.634	755.635	59,01	468.053	36,55	56.846	4,44	1.380.534	70,37	539.100	29,63		
8	LAMPUNG	7.562.146	3.152.866	70,15	1.182.740	26,31	158.971	3,54	4.494.577	59,44	3.067.569	40,56		
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1.347.567	479.652	48,23	481.703	48,43	33.187	3,34	994.542	73,8	353.025	26,2		
10	KEPULAUAN RIAU	1.677.941	568.321	40,69	731.247	52,36	77.439	6,95	1.396.647	83,24	281.294	16,76		
11	DKI JAKARTA	6.864.387	4.771.766	69,6	2.009.186	29,27	77.035	1,13	6.864.387	100	0	0		
12	JAWA BARAT	44.597.748	16.060.948	56,1	11.254.814	39,34	1.311.281	4,58	28.627.038	64,28	15.910.710	35,72		
13	JAWA TENGAH	34.480.731	15.506.196	65,73	7.538.267	31,95	547.693	2,32	23.597.156	68,42	10.888.575	31,58		
14	DERAH TIS TIMEWA	3.384.016	1.879.834	64,6	957.942	32,92	72.395	2,49	2.310.171	86	473.845	14		
15	JAWA UTARA	36.636.562	13.797.940	63,54	7.131.813	32,84	786.342	3,62	21.716.095	59,27	14.920.467	40,73		
16	BANTEN	10.194.881	3.474.019	48,77	3.100.073	44,41	406.601	5,82	6.580.692	68,47	3.214.188	31,53		
17	BALI	3.660.177	2.109.886	65,32	1.036.587	32,09	83.898	2,6	3.230.311	88,26	429.866	11,74		
18	NUSA TENGGARA BARAT	5.115.766	2.261.364	75,22	685.714	22,81	59.301	1,97	3.086.379	58,77	2.109.387	41,23		
19	NUSA TENGGARA TIMUR	4.526.358	2.635.841	82,38	534.581	16,71	29.205	0,91	3.199.627	70,69	1.326.731	29,31		
20	KALIMANTAN BARAT	4.088.781	1.420.554	60,03	800.893	33,85	144.869	6,12	2.366.316	57,87	1.722.465	42,13		
21	KALIMANTAN TENGAH	2.012.674	751.386	59,07	465.152	36,56	55.590	4,37	1.272.128	63,21	740.546	36,79		
22	KALIMANTAN SELATAN	3.556.063	1.454.298	60,28	829.685	34,39	128.475	5,33	2.412.458	67,84	1.143.605	32,16		
23	KALIMANTAN TIMUR	2.998.298	970.926	38,7	1.386.331	55,26	151.620	6,04	2.508.877	83,68	489.421	16,32		
24	KALIMANTAN UTARA	503.112	231.400	52,97	194.133	44,44	11.304	2,59	436.837	86,83	66.275	13,17		
25	SULAWESI UTARA	2.124.153	1.182.884	66,93	514.511	29,11	69.863	3,95	1.767.258	83,2	356.895	16,8		
26	SULAWESI TENGAH	2.659.639	1.407.524	72,28	506.141	25,99	33.751	1,73	1.947.416	73,22	712.223	26,78		
27	SULAWESI SELATAN	7.824.553	4.516.655	70,39	1.785.972	27,85	113.147	1,76	6.416.774	82,01	1.407.779	24,99		
28	SULAWESI TENGGARA	2.362.831	1.315.891	74,13	411.649	23,19	47.597	2,68	1.775.137	75,13	587.694	24,87		
29	GORONTALO	1.123.291	723.580	77,35	200.168	21,4	11.705	1,25	935.453	83,28	187.838	16,72		
30	SULAWESI BARAT	1.210.904	750.849	74,83	234.858	23,41	17.695	1,76	1.003.402	82,88	207.502	17,14		
31	MALUKU	1.386.125	574.411	70,76	220.402	27,15	16.949	2,09	811.762	58,56	574.363	41,44		
32	MALUKU UTARA	930.050	396.136	71,95	141.525	25,71	12.878	2,34	550.539	59,19	379.511	40,81		
33	PAPUA	604.083	375.477	77,38	96.497	19,89	13.240	2,73	485.214	80,32	118.869	19,68		
34	PAPUA BARAT	597.321	370.231	80,28	83.868	18,19	7.047	1,53	461.146	77,2	136.175	22,8		
35	PAPUA SELATAN	326.928	242.017	87,01	33.975	12,22	2.147	0,77	278.139	85,08	48.789	14,92		
36	PAPUA TENGAH	480.852	177.122	69,69	67.222	26,45	9.828	3,87	254.127	52,86	226.680	47,14		
37	PAPUA PEGUNINGAN	550.213	232.524	82,28	40.322	14,27	9.752	3,45	287.598	51,36	267.615	48,64		
JUMLAH TOTAL		235.298.923	100.727.544	65,79	53.102.267	50,68	5.672.265	3,33	159.453.079	71,85	75.845.844	28,15		

Sumber: Pendaftaran Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 7 JUMLAH WANITA KAWIN (10-49 TAHUN) MENURUT KELOMPOK UMUR PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH WANITA KAWIN		KELOMPOK UMUR														
		JUMLAH	%	10 - 14	%	15 - 19	%	20 - 24	%	25 - 29	%	30 - 34	%	35 - 39	%	40 - 44	%	45 - 49
1	ACEH	774.764	37	0	1.209	0,16	34.795	4,49	114.241	14,75	165.017	21,04	175.080	22,6	138.559	20,5	127.530	16,46
2	SUMATERA UTARA	1.811.856	93	0,01	3.010	0,17	67.481	3,72	231.046	12,75	353.376	19,5	404.769	22,34	417.841	22,79	339.240	19,15
3	SUMATERA BARAT	716.462	30	0	1.902	0,37	29.356	4,1	96.736	13,5	134.239	18,74	159.072	22,2	157.617	22,72	137.310	19,18
4	RIAU	934.983	56	0,01	1.806	0,19	37.254	3,98	124.078	13,27	187.360	20,04	210.687	22,5	270.777	22,12	165.978	17,75
5	JAMBI	603.523	43	0,01	2.876	0,48	35.396	5,86	86.787	14,38	116.145	19,24	129.265	21,25	139.293	21,22	104.738	17,35
6	SUMATERA SELATAN	1.301.610	114	0,01	4.914	0,38	66.868	5,14	177.393	13,63	256.213	19,68	289.801	22,26	275.366	21,17	230.741	17,73
7	BENGKULU	323.718	30	0,01	1.522	0,47	17.380	5,37	44.662	13,8	64.893	20,05	68.860	21,27	68.948	21,17	57.403	17,73
8	LAMPUNG	1.302.519	95	0,01	2.202	0,17	56.079	4,31	177.693	13,63	251.644	19,32	282.195	21,67	281.387	21,64	250.340	19,73
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	237.710	20	0,01	1.623	0,68	15.550	6,54	33.222	13,98	45.895	19,31	51.910	21,84	51.006	21,46	38.484	16,19
10	KEPULAUAN RIAU	303.582	16	0,01	572	0,19	9.177	3,02	36.384	11,98	56.564	18,63	68.713	22,63	74.257	24,42	58.088	19,04
11	DIYAKARTA	962.724	222	0,02	896	0,09	25.844	2,68	118.135	12,27	181.378	18,84	209.237	21,73	228.924	24,88	187.599	19,54
12	JAWA BARAT	7.579.746	387	0,01	24.814	0,33	437.351	5,77	1.170.045	15,44	1.461.639	19,28	1.489.857	19,66	1.606.788	21,97	1.389.465	18,33
13	JAWA TENGAH	5.631.208	138	0	9.287	0,16	255.079	4,53	823.464	14,62	1.085.089	19,27	1.149.702	20,42	1.231.700	21,97	1.076.743	19,12
14	DIYAKARTA TIMUR	503.720	8	0	555	0,11	15.894	3,16	65.748	13,05	93.152	18,49	103.722	20,59	117.446	23,52	107.195	21,28
15	JAWA TIMUR	6.003.106	360	0,01	17.453	0,29	299.929	5	848.624	14,14	1.086.747	18,1	1.219.554	20,32	1.331.483	22,18	1.198.956	19,97
16	BANTEN	1.819.921	115	0,01	3.831	0,21	83.359	4,58	269.464	14,81	376.212	20,67	381.086	20,94	385.429	22,18	329.024	17,61
17	BAU	577.036	29	0,01	1.277	0,22	23.783	4,12	77.114	13,46	105.017	18,2	111.267	19,28	128.847	21,33	120.748	20,48
18	NUSA TENGGARA BARAT	916.596	113	0,01	8.739	0,59	75.555	8,24	135.644	14,8	176.062	19,21	191.035	20,84	181.833	19,94	147.519	16,37
19	NUSA TENGGARA TIMUR	617.248	68	0,01	1.981	0,32	32.714	5,3	83.402	13,51	116.958	18,95	135.940	22,02	132.848	21,92	113.413	18,31
20	KALIMANTAN BARAT	692.465	73	0,01	3.348	0,78	41.279	5,96	97.463	14,07	134.303	19,39	147.027	21,23	147.667	21,31	124.435	17,75
21	KALIMANTAN TENGAH	373.183	71	0,02	2.680	0,42	25.189	6,75	52.556	14,08	73.306	19,64	93.546	20,77	78.546	21,05	62.433	16,73
22	KALIMANTAN SELATAN	622.940	52	0,01	2.834	0,45	36.382	5,84	85.734	13,76	121.710	19,54	129.354	20,77	132.070	21,2	114.804	18,43
23	KALIMANTAN TIMUR	510.306	49	0,01	1.472	0,29	23.744	4,65	69.435	13,61	99.552	19,51	111.146	21,78	112.538	22,05	92.370	16,16
24	KULIMANTAN UTARA	82.290	5	0,01	400	0,48	4.261	5,15	11.060	13,36	15.641	18,89	18.042	21,79	18.431	22,26	19.970	18,06
25	SULAWESI UTARA	314.554	43	0,01	1.751	0,56	19.362	6,16	44.791	14,24	55.485	17,64	57.425	18,26	66.353	21,15	69.162	21,99
26	SULAWESI TENGAH	438.479	47	0,01	3.982	0,31	34.529	7,87	63.813	14,55	80.092	18,27	85.806	19,57	91.323	20,83	73.645	17,99
27	SULAWESI SELATAN	1.175.316	181	0,02	8.360	0,71	76.459	6,51	161.484	13,24	213.566	18,17	240.379	20,45	250.401	21,31	224.484	19,31
28	SULAWESI TENGGARA	373.084	121	0,03	2.660	0,71	26.222	7,03	53.947	14,46	71.845	19,26	78.901	21,15	76.006	20,27	62.585	16,99
29	GORONTALO	190.418	24	0,01	1.605	0,84	15.724	8,26	31.888	16,75	36.610	19,23	33.563	17,63	36.199	19,01	32.089	18,28
30	SULAWESI BARAT	195.834	30	0,02	2.284	1,17	16.988	8,67	31.319	15,99	36.730	18,76	33.038	19,93	37.355	19,97	34.083	16,39
31	MALUKU	196.783	42	0,02	651	0,33	9.696	4,93	25.214	12,81	36.228	18,41	44.106	22,41	44.520	22,62	36.326	18,46
32	MALUKU UTARA	155.591	26	0,02	669	0,43	8.878	5,71	21.219	13,64	29.443	18,92	34.322	22,06	33.233	21,36	21.801	17,87
33	PAPUA	88.866	44	0,05	3.44	0,39	4.452	5,01	11.694	13,16	17.870	20,11	20.069	22,58	18.986	21,26	15.408	17,14
34	PAPUA BARAT	89.246	43	0,05	508	0,57	5.042	5,65	12.374	13,87	17.775	19,93	19.962	22,37	18.973	21,26	14.656	16,32
35	PAPUA SELATAN	49.998	30	0,06	246	0,49	3.214	6,43	6.612	13,22	10.215	20,43	11.307	22,61	10.600	21,21	7.714	15,55
36	PAPUA TENGAH	86.114	63	0,07	444	0,52	5.461	6,24	11.712	13,6	18.046	20,36	17.141	19,91	19.680	22,35	13.667	15,73
37	PAPUA PEGUNUNGAN	102.641	44	0,04	278	0,27	4.108	4	10.007	9,75	17.536	17,08	21.603	21,05	28.100	27,88	20.365	20,45
Jumlah		38.660.939	2.960	0,01	124.985	0,32	1.979.832	5,12	5.515.994	14,27	7.397.553	19,13	8.018.354	20,74	8.393.984	21,71	7.222.033	18,69

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 8 JUMLAH PUS MENURUT UMUR KAWIN PERTAMA PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH PUS	PEREMPUAN		< 25 TAHUN		LARI-LAKI			
			< 19 TAHUN	≥ 19 TAHUN	JUMLAH	%	JUMLAH	%		
1	ACEH	774.727	108.974	14,07	665.753	85,93	220.205	28,42	1.021.815	71,58
2	SUMATERA UTARA	1.811.763	2.304.337	12,72	1.581.326	87,28	789.948	43,6	1.021.815	56,4
3	SUMATERA BARAT	716.432	101.024	14,1	615.408	85,9	251.254	35,07	465.178	64,93
4	RIAU	934.927	162.962	17,43	771.965	82,57	392.423	41,97	542.504	58,03
5	JAMBI	603.480	165.087	27,36	438.393	72,64	295.579	48,98	307.901	51,02
6	SUMATERA SELATAN	1.301.496	365.70	25,09	974.976	74,91	689.499	52,98	611.997	47,02
7	BENGKULU	323.688	81.945	25,32	241.743	74,68	170.895	52,8	152.793	47,2
8	LAMPUNG	1.302.424	261.579	20,08	1.040.845	79,92	600.645	46,12	701.779	53,88
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	237.690	61.318	25,8	176.372	74,2	126.404	53,18	111.286	46,82
10	KEPULAUAN RIAU	303.566	31.055	10,23	272.511	89,77	97.872	32,24	205.639	67,76
11	DKI JAKARTA	962.502	85.370	8,87	877.132	91,13	287.065	29,82	675.437	70,18
12	JAWA BARAT	7.579.359	2.220.104	29,29	5.359.255	70,71	3.909.143	51,58	3.670.216	48,42
13	JAWA TENGAH	5.631.070	1.203.323	21,37	4.427.747	78,63	2.413.244	42,86	3.217.826	57,14
14	DIAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	503.712	90.685	10,06	413.027	89,94	172.812	34,31	330.900	65,69
15	JAWA TIMUR	6.002.746	1.505.904	25,09	4.496.842	74,91	2.778.105	46,28	3.224.641	53,72
16	BANTEN	1.819.806	385.717	21,2	1.434.089	78,8	870.644	47,84	949.162	52,16
17	BAU	577.007	71.591	12,41	505.416	87,59	242.994	42,11	334.013	57,89
18	NUSA TENGGARA BARAT	916.483	236.711	25,83	679.772	74,17	492.487	53,74	423.996	46,26
19	NUSA TENGGARA TIMUR	617.260	82.979	13,44	534.281	86,56	245.849	39,83	371.411	60,17
20	KALIMANTAN BARAT	692.392	182.857	26,41	509.535	73,59	358.008	51,71	334.384	48,29
21	KALIMANTAN TENGAH	373.112	123.459	33,09	249.653	66,91	203.788	54,62	169.324	45,38
22	KALIMANTAN SELATAN	622.888	198.701	31,9	424.187	68,1	337.357	54,16	285.531	45,84
23	KALIMANTAN TIMUR	50.257	107.370	21,04	402.887	78,96	217.510	42,63	292.747	57,37
24	KALIMANTAN UTARA	82.785	19.954	24,1	62.831	75,9	34.053	41,13	48.732	58,87
25	SULAWESI UTARA	314.511	71.063	22,59	243.448	77,41	166.755	53,02	147.756	46,98
26	SULAWESI TENGAH	438.432	129.842	29,62	308.590	70,38	234.294	53,44	204.138	46,56
27	SULAWESI SELATAN	1.175.135	299.648	25,5	875.487	74,5	576.041	49,02	599.094	50,98
28	SULAWESI TENGGARA	372.940	106.219	28,48	266.721	71,52	190.524	51,08	182.416	48,91
29	GORONTALO	190.394	50.908	26,74	139.486	73,26	112.812	59,29	77.582	40,75
30	SULAWESI BARAT	195.804	58.358	29,8	137.446	70,2	100.982	51,57	94.822	48,43
31	MALUKU	196.741	31.734	15,88	165.007	84,12	94.115	47,84	102.626	52,16
32	MALUKU UTARA	155.565	31.808	20,45	123.757	79,55	83.430	53,63	72.135	46,37
33	PAPUA	88.822	16.606	18,7	72.216	81,3	39.479	44,45	49.343	55,55
34	PAPUA BARAT	89.203	18.144	20,34	71.059	79,66	42.411	47,54	46.792	52,46
35	PAPUA SELATAN	49.968	13.806	27,63	36.162	72,37	26.144	52,32	23.824	47,68
36	PAPUA TENGAH	86.051	22.805	26,5	63.246	73,5	52.056	60,49	33.995	39,51
37	PAPUA PEGUNUNGAN	102.597	20.364	19,85	82.233	80,15	70.720	68,93	31.877	31,07
JUMLAH TOTAL		38.657.735	8.876.431	22,96	29.781.304	77,04	17.987.546	46,53	20.670.189	53,47

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 9 JUMLAH PUS MENURUT ANAK LAHIR HIDUP PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH PUS	JUMLAH ANAK LAHIR HIDUP				JUMLAH ANAK LAH-LAH LAHIR HIDUP				JUMLAH ANAK PEREMPUN LAHIR HIDUP			
			0 ANAK	1 ANAK	2 ANAK	> 3 ANAK	0 ANAK	1 ANAK	2 ANAK	> 2 ANAK	0 ANAK	1 ANAK	2 ANAK	> 2 ANAK
1	ACEH	774.227	732.47	184.235	222.267	229.978	232.866	302.114	164.523	75.224	260.019	229.598	151.617	160.395
2	SUMATERA UTARA	1.811.763	153.079	378.380	562.352	717.056	501.616	715.181	408.152	186.814	568.679	712.752	369.025	63.495
3	SUMATERA BARAT	716.432	55.557	149.956	231.140	273.779	205.542	282.715	156.699	71.472	220.774	293.826	150.213	51.619
4	RIAU	934.927	75.512	120.515	321.544	317.356	276.785	383.627	197.205	77.306	307.167	384.174	181.195	62.091
5	JAMBI	603.480	43.981	160.645	237.079	161.775	188.069	259.165	119.518	36.724	207.600	258.496	109.244	28.140
6	SUMATERA SELATAN	1.301.698	85.842	333.787	516.013	365.854	385.660	568.985	266.121	80.430	437.386	558.572	240.434	65.132
7	BENGKULU	332.688	20.654	81.849	132.824	88.365	96.738	141.280	66.630	19.040	108.484	140.561	59.745	14.894
8	LAMPUNG	1.302.424	73.963	374.738	547.507	306.216	398.455	584.705	254.046	65.234	449.875	570.783	228.855	52.914
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	237.690	17.439	63.600	95.285	61.366	74.014	102.644	47.544	13.476	83.416	101.662	42.143	10.466
10	KEPULAUAN RIAU	303.566	30.367	74.179	106.851	92.169	96.814	124.635	61.611	20.506	107.792	124.121	55.384	16.266
11	DKI JAKARTA	960.502	70.402	222.665	390.533	278.700	294.065	408.533	201.049	58.855	317.816	408.934	186.098	49.654
12	JAWA BARAT	7.579.359	554.594	2.164.610	2.942.332	1.917.832	2.411.973	3.264.133	1.468.885	434.586	2.675.682	3.223.189	1.334.688	345.800
13	JAWA TENGAH	5.631.070	367.609	1.678.104	2.497.962	1.087.195	1.847.669	2.508.954	1.053.346	221.101	2.028.995	2.472.675	951.448	177.954
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	503.712	41.941	164.554	219.330	77.887	179.839	222.324	86.336	15.213	195.540	212.723	78.110	12.785
15	JAWA TIMUR	6.002.746	451.765	2.061.432	2.946.506	943.043	2.111.838	2.688.176	1.014.625	188.103	2.303.131	2.638.346	911.157	152.112
16	BAWEN	1.819.806	128.494	535.579	698.035	457.698	576.971	790.315	348.358	104.162	643.690	771.167	317.196	81.753
17	BALI	577.007	49.220	148.110	241.097	138.580	169.712	269.071	117.661	20.563	219.100	233.395	95.073	29.439
18	NUSA TENGGARA BARAT	916.483	74.158	264.633	336.153	241.539	293.456	394.092	176.779	52.156	330.664	383.487	158.857	44.475
19	NUSA TENGGARA TIMUR	617.260	45.301	131.465	164.900	275.694	160.323	233.773	141.050	82.114	183.603	230.854	132.586	70.217
20	KALIMANTAN BARAT	692.392	48.389	180.213	261.532	202.258	207.787	296.274	140.292	48.039	233.175	293.599	128.231	38.387
21	KALIMANTAN TENGAH	373.112	32.398	104.589	140.061	96.064	120.397	157.997	72.432	22.286	135.847	153.888	64.079	17.298
22	KALIMANTAN SELATAN	622.888	53.574	177.942	244.121	147.251	204.850	266.361	118.554	33.123	229.909	261.009	105.603	26.367
23	KALIMANTAN TIMUR	510.257	44.301	120.483	184.167	161.406	155.821	208.983	106.917	38.536	174.733	207.881	97.007	30.636
24	KALIMANTAN UTARA	82.785	7.205	18.307	26.090	31.483	23.978	32.448	18.069	8.498	27.012	32.557	16.529	6.687
25	SULAWESI UTARA	314.511	22.952	93.392	121.376	76.791	99.424	137.998	59.611	17.478	113.394	134.466	53.484	32.367
26	SULAWESI TENGAH	438.432	39.264	105.487	144.133	148.548	131.859	175.627	90.789	40.157	147.644	174.526	83.438	32.824
27	SULAWESI SELATAN	1.175.135	99.143	288.901	388.295	398.796	335.670	469.678	243.019	106.768	392.589	470.404	226.595	85.547
28	SULAWESI TENGGARA	372.940	29.139	79.288	111.434	153.079	102.721	143.550	83.018	43.651	114.763	144.392	77.998	35.787
29	GONOWITALO	17.456	52.074	59.728	66.573	54.291	61.554	71.412	12.925	67.445	78.388	33.926	10.735	10.735
30	SULAWESI BARAT	195.804	16.556	44.810	56.931	77.507	65.065	73.689	41.666	24.407	62.341	73.633	39.240	19.860
31	MALUKU	196.741	14.777	43.521	54.882	83.611	52.550	75.548	44.156	24.687	59.257	75.888	40.338	20.658
32	MALUKU UTARA	155.565	12.781	40.335	47.295	55.154	45.290	63.792	32.043	14.440	51.585	62.525	29.875	11.580
33	PAPUA	88.822	12.301	23.227	23.629	29.665	29.971	32.894	16.390	9.427	31.048	31.899	15.331	7.424
34	PAPUA BARAT	89.203	10.614	20.529	24.429	29.665	29.971	32.894	16.390	9.427	31.048	31.899	15.331	7.424
35	PAPUA SELATAN	49.568	5.565	11.653	14.764	17.956	14.903	19.174	10.096	5.795	17.260	18.875	9.461	4.372
36	PAPUA TENGAH	22.559	26.503	20.138	16.851	33.378	36.361	32.378	12.077	4.635	46.126	26.675	9.954	3.296
37	PAPUA PEGUNINGAN	102.597	34.337	7.897	18.420	7.897	53.536	39.347	7.588	2.136	65.021	30.998	5.257	1.321
TOTAL		38.637.733	2.398.582	10.866.413	14.970.000	9.988.940	12.282.612	16.582.493	7.502.391	2.230.237	13.052.294	16.333.534	6.807.233	1.864.654

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 10 JUMLAH PUS MENURUT ANAK MASIH HIDUP PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH PUS	0 ANAK	1 ANAK	JUMLAH ANAK MASIH HIDUP	> 2 ANAK	0 ANAK	JUMLAH ANAK LAKI-LAKI MASIH HIDUP	> 2 ANAK	0 ANAK	JUMLAH ANAK PEREMPUAN MASIH HIDUP	> 2 ANAK
1	ACEH	774.727	76.094	186.031	228.594	284.022	236.796	302.895	162.914	72.233	463.589	299.874
2	SUMATERA UTARA	1.811.763	158.214	382.253	566.851	704.445	509.372	717.052	404.759	180.580	575.687	714.367
3	SUMATERA BARAT	716.432	57.610	125.319	238.983	268.520	208.491	155.403	105.405	69.085	221.420	294.550
4	RIAU	934.927	78.167	222.823	323.425	310.512	280.737	384.638	195.098	74.454	310.783	384.936
5	JAMBI	603.480	46.028	162.981	238.599	155.872	255.800	117.778	34.603	210.580	258.829	107.463
6	SUMATERA SELATAN	1.301.496	90.401	337.389	518.374	355.332	392.378	569.790	262.695	76.633	443.220	558.648
7	BENGKULU	323.688	21.549	83.011	134.011	85.117	98.319	141.801	65.598	17.970	109.915	140.835
8	LAMPUNG	1.302.424	77.795	378.792	549.706	296.131	404.099	585.786	250.592	61.947	455.400	570.916
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	237.690	18.001	64.250	95.647	59.792	74.843	120.872	47.025	12.950	108.670	101.677
10	KEPULAUAN RIAU	303.566	31.000	74.608	107.159	90.799	97.661	124.664	61.269	19.972	104.123	54.942
11	DKI JAKARTA	962.502	74.249	2.193.021	393.322	268.900	299.262	410.940	1.97.589	55.611	323.214	408.869
12	JAWA BARAT	7.579.359	581.192	2.193.021	2.956.423	1.848.715	2.452.875	1.445.823	409.915	2.713.612	3.224.628	1.313.651
13	JAWA TENGAH	5.631.070	386.590	1.705.498	2.506.493	1.032.489	1.878.714	2.513.144	1.033.513	205.699	2.057.029	2.473.643
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	503.712	43.205	166.229	219.592	74.686	181.844	222.408	85.063	14.397	197.268	217.195
15	JAWA TIMUR	6.002.746	473.814	2.088.547	2.946.123	894.762	2.144.260	2.688.088	995.280	175.120	2.332.727	2.634.126
16	BANTEN	1.819.806	135.358	540.054	699.387	445.007	585.779	790.320	344.034	99.673	651.954	776.674
17	BAU	577.007	50.443	149.201	242.203	135.142	171.487	269.634	116.396	13.470	220.833	233.478
18	NUSA TENGGARA BARAT	916.483	78.282	269.373	339.201	229.627	300.266	395.634	172.742	47.841	336.625	383.059
19	NUSA TENGGARA TIMUR	617.260	47.050	132.864	165.956	271.390	162.993	234.892	139.763	79.612	186.126	231.618
20	KALIMANTAN BARAT	682.392	50.634	182.025	263.046	196.687	211.083	297.033	138.474	45.802	236.119	292.867
21	KALIMANTAN TENGAH	373.112	33.422	105.325	140.469	93.896	121.823	158.215	71.609	21.465	137.099	155.809
22	KALIMANTAN SELATAN	622.888	55.425	180.070	245.258	142.135	207.867	266.910	116.928	31.183	232.601	261.180
23	KALIMANTAN TIMUR	510.257	45.784	121.167	184.932	157.743	157.743	209.200	105.974	37.340	176.496	207.940
24	KALIMANTAN UTARA	82.785	7.381	18.418	26.228	30.758	24.241	37.329	17.934	8.313	27.229	32.619
25	SULAWESI UTARA	314.511	24.164	94.632	121.709	74.006	101.201	138.185	58.525	16.600	114.840	134.461
26	SULAWESI TENGAH	438.432	41.150	107.506	145.546	144.230	134.991	176.678	89.154	37.609	150.444	175.130
27	SULAWESI SELATAN	1.175.135	103.051	293.297	391.079	387.708	362.188	471.542	239.743	101.662	398.276	471.388
28	SULAWESI TENGGAH	372.940	30.318	80.491	112.563	149.568	104.751	142.188	41.619	116.552	144.984	177.092
29	GORONTALO	190.394	18.262	53.351	67.201	51.580	63.210	79.683	35.747	11.754	68.762	78.587
30	SULAWESI BARAT	195.804	17.217	45.548	57.575	75.464	57.198	74.451	41.140	23.015	63.325	74.839
31	MALUKU	196.741	15.565	43.766	54.977	82.413	53.324	75.640	43.763	24.014	60.161	75.936
32	MALUKU UTARA	155.565	13.257	40.701	47.598	54.019	46.003	63.986	31.690	13.896	52.254	62.630
33	PAPUA	88.822	12.608	23.290	23.594	29.329	29.886	32.881	16.804	9.251	34.271	31.875
34	PAPUA BARAT	89.203	10.949	20.598	24.503	33.193	27.457	33.119	18.239	10.196	31.347	32.549
35	PAPUA SELATAN	49.968	5.707	11.690	14.800	17.771	15.058	19.180	11.001	5.719	17.411	18.879
36	PAPUA TENGAH	86.051	23.150	26.403	19.962	16.536	37.479	32.180	10.919	4.483	46.578	26.643
37	PAPUA PEGUNUNGAN	102.597	34.655	42.186	18.138	7.618	53.988	39.147	7.450	2.012	65.446	30.750
JUMLAH TOTAL		38.657.735	3.067.738	11.004.725	15.029.227	9.556.045	12.481.016	16.612.466	7.390.556	2.173.697	13.834.073	16.340.931
											6.704.590	1.778.141

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 11 JUMLAH PUS MENURUT ANAK IDEAL YANG DIINGINKAN PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH PUS	JUMLAH ANAK IDEAL YANG DIINGINKAN			
			0 ANAK	1 ANAK	2 ANAK	> 2 ANAK
1	ACEH	774.727	2.958	8.922	202.049	560.798
2	SUMATERA UTARA	1.811.763	8.624	33.393	809.094	960.652
3	SUMATERA BARAT	716.432	1.549	8.530	310.958	395.395
4	RIAU	934.927	2.941	15.288	467.976	448.722
5	JAMBI	603.480	1.592	8.570	354.629	238.689
6	SUMATERA SELATAN	1.301.496	4.356	24.578	765.588	506.994
7	BENGKULU	323.688	870	4.477	191.056	127.285
8	LAMPUNG	1.302.424	4.464	24.078	815.432	456.450
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	237.690	358	5.995	148.141	82.596
10	KEPULAUAN RIAU	303.566	776	6.194	171.562	125.034
11	DAI JAKARTA	962.502	31.708	75.431	626.358	229.005
12	JAWA BARAT	7.579.359	30.962	135.160	4.681.500	2.731.737
13	JAWA TENGAH	5.631.070	12.348	88.405	4.105.404	1.424.913
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	503.712	682	12.672	412.028	78.374
15	JAWA TIMUR	6.002.746	18.664	193.730	4.608.374	1.181.978
16	BANTEN	1.819.806	6.296	30.884	958.057	824.569
17	BAU	577.007	1.587	13.229	357.526	204.665
18	NUSA TENGGARA BARAT	617.483	2.701	10.632	392.846	510.304
19	NUSA TENGGARA TIMUR	916.260	5.183	13.519	197.652	400.906
20	KALIMANTAN BARAT	692.392	3.188	17.251	362.218	309.735
21	KALIMANTAN TENGAH	373.112	1.877	9.926	224.090	137.219
22	KALIMANTAN SELATAN	622.888	2.282	15.381	404.795	200.430
23	KALIMANTAN TIMUR	510.257	2.734	11.086	296.242	200.195
24	KALIMANTAN UTARA	82.785	265	1.380	38.949	42.191
25	SULAWESI UTARA	314.511	2.331	17.587	206.754	87.839
26	SULAWESI TENGAH	438.432	3.529	11.552	240.192	183.159
27	SULAWESI SELATAN	1.175.135	5.246	24.551	575.276	570.063
28	SULAWESI TENGGARA	372.940	1.719	5.514	133.957	231.750
29	GORONTALO	190.394	1.584	7.121	117.016	64.673
30	SULAWESI BARAT	195.804	632	2.965	75.115	117.092
31	MALUKU	196.741	1.413	6.119	74.626	114.583
32	MALUKU UTARA	155.565	1.317	4.932	70.116	79.200
33	PAPUA	88.822	930	3.285	40.691	43.912
34	PAPUA BARAT	89.203	1.318	3.604	39.820	44.461
35	PAPUA SELATAN	49.968	467	1.611	23.243	24.647
36	PAPUA TENGAH	86.051	8402	8.465	32.970	36.214
37	PAPUA PEGUNUNGAN	102.597	5.944	11.426	38.444	46.783
TOTAL		38.657.735	183.796	877.002	23.571.725	14.029.212

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 12 JUMLAH PUS STATUS HAMIL MENURUT KEINGINAN KEHAMILAN SAAT ITU
PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA

NO	PROVINSI	JUMLAH PUS (WANITA KAWIN) STATUS HAMIL	KEINGINAN KEHAMILAN		
			INGIN HAMIL SAAT ITU	INGIN HAMIL NANTI/ KEMUDIAN	TIDAK INGIN ANAK LAGI
1	ACEH	41.575	38.772	2.476	327
2	SUMATERA UTARA	62.531	55.129	5.517	1.885
3	SUMATERA BARAT	31.279	27.815	2.604	860
4	RIAU	28.899	25.891	2.278	730
5	JAMBI	20.480	18.717	1.354	409
6	SUMATERA SELATAN	37.288	34.128	2.387	773
7	BENGKULU	11.169	10.235	691	243
8	LAMPUNG	38.688	34.952	2.814	922
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7.335	6.643	501	191
10	KEPULAUAN RIAU	8.535	7.464	811	260
11	DKI JAKARTA	26.738	20.744	3.530	2.464
12	JAWA BARAT	270.714	237.002	25.446	8.266
13	JAWA TENGAH	189.524	168.497	15.585	5.442
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	15.053	13.360	1.165	528
15	JAWA TIMUR	171.500	152.787	13.544	5.169
16	BANTEN	53.600	47.406	4.987	1.207
17	BALI	13.827	12.572	914	341
18	NUSA TENGGARA BARAT	42.478	39.181	2.779	518
19	NUSA TENGGARA TIMUR	24.799	22.609	1.742	448
20	KALIMANTAN BARAT	19.625	17.838	1.400	387
21	KALIMANTAN TENGAH	9.156	8.329	642	185
22	KALIMANTAN SELATAN	19.676	17.931	1.405	340
23	KALIMANTAN TIMUR	15.091	13.108	1.520	463
24	KALIMANTAN UTARA	2.533	2.241	237	55
25	SULAWESI UTARA	7.723	6.764	657	302
26	SULAWESI TENGAH	14.982	13.400	1.247	335
27	SULAWESI SELATAN	43.246	38.354	4.001	891
28	SULAWESI TENGGARA	15.783	14.179	1.346	258
29	GORONTALO	7.594	6.785	679	130
30	SULAWESI BARAT	9.360	8.410	843	107
31	MALUKU	6.945	6.075	665	205
32	MALUKU UTARA	4.627	4.214	347	66
33	PAPUA	1.923	1.617	251	55
34	PAPUA BARAT	2.234	1.806	355	73
35	PAPUA SELATAN	1.487	1.342	95	50
36	PAPUA TENGAH	5.273	4.852	378	43
37	PAPUA PEGUNUNGAN	2.318	2.156	133	29
JUMLAH TOTAL		1.285.588	1.143.305	107.326	34.957

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 13 JUMLAH PUS STATUS HAMIL MENURUT EMPAT TERLALU DAN UMUR ANAK
TERKECIL PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA

NO	PROVINSI	JUMLAH PUS (WANITA KAWIN) STATUS HAMIL	UMUR PUS (WANITA KAWIN) HAMIL			JUMLAH PUS (WANITA KAWIN) HAMIL		WANG JABAK KELAHIRAN SEBELUMNYA DENGAN KEHAMILAN < 2 TAHUN	WANG UMUR ANAK TERKECIL < 3 TAHUN
			< 20 (TERLALU MUDA)	20-35	> 35 (TERLALU TUA)	YANG JUMLAH ANAK LAHIR HIDUP > 2 ANAK (TERLALU BANYAK)	TERLALU		
1	ACEH	41.579	223	31.383	9.568	15.316	150	1.159	
2	SUMATERA UTARA	62.531	583	48.744	13.704	24.163	625	3.307	
3	SUMATERA BARAT	31.229	345	23.981	6.935	11.925	502	2.894	
4	RIAU	28.859	262	22.064	6.571	10.530	186	1.410	
5	JAMBI	20.484	494	16.069	3.917	5.893	112	774	
6	SUMATERA SELATAN	37.288	694	28.522	8.072	11.595	156	1.134	
7	BENGKULU	11.169	247	8.742	2.180	3.276	47	325	
8	LAMPUNG	38.688	303	28.986	9.399	11.654	116	940	
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7.335	255	5.855	1.225	2.286	67	464	
10	KEPULAUAN RIAU	8.535	75	6.416	2.044	3.064	152	884	
11	DIJAKARTARA	26.738	77	19.954	6.707	11.214	777	4.559	
12	JAWA BARAT	270.714	3.293	207.374	60.047	86.387	1.154	9.746	
13	JAWA TENGAH	189.524	1.568	146.650	38.306	45.889	743	6.508	
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	15.053	78	11.966	3.015	2.776	108	808	
15	JAWA TIMUR	171.504	2.438	134.729	34.333	35.515	655	5.174	
16	BANTEN	33.604	473	40.726	12.407	17.708	330	2.274	
17	BAU	13.827	200	11.371	2.256	4.081	186	1.130	
18	NUSA TENGGARA BARAT	42.478	1.486	31.431	9.561	12.098	180	1.310	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	24.799	322	17.565	6.912	10.739	150	983	
20	KALIMARAN BARAT	19.625	434	14.769	4.422	6.846	79	585	
21	KALIMARAN TENGAH	9.156	314	6.828	2.014	2.932	65	364	
22	KALIMARAN SELATAN	19.676	376	15.194	4.106	6.100	100	584	
23	KALIMARAN TIMUR	15.091	229	11.499	3.363	5.966	223	1.116	
24	KALIMARAN UTARA	2.533	45	1.918	576	1.139	37	285	
25	SULAWESI UTARA	7.723	210	5.999	1.514	2.537	66	346	
26	SULAWESI TENGAH	14.982	533	11.397	3.052	5.582	153	850	
27	SULAWESI SELATAN	43.246	1.275	32.192	9.779	16.137	509	2.935	
28	SULAWESI TENGGARA	15.783	402	11.744	3.637	6.566	201	1.073	
29	GORONTALO	7.594	244	6.035	1.172	2.380	89	421	
30	SULAWESI BARAT	9.360	417	7.171	1.771	3.629	158	827	
31	MALUKU UTARA	6.945	104	4.947	1.894	3.062	88	506	
32	MALUKU	4.627	89	3.321	1.217	1.852	28	191	
33	PAPUA	1.923	31	1.282	610	838	12	107	
34	PAPUA BARAT	2.234	42	1.582	1.044	904	29	146	
35	PAPUA SELATAN	1.487	15	1.014	458	682	2	23	
36	PAPUA TENGAH	5.273	23	4.278	972	873	36	259	
37	PAPUA PEGUNUNGAN	2.318	14	1.257	1.047	943	1	14	
Jumlah		1.285.588	18.213	987.425	279.530	395.877	8.272	56.341	
TOTAL									

Sumber: Pendataan Kelurga dan Pemutakhiran

**LAMPIRAN 14 JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KETENTRAMAN
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN**

[illegible][illegible]

**LAMPIRAN 15 JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KEMANDIRIAN
PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN**

[illegible]

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 16 JUMLAH KELUARGA MENURUT DIMENSI KEBAHAGIAAN PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH KELUARGA	SELAWA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, SETIAP ANGGOTA KELUARGA MEMILAI WAKTU UNTUK BERINTERAKSI SETIAP HARI				SELAWA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, PENGASUHAN ANAK DILAKUKAN BERSAMA ANTARA SUAMI DAN ISTRI				SELAWA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, KELUARGA PERNAH BERBERASA BERSAMA DI LUAR RUMAH				SELAWA 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR, KELUARGA KUT SERTA DALAM KEGIATAN SOSIAL/ GOTOYING ROYONG DI LINGKUNGAN RT			
			YA	TIDAK	TIDAK BERAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERAKU	YA	TIDAK	TIDAK BERAKU	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	ACH	1.289.133	1.107.375	64.501	117.257	837.967	26.272	424.944	960.020	211.856	117.257	117.557	114.084	341.049				
2	SUMATERA UTARA	3.484.610	2.928.436	199.168	357.128	2.105.436	124.354	1.254.820	2.120.449	917.033	357.128	2.552.889	932.421					
3	SUMATERA BARAT	1.313.116	1.139.748	62.569	110.999	1.039.871	40.896	428.938	1.079.401	325.416	110.999	1.075.615	237.501					
4	RIAU	1.502.224	1.356.734	49.092	96.398	1.039.871	40.896	428.938	1.079.401	325.416	96.398	1.308.508	193.716					
5	JAMBI	983.119	870.872	36.212	76.035	662.016	24.687	296.436	688.556	218.128	76.035	878.564	104.555					
6	SUMATERA SELATAN	2.211.093	1.954.333	94.743	162.117	1.451.182	83.983	675.928	1.451.017	623.959	162.117	1.907.309	303.784					
7	BENGKULU	543.159	477.136	23.023	43.000	360.695	16.013	166.451	390.677	109.482	43.000	468.190	74.969					
8	LAMPUNG	2.267.218	2.011.556	87.329	168.433	1.509.158	68.760	689.300	1.386.437	712.448	168.433	2.012.325	254.893					
9	KERULAUAN BANGKA	418.237	356.136	11.578	50.343	261.606	7.967	148.664	312.049	55.845	50.343	390.791	117.446					
10	KERULAUAN RIAU	468.616	427.976	10.915	29.725	324.575	9.003	135.038	389.891	49.000	29.725	396.828	71.788					
11	DKI JAKARTA	2.286.822	1.791.940	34.824	460.058	1.154.833	34.132	1.097.857	1.392.888	433.776	460.058	1.561.799	725.023					
12	JAWA BARAT	13.738.854	11.774.786	528.020	1.436.098	8.351.818	561.651	4.825.485	8.276.866	4.026.190	1.436.098	11.107.334	2.631.520					
13	JAWA TENGAH	10.948.576	9.602.574	264.062	1.081.840	6.664.083	310.277	3.974.316	6.678.380	3.188.356	1.081.840	9.965.355	983.221					
14	DAERAH ISTIMEWA	1.123.634	969.354	20.154	134.126	637.298	20.345	465.951	7.298.340	3.441.552	134.126	1.015.909	107.725					
15	JAWA TIMUR	12.443.745	10.354.778	385.114	1.403.853	6.938.887	81.869	848.523	7.298.340	3.441.552	1.403.853	10.717.609	1.426.136					
16	BANTEN	2.961.637	2.659.965	112.229	189.443	2.031.245	19.466	788.451	235.200	75.734	189.443	2.555.350	406.087					
17	BAU	1.093.369	991.409	32.226	704.297	75.734	704.297	579.977	953.158	466.169	704.297	1.364.006	228.241					
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.592.347	1.343.870	75.457	172.920	948.011	64.259	579.977	953.158	466.169	172.920	1.364.006	228.241					
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.127.412	948.570	111.668	67.674	704.400	80.685	342.327	633.868	426.370	67.674	1.012.836	102.565					
20	KALIMANTAN BARAT	1.171.765	1.031.012	64.997	75.756	744.744	73.529	353.492	743.275	352.334	75.756	1.012.836	158.929					
21	KALIMANTAN TENGAH	602.503	522.259	26.574	53.670	388.372	23.608	190.523	388.372	164.107	53.670	492.577	109.976					
22	KALIMANTAN SELATAN	1.108.163	952.065	40.184	666.668	36.229	405.266	702.817	289.332	115.914	66.489	192.780	191.000					
23	KALIMANTAN TIMUR	857.269	761.448	29.998	65.923	554.363	30.184	272.722	554.363	221.336	65.923	804.7	112.342					
24	KALIMANTAN UTARA	134.401	121.984	4.370	90.689	8.047	4.287	39.425	88.24	37.530	8.047	112.342	22.059					
25	SULAWESI UTARA	668.895	563.300	34.916	70.679	367.616	26.765	264.534	422.433	175.473	70.679	578.067	90.288					
26	SULAWESI TENGAH	771.795	652.136	46.556	73.103	469.834	33.527	268.534	449.278	249.014	73.103	652.707	119.088					
27	SULAWESI SELATAN	2.246.956	1.924.463	116.267	206.226	1.328.423	91.441	827.092	1.212.481	828.449	206.226	2.575.918	475.918					
28	SULAWESI TENGARA	642.767	552.835	35.709	54.223	404.363	29.326	209.078	374.276	214.318	54.223	528.060	114.707					
29	GORONTALO	339.372	286.941	21.633	30.798	199.707	15.369	124.296	210.936	97.638	30.798	245.254	94.118					
30	SULAWESI BARAT	322.204	280.885	18.469	23.050	209.589	13.391	99.244	171.556	127.598	23.050	277.435	44.788					
31	MAJURU	357.477	310.785	22.001	24.691	231.340	15.245	110.892	246.961	85.925	24.691	329.309	28.168					
32	MAJURU UTARA	256.496	219.025	18.951	18.520	169.141	12.305	75.920	167.711	70.005	18.520	231.022	25.474					
33	RIPAU	168.747	142.751	8.780	12.716	96.395	5.713	66.639	125.074	25.877	12.716	152.623	16.124					
34	RIPAU BARAT	162.463	130.446	11.907	20.110	91.988	9.161	63.134	107.969	34.954	20.110	144.926	17.537					
35	RIPAU SELATAN	88.146	74.700	6.376	2.088	51.295	4.484	32.385	57.57	23.19	2.088	76.865	13.299					
36	RIPAU TENGAH	160.136	87.397	44.191	26.748	57.871	26.386	76.029	75.853	55.736	26.748	103.688	56.648					
37	RIPAU PEGUNUNGAN	221.825	125.887	45.221	50.717	70.080	23.649	128.096	92.121	78.936	50.717	170.819	51.006					
		JUMLAH TOTAL	71.784.439	61.897.175	2.799.684	43.728.556	2.405.644	26.650.439	44.773.879	19.883.080	7.177.660	63.805.548	10.978.971					

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 19 JUMLAH KELUARGA YANG TERPAKAR PESAN/INFORMASI PROGRAM BANGGA KENCANA
MELALUI MEDIA PENDATIAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINSI	JUMLAH KELUARGA MENYURUT KETERTAPAN (MEMERIKSA/MELENGKAP/ MELALUI PESAN/INFORMASI)		SUMBER MEDIA					
		YA	TIDAK	KORAN/MALAM/ TABLOID	TELEVISI/RADIO / VIDEO ORION	FACEBOOK/INSTAGRAM/ TWITTER/WHATSAPP/ YOUTUBE/BLUOG/WEBSITE	SEMINAR/PENGALAMAN/BIAD AT/WORKSHOP/DISSEMINASI / PERTEMUAN KELOMPOK KEGAT/AN/KONELING	LEAFLET/TEMPER BALK/ POSTER/SPANDUK/BANNER / UMBUL- UMBUL/BERBARA/	WAWANCARA/PEMINTAS BUANA LOKAL
1	ACEH	977.680	311.453	2.32.010	745.199	405.555	166.657	104.177	2.065
2	SUMATERA UTARA	2.643.201	841.409	518.709	2.133.825	1.103.106	345.599	238.296	7.742
3	SUMATERA BARAT	1.042.887	270.229	1.73.778	871.376	523.278	132.079	108.077	3.351
4	RIAU	1.159.481	342.765	177.666	916.372	652.626	194.265	106.888	4.651
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1.752.425	426.400	274.278	1.327.025	825.132	462.582	282.582	3.352
6	SUMATERA SELATAN	1.234.435	426.400	274.278	1.327.025	825.132	462.582	282.582	3.352
7	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	437.725	105.344	83.796	1.66.483	217.341	43.555	1.797	1.797
8	LAMPUNG	1.213.344	553.824	178.698	1.236.286	692.268	233.664	97.529	3.915
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	322.964	95.223	64.871	258.226	188.657	43.714	48.386	1.177
10	KEPULAUAN RIAU	379.613	89.003	80.317	275.743	257.580	58.951	34.800	1.308
11	DKI JAKARTA	1.915.607	371.215	115.495	1.844.186	427.642	12.802	177.347	267
12	JAWA TENGAH	11.084.858	2.653.996	893.143	9.492.942	4.775.508	1.245.564	668.486	24.266
13	JAWA TENGAH	9.032.813	1.915.763	893.143	7.102.794	3.508.102	1.687.169	858.484	68.305
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	884.051	229.583	1.502.01	721.090	396.130	236.044	141.504	17.137
15	JAWA TIMUR	9.425.749	2.717.996	1.095.494	8.409.508	3.932.146	1.374.476	901.272	47.936
16	BATANG	2.365.455	596.182	2.59.062	1.962.003	1.095.722	276.461	162.277	18.189
17	BAU	888.160	211.209	150.437	738.662	449.875	91.118	133.404	4.200
18	MUSA TENGGARA BARAT	1.094.319	487.928	93.217	897.286	533.536	144.466	176.393	2.642
19	MUSA TENGGARA BARAT	794.027	333.385	128.586	590.904	293.179	229.404	176.393	2.642
20	KALIMANTAN BARAT	845.684	326.107	101.957	668.014	406.355	110.941	105.347	3.585
21	KALIMANTAN TENGAH	429.172	173.551	44.599	297.744	228.705	68.039	73.202	1.385
22	KALIMANTAN SELATAN	680.024	259.109	101.957	465.236	360.651	102.085	93.505	1.273
23	KALIMANTAN UTARA	101.917	32.489	84.313	64.776	65.071	19.688	12.879	1.266
24	KALIMANTAN UTARA	519.346	149.746	87.044	420.387	251.584	70.822	37.188	982
25	SULAWESI UTARA	543.406	228.390	42.778	423.626	233.624	98.633	74.590	1.031
26	SULAWESI TENGAH	1.815.628	431.328	210.688	1.464.801	868.668	335.075	218.386	2.775
27	SULAWESI SELATAN	482.645	160.122	43.554	320.752	213.191	84.491	72.143	918
28	SULAWESI TENGGARA	276.759	62.613	32.810	222.974	144.338	75.046	32.068	624
29	SULAWESI BARAT	237.039	85.165	21.690	179.659	114.548	50.386	32.068	624
30	SULAWESI BARAT	262.546	94.929	36.410	189.046	120.585	44.093	36.089	304
31	MAJUKU UTARA	191.026	65.470	23.239	134.373	90.346	35.636	35.636	221
32	MAJUKU UTARA	129.811	38.936	36.637	93.002	59.024	39.559	35.118	1.379
33	PAJUPA	114.760	47.703	13.446	65.667	30.350	28.292	28.292	403
34	PAJUPA SELATAN	62.987	25.177	16.188	38.415	20.365	12.197	12.197	798
35	PAJUPA TENGAH	81.590	78.746	16.188	38.415	20.365	12.197	12.197	798
36	PAJUPA TENGAH	59.427	162.204	13.515	46.276	7.930	28.294	19.046	218
37	JUMAH TOTAL	56.315.686	15.448.523	6.663.931	46.276.351	24.472.541	8.212.388	5.357.985	240.592

Sumber: Pendaan Keluarga dan Pemutakhiran

LAMPIRAN 20 JUMLAH KELUARGA YANG TERPAKAI PESAN/INFORMASI PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI PETUGAS PENDATAAN KELUARGA DAN PEMUTAKHIRAN

NO	PROVINS	JUMLAH KELUARGA MENURUT KETERPAKANAN (MEMERIKAH/ MENINGGAL/ MELAKUKAI PEANYAAN/FORMASI PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI PETUGAS)			PETUGAS										
		YA	TIDAK	PEJABAT PEMERINTAH	BERENCANA (PM/PIB)/ PETUGAS LAYANAN KB	GURU/DOSEN	TOKOH AGAMA	TOKOH MASYARAKAT	DOKTER	BIDAN/ PERAWAT	PERANGKAT DESA KEMUDAHAN	KASIEH/IMP	LAINNYA		
1	ACEH	1.050.021	224.132	825.889	383.120	784.644	112.024	21.985	30.348	133.627	126.327	522.231	182.024	482.023	3.327
2	SUMATERA UTARA	2.040.954	779.756	1.261.198	363.120	1.678.834	212.624	46.138	87.182	232.262	219.848	1.127.216	763.231	863.006	8.254
3	SUMATERA BARAT	1.067.444	243.672	823.772	134.399	934.045	109.644	36.257	36.357	142.473	110.466	536.783	198.538	533.462	2.162
4	BALI	1.161.037	341.187	819.850	154.449	1.006.588	645.960	26.125	45.591	155.909	104.611	538.360	305.997	515.064	5.817
5	JAMBI	793.371	185.749	607.622	91.428	702.043	510.615	17.440	36.390	162.413	62.413	364.211	189.173	327.246	2.174
6	SUMATERA SELATAN	1.883.476	414.817	1.468.659	248.438	1.635.038	1.193.624	29.133	44.299	199.711	138.571	669.055	527.778	724.844	3.903
7	DIY	1.041.444	248.435	792.996	109.428	932.516	623.088	17.440	36.390	162.413	62.413	364.211	189.173	327.246	2.174
8	KAMPUNG RAYA	1.798.983	468.235	1.330.748	161.449	1.639.538	1.172.300	20.146	68.128	221.303	91.217	719.446	568.326	617.446	4.144
9	KEPULAUAN BANGKA BEUTUNG	323.457	94.780	228.677	31.440	292.017	262.017	6.968	16.201	45.277	32.551	167.073	79.688	172.077	1.004
10	KEPULAUAN RIAU	361.641	106.975	254.666	25.440	337.081	286.641	11.764	17.516	67.146	65.302	173.934	71.234	126.077	2.955
11	DKI JAKARTA	1.709.816	577.006	1.132.810	47.925	1.661.885	1.514.960	9.392	30.517	117.009	141.326	218.837	97.030	122.741	2.058
12	JAWA BARAT	11.006.339	2.732.515	8.273.824	908.023	10.104.314	5.956.023	134.072	955.075	1.448.444	657.130	3.751.216	2.360.193	5.959.736	52.158
13	JAWA TIMUR	9.830.121	2.153.416	7.676.705	1.015.511	8.815.210	5.800.700	28.640	94.549	385.526	114.546	1.781.927	156.732	553.985	7.747
14	DIY	1.041.444	248.435	792.996	109.428	932.516	623.088	17.440	36.390	162.413	62.413	364.211	189.173	327.246	2.174
15	JAWA TIMUR	9.897.415	2.465.330	7.432.085	678.934	9.216.481	5.741.481	136.992	400.519	1.377.974	581.127	4.133.963	2.246.326	4.894.317	31.842
16	BANTEN	2.386.523	575.114	1.811.409	191.141	1.620.368	1.420.368	32.420	77.063	239.915	178.405	776.806	459.512	1.299.444	10.261
17	BALI	909.479	185.890	723.589	119.610	789.869	664.256	16.169	20.799	130.523	135.283	445.798	328.626	218.188	2.254
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.214.997	377.340	837.657	137.440	1.077.217	710.651	20.544	54.193	101.512	101.512	601.359	275.011	678.974	4.093
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.218.471	208.991	1.009.480	154.488	1.063.992	854.504	15.440	47.728	194.473	135.483	668.519	228.778	852.722	1.088
20	DIY	1.041.444	248.438	792.996	109.428	932.516	623.088	17.440	36.390	162.413	62.413	364.211	189.173	327.246	2.174
21	KALIMANTAN TENGAH	442.366	160.139	282.227	37.962	404.328	264.328	9.164	12.144	43.258	35.264	232.067	87.206	138.021	1.027
22	KALIMANTAN SELATAN	811.432	294.731	516.701	51.145	766.576	555.299	10.943	24.437	79.308	37.579	335.426	139.752	341.219	6.215
23	KALIMANTAN TIMUR	243.139	61.439	181.700	55.952	187.181	131.237	14.634	23.131	87.740	88.081	269.241	101.455	258.248	3.253
24	KALIMANTAN UTARA	103.911	30.460	73.451	13.544	89.455	69.906	2.106	4.951	13.804	13.742	47.785	16.188	30.800	1.093
25	SULAWESI UTARA	529.421	138.474	390.947	43.474	476.395	386.900	8.532	21.088	48.561	59.392	155.171	163.732	180.674	1.392
26	SULAWESI TENGAH	1.885.016	355.919	1.529.097	129.456	1.762.553	1.406.100	32.133	70.325	223.414	169.322	839.316	408.134	1.077.246	3.564
27	SULAWESI SELATAN	1.188.016	292.456	895.560	100.456	1.088.100	888.100	32.133	70.325	223.414	169.322	839.316	408.134	1.077.246	3.564
28	SULAWESI TENGGARA	513.723	129.044	384.679	62.032	446.711	382.071	6.741	10.335	41.582	218.026	88.942	179.526	1.388	1.388
29	GORONTALO	287.921	42.341	245.580	18.444	263.964	201.444	3.515	12.664	33.032	13.986	88.767	85.578	155.755	804
30	SULAWESI BARAT	559.277	38.682	520.595	59.277	589.874	530.602	5.507	12.664	33.032	13.986	88.767	85.578	155.755	804
31	MALUKU	276.452	81.025	195.427	47.188	243.615	197.427	5.824	12.427	26.668	37.390	151.959	48.258	87.792	676
32	MALUKU UTARA	276.452	81.025	195.427	47.188	243.615	197.427	5.824	12.427	26.668	37.390	151.959	48.258	87.792	676
33	PAPUA	139.510	38.217	41.569	14.786	103.080	78.294	1.729	5.026	14.207	11.762	53.176	22.411	27.103	435
34	PAPUA BARAT	117.866	44.979	72.887	14.786	103.080	78.294	1.729	5.026	14.207	11.762	53.176	22.411	27.103	435
35	PAPUA SELATAN	21.440	8.534	12.906	2.540	18.896	16.356	42.911	2.578	10.783	41.537	13.788	15.604	15.604	103
36	PAPUA TENGAH	66.744	21.440	45.304	8.534	58.278	49.744	4.358	8.151	10.783	41.537	13.788	15.604	15.604	103
37	PAPUA PENGUNGAN	90.628	131.197	15.431	15.883	106.525	90.628	2.582	10.748	12.818	20.400	49.567	49.783	52.855	34.271
JUMLAH TOTAL		57.256.799	14.527.660	42.729.139	5.539.688	51.788.481	38.248.813	891.409	2.465.101	77.520.8	4.376.883	23.799.458	12.465.798	26.635.988	208.976

Sumber: Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran

